



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**T E N T A N G  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, menyatakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
5. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah terhitung sejak tahun 2024-2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
8. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
9. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

10. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

## BAB II RUANG LINGKUP RPD

### Pasal 2

- (1) RPD memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagai pedoman bagi Bupati untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat gambaran umum;
  - c. bab III memuat gambaran keuangan daerah;
  - d. bab IV memuat permasalahan dan isu strategis;

- e. bab V memuat tujuan dan sasaran;
  - f. bab VI strategi, arah kebijakan dan program prioritas;
  - g. bab VII memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat Daerah;
  - h. bab VIII memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
  - i. bab IX memuat penutup.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pemerintahan berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun pertama pemerintahan Bupati berikutnya.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PERUBAHAN RPD

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

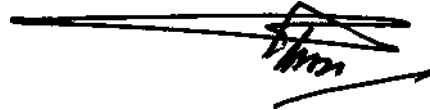
**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 31 Maret 2023  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal 31 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2023 NOMOR 4

## **RPD TAHUN 2024-2026**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara berakhir pada tahun 2023.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 dimaksud,



akan diisi dengan pejabat gubernur/pejabat bupati/pejabat walikota sejak mulai tahun 2023 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah (RPJMD), menunggu pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Di sisi lain, RPJMD sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan rancangan APBD. Lebih mendesak lagi bahwa di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional, pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pembangunan daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya termasuk menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025, yakni yakni Tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025, dan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2018-2023, yakni capaian kinerja sampai dengan tahun 2022. Sebagian besar indikator kinerja dapat mencapai target sebagaimana telah ditetapkan, sementara itu beberapa indikator belum dapat mencapai target meski mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan dari 67.39 % pada tahun 2021 menjadi 68.06% pada tahun 2022. Meskipun angka IPM belum mencapai target yang diinginkan, namun komponen di dalamnya seperti rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan angka



harapan hidup memenuhi target yang diharapkan. Sementara pengeluaran per kapita penduduk yang disesuaikan sebagai salah satu komponen penyumbang IPM belum mencapai hasil sebagaimana diharapkan.

Sementara itu, hasil pembangunan di bidang ekonomi masih belum mencapai target sebagaimana ditetapkan. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan menjadi 5,52% setelah pada tahun 2021 yang lalu akibat Pandemi Covid-19 mengalami kontraksi sebesar 3,46%. Angka kemiskinan mengalami penurunan dari 8,03% pada tahun 2021 menjadi 7,31% pada tahun 2022. Sedangkan pendapatan per kapita penduduk sebesar 35,27 juta rupiah, meningkat dari Tahun 2021 sebesar 32,57 juta rupiah. Adapun indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami sedikit penurunan dari tahun 2021 sebesar 5,23% menjadi 5,10% pada tahun 2022. Pada indikator yang menunjukkan keberhasilan dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan meliputi indeks reformasi birokrasi mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 40,03 menjadi 48,70 pada tahun 2022. Nilai indeks kepuasan masyarakat juga mengalami penurunan dari 85,38 pada tahun 2021 menjadi sebesar 82,24 pada tahun 2022.

Data-data hasil kinerja tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cukup terdampak Pandemi Covid-19 yang secara signifikan mempengaruhi kinerja pembangunan di masa-masa menjelang akhir RPJMD 2018-2023. Permasalahan- permasalahan yang masih dihadapi diantaranya kemiskinan, kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir, pelayanan publik yang belum optimal dan permasalahan lain yang harus segera diselesaikan agar dapat mewujudkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkeadilan sebagaimana terdapat dalam Visi RPJPD 2005-2025.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**





Landasan dalam penyusunan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
  9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
- 



15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 79);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 131).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 mempunyai hubungan dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan



lainnya sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, penyusunan RPD Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025, mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 serta RPJM Nasional Tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dokumen RPD Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026, juga memedomani dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2013, terkait kebijakan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang. Selain itu juga memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Utara, maupun RTRW Kabupaten/Kota sekitar agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten dan dalam kesatuan wilayah pembangunan provinsi yang berkelanjutan (*sustainable development*).

#### **1.3.1.Keterkaitan RPD dengan RPJMN Tahun 2020-2024**

Penyusunan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis dan prioritas nasional serta target yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Analisis isu strategis dan prioritas pembangunan nasional digunakan sebagai bahan dalam menyusun isu strategis RPD yang ditindaklanjuti untuk penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan



Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026. Keterkaitan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 disandingkan dengan agenda pokok RPJMN Tahun 2020-2024 sasaran pembangunan daerah tahun 2024-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

### **1.3.2.Keterkaitan RPD dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026**

Penyusunan RPD Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026, dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026 serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. RPD Tahun 2024-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi landasan utama penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2021-2026, adalah: ***“Sulawesi Utara maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”***

### **1.3.3.Keterkaitan RPD dengan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025**

RPD 2024-2026 merupakan penjabaran dari tahapan terakhir pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025.



RPD periode 2024-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2005-2025 yaitu ***“Mewujudkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkeadilan”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005 -2025 yakni :

1. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik;
3. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata;
4. Mewujudkan budaya yang berperadaban;
5. Mewujudkan Struktur perekonomian yang handal dan berdaya saing;
6. Meningkatkan fungsi sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke -3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang *Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkeadilan”*. melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing, Adapun Korelasi antara Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini:



Tabel 1. Keterkaitan Antara Misi RPJPD  
Kab. Bolaang Mongondow Utara 2005-2025  
dengan Tujuan RPD Kab. Bolaang Mongondow Utara 2024-2026

Tujuan RPD Kab. Bolaang Mongondow Utara 2024-2026	Misi RPJPD Kab. Bolaang Mongondow Utara 2005-2025
Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Misi 1: Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas
	Misi 4: Mewujudkan budaya yang
Tujuan 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Tujuan 3: Terwujudnya Petumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Misi 5: Mewujudkan struktur perekonomian yang handal dan berdaya saing;
Tujuan 4: Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berkelanjutan	Misi 3: Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata
	Misi 6: Meningkatkan fungsi sumber daya alam dan kualitas lingkungan Hidup.

**1.3.4.Keterkaitan RPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2013, penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai basis komoditas pertanian, perikanan didukung dengan pariwisata, dengan mensinergikan wilayah. Program pembangunan yang direncanakan pada RPD memedomani rencana struktur ruang wilayah kabupaten, yang terdiri dari: 1). Sistem pusat kegiatan baik sistem perkotaan maupun sistem perdesaan; dan 2). Sistem jaringan prasarana wilayah.

Program pembangunan pada RPD memedomani Pola Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terdiri dari: 1). kawasan lindung, dengan prioritas mempertahankan fungsi lindung dan



memanfaatkan sesuai dengan ketentuan aturan zonasi; dan 2). kawasan budidaya, dengan prioritas menyediakan sarana dan prasarana pendukung, menyediakan dokumen perencanaan spasial dan memperhatikan fungsi dan kelestarian lingkungan. Selain itu, program pembangunan pada RPD juga memedomani kawasan strategis Kabupaten meliputi bidang pertumbuhan ekonomi, bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, bidang fungsi dan daya dukung lingkungan, bidang pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut; dan bidang pelestarian sosial budaya. Dengan prioritas menyediakan sarana dan prasarana pendukung, menyediakan dokumen perencanaan spasial dan memperhatikan fungsi dan kelestarian lingkungan.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud memberikan landasan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2024-2026 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. RPD dilaksanakan dengan penajaman sasaran, strategi dan program dan penetapan prioritas dalam upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah. Selanjutnya RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 ini digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dengan tolok ukur evaluasi kinerja dan keuangan tahunan setiap Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan





tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Adapun tujuan penyusunan RPD Bolaang Mongondow Utara tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 3 (tiga) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2024- 2026;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 3 (tiga) tahun ke depan;
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026;
4. Menetapkan indikator kinerja sasaran dan tujuan daerah, serta indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara periode 2024- 2026.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Rencana Pembangunan Daerah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPD yang berisikan pengertian ringkas RPD, kedudukan RPD tahun rencana dalam RPJPD, gambaran capaian kinerja RPD periode sebelumnya, dasar hukum yang digunakan dalam



penyusunan, hubungan antar dokumen RPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM**

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan seluruh aspek kehidupan daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun.

## **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menguraikan aspek kinerja keuangan di masa lalu dan melakukan proyeksi kerangka pendanaan di masa depan.

## **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Bab ini permasalahan dan analisis isu strategis internal eksternal wilayah untuk mendukung penyusunan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## **BAB V TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan secara lebih terperinci ke dalam beberapa indikator tujuan dan sasaran pembangunan serta perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan di atasnya.

## **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS**

Bab ini memuat strategi dan kebijakan yang dilaksanakan sebagai arah langkah dalam menentukan program-program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN**



## **PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif dan target.

## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama daerah, indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja program perangkat daerah.

## **BAB IX PENUTUP**

Bab ini memuat penjelasan tentang pedoman transisi dan metode pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 - 2026.



## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

### **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

#### **2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

##### **2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

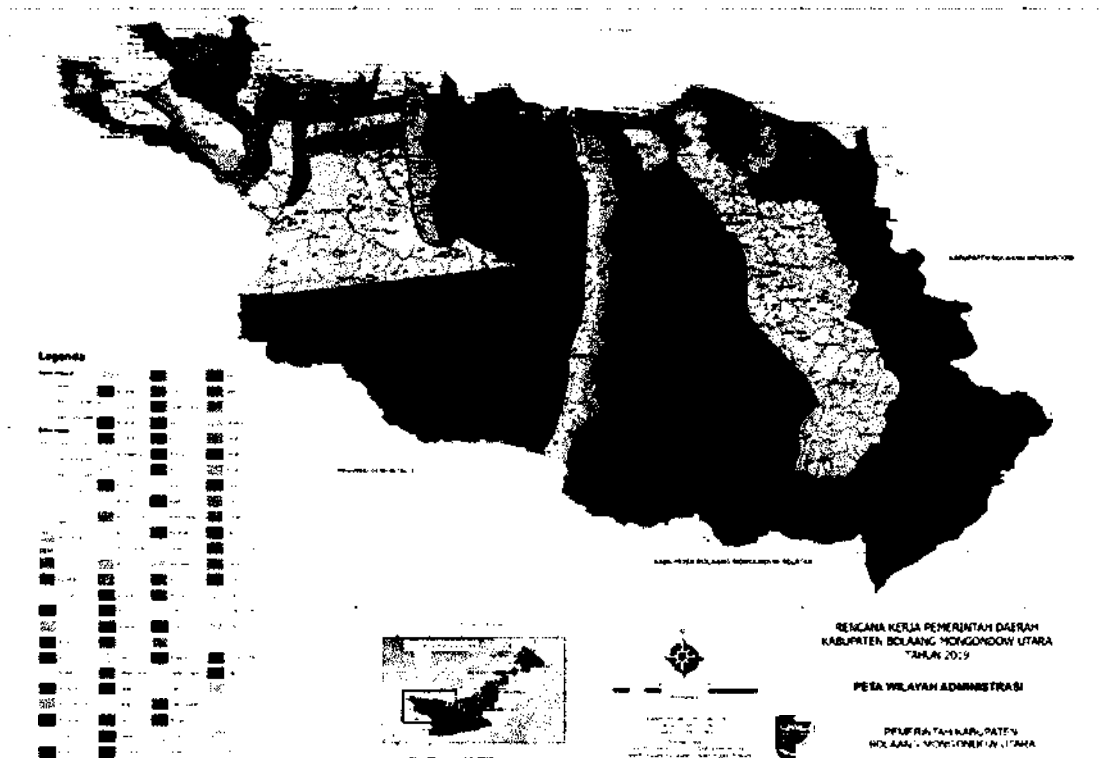
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun ini akan memasuki usia ke-16 setelah pemekaran melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di ujung bagian barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Sulawesi Utara dengan luas wilayah 1.672,61 km<sup>2</sup>. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilalui oleh jalan Trans Sulawesi di pesisir pantai Utara Kabupaten Bolaang Mongondow dimana jalan ini berfungsi sebagai jalur lalu lintas yang dapat menghubungkan daerah Minahasa, Manado dan Bitung, serta disebelah barat ke Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak bersinggungan langsung dengan Kota Manado dan harus menempuh jarak kurang lebih 275,6 km atau  $\pm$  6 jam melalui jalan trans Sulawesi untuk mencapainya. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 6 (enam) kecamatan, setiap kecamatan memiliki kondisi yang tidak berbeda jauh sehingga menyebabkan karakteristik kegiatan ekonomi juga hampir serupa. Untuk Peta wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disajikan pada Gambar 2.1,



**Gambar 2.1.**

**Peta Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**



Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu daerah otonomi hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memiliki batas-batas daerah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Sebelah Selatan bebatasan dengan Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.



**Tabel 2.1.**

**Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	LUAS (Km <sup>2</sup> )
1	2	3
Kecamatan Sangkub	16	418,40
Kecamatan Bintauna	15/1	348,94
Kecamatan Bolangitang Timur	20	422,96
Kecamatan Bolangitang Barat	18	312,56
Kecamatan Kaidipang	15	95,79
Kecamatan Pinogaluman	22	73,96
J u m l a h	106/1	1.672,61

*Sumber: Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2023*

**2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis**

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara geografis berada pada 0°-30' 1°-0' Lintang Utara dan 123°-124° Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau atau garis khatulistiwa yang teletak pada lintang 0. Sebagai daerah yang terletak di garis khatulistiwa, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Intensitas curah hujan adalah jumlah curah hujan dalam suatu satuan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam mm/jam, mm/hari, mm/tahun, dan sebagainya. Biasanya data yang sering digunakan untuk analisis adalah nilai maksimum, minimum dan nilai rata-ratanya. Secara umum curah hujan dan hari hujan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan mengalami naik turun dalam tiap tahun. Curah Hujan dan Hari Hujan tinggi terjadi pada bulan Januari-Februari dan November-Desember tiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bulan-bulan tersebut merupakan musim penghujan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih banyak dipengaruhi oleh



iklim tropis dengan suhu sekitar 20° C-32 Jumlah curah hujan per bulan disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2.**  
**Rata-Rata Curah Hujan dan Hari Hujan per Bulan**

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari H
(1)	(2)	(3)
Januari	1.074,00	31
Februari	685,00	24
Maret	289,00	18
April	193,00	10
Mei	151,00	20
Juni	377,00	24
Juli	205,00	21
Agustus	233,00	15
September	195,00	14
Oktober	219,60	19
November	544,30	27

*Sumber: Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2023*

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan abrasi pantai dan gelombang pasang, kawasan rawan abrasi tebing sungai, kawasan rawan banjir. Kawasan rawan tanah longsor tersebar di Sampiro Kecamatan Sangkub; Bohabak IV di Kecamatan Bolangitang Timur; Inomunga dan Inomunga Utara Kecamatan Kaidipang; Komus I di Kecamatan Pinogaluman; dan Iyok, Tote, Paku, Goyo Kecamatan Bolangitang Barat.

Sedangkan untuk kawasan rawan abrasi terdapat di Sangtombolang, Busisingo dan Sampiro di Kecamatan Sangkub; Minanga, Voa’a, Talaga, Bintauna Pantai dan Kuhanga di Kecamatan Bintauna; Biontong I, Binjeita II, Bohabak II di Kecamatan Bolangitang Timur; Wakat, Tote, Iyok, Bolangitang, Bolangitang I, dan Bolangitang II di Kecamatan Bolangitang Barat; Kuala Utara, Solo dan Inomunga Utara di Kecamatan Kaidipang; dan Buko, Dengi, Dalapuli timur, Dalapuli Barat, Dalapuli, Tuntung dan Tanjung Sidupa di Kecamatan Pinogaluman.



Kawasan rawan banjir terdapat di Pangkusa dan Busisingo Utara di Kecamatan Sangkub; Bunia, Kuhanga dan Kopi di Kecamatan Bintauna; Binuanga, Binjeita, Binjeita Dua, Nunuka, Bohabak IV dan Biontong di Kecamatan Bolangitang Timur; Sonuo, Ollot, Ollot Satu, Ollot Dua, Paku, Jambusarang, Bolangitang, Bolangitang I dan Wakat di Kecamatan Bolangitang Barat; Pontak dan Bigo Selatan di Kecamatan Kaidipang; dan Dalapuli, Batu bantayo, Kayuogu dan Busato Kecamatan Pinogaluman. Kawasan rawan tanah longsor tersebar di Sampiro Kecamatan Sangkub; Bohabak IV Kecamatan Bolangitang Timur; Inomunga, Inomunga Utara Kecamatan Kaidipang dan Komus I di Kecamatan Pinogaluman; dan Iyok, Tote, Paku, Goyo Kecamatan Bolangitang Barat.

#### **2.1.1.3 Topografi**

Adapun kondisi topografi tanah di Bolaang Mongondow Utara datar sampai berombak (25,03 persen), berombak sampai berbukit (40,22 persen) dengan keadaan tanah yang tergolong subur. Secara umum kondisi topografi tanah di Kecamatan Sangkub rata dan yang berbukit di desa Sidodadi hingga 170 mdpl dan desa Pangkusa hingga 50 mdpl. Di Kecamatan Bintauna pada umumnya rata dan yang berbukit hanya di Desa Mome dan Huntuk sampai dengan 8 mdpl. Di Kecamatan Bolangitang Timur juga sebagian besar dataran kecuali Desa Mokodidek berbukit  $\pm 60$  mdpl dan Desa Biontong  $\pm 18$  mdpl. Wilayah berbukit juga terdapat di Desa Solo dan Komus Dua Kecamatan Kaidipang dengan ketinggian  $\pm 15$  mdpl, dan Desa Komus Satu dan Batu Tajam Kecamatan Pinogaluman  $\pm 25$  mdpl. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh lima faktor yaitu: iklim, bahan induk, topografi, organisme, dan waktu. Di antara lima faktor tersebut, bahan induk dan topografi tampaknya berpengaruh lebih dominan, sehingga dijumpai sifat-sifat tanah yang bervariasi.





#### **2.1.1.4 Hidrologi**

Secara hidrologis, wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Utara termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Sangkub Langi. Luas SWP DAS Sangkub Langi adalah 287.019 Ha, yang terbagi dalam 8 SWP Sub DAS, yaitu:

1. SWP Sub DAS Ayong SWP Sub DAS Ayong memiliki luas 32.902 Ha yaitu sekitar 11.46 % dari luas total DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Ayong memiliki 8 sungai yang secara individual mengalir ke Laut Sulawesi. Di antaranya adalah sungai-sungai Ayong, Modapaan, Pangi, Sauk, Bayabuta dan Baturapa. Sungai Ayong dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya.
2. SWP Sub DAS Biontong SWP Sub DAS Biontong memiliki luas 21.333 Ha yaitu sekitar 7.43 % dari luas total DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Biontong memiliki 6 sungai yang secara II - 9 individual mengalir ke Laut Sulawesi. Diantaranya adalah sungai-sungai Bohabak, Biontong, Mome, dan Nono. Sungai Biontong dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya.
3. SWP Sub DAS Biyou SWP Sub DAS Biyou memiliki luas 42.906 Ha yaitu sebesar 14.95% dari total luas DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Biyou memiliki outlet pada sungai Sangkub. Sungai Biyou merupakan cabang sungai dari sungai Sangkub.
4. SWP Sub DAS Bolangitang SWP Sub DAS Bolangitang memiliki luas 53.691 Ha yaitu sebesar 18.71% dari total luas DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Bolangitang memiliki 16 sungai yang secara individual mengalir ke Laut Sulawesi. Diantaranya adalah sungai Keakar, sungai Nunuka, sungai Saleo, dan Sungai Bolangitang. Sungai Bolangitang dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya.



5. SWP Sub DAS Gambuta SWP Sub DAS Gambuta memiliki luas 35.061 Ha yaitu sebesar 12.22% dari total luas DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Gambuta memiliki outlet pada sungai Sangkub. Sungai Gambuta merupakan cabang sungai dari sungai Sangkub. a) SWP Sub DAS Lolak SWP Sub DAS Lolak memiliki luas 20.582 Ha yaitu sebesar 7.17% dari total luas DAS Sangkub Langi. Terdapat 3 sungai pada SWP Sub DAS Lolak yang mengalir menuju Laut Sulawesi yaitu sungai Dulangon, sungai Motobang, dan sungai Lolak. Sungai Lolak dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya.
6. SWP Sub DAS Maelang SWP Sub DAS Maelang memiliki luas 15.715 Ha yaitu sebesar 5.48% dari total luas DAS Sangkub Langi. Terdapat 22 sungai pada SWP Sub DAS Maelang yang mengalir menuju Laut Sulawesi diantaranya sungai Panggi, sungai Domisil, sungai Moilobai, sungai Posyanga, sungai Bolangat, dan sungai Maelang. Sungai Maelang dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya.
7. SWP Sub DAS Sangkub SWP Sub DAS Sangkub memiliki luas 64.830 Ha yaitu sebesar 22.59% dari total luas DAS Sangkub Langi. Hanya terdapat satu sungai pada SWP Sub DAS Sangkub yang mengalir menuju Laut Sulawesi yaitu sungai Sangkub.

#### **2.1.1.5 Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibedakan ke dalam penggunaan pertanian dan non-pertanian. Penggunaan pertanian terdiri dari:

- (a) sawah (irigasi dan tadah hujan)
- (b) tegalan/belukar
- (c) kelapa
- (d) kelapa belukar

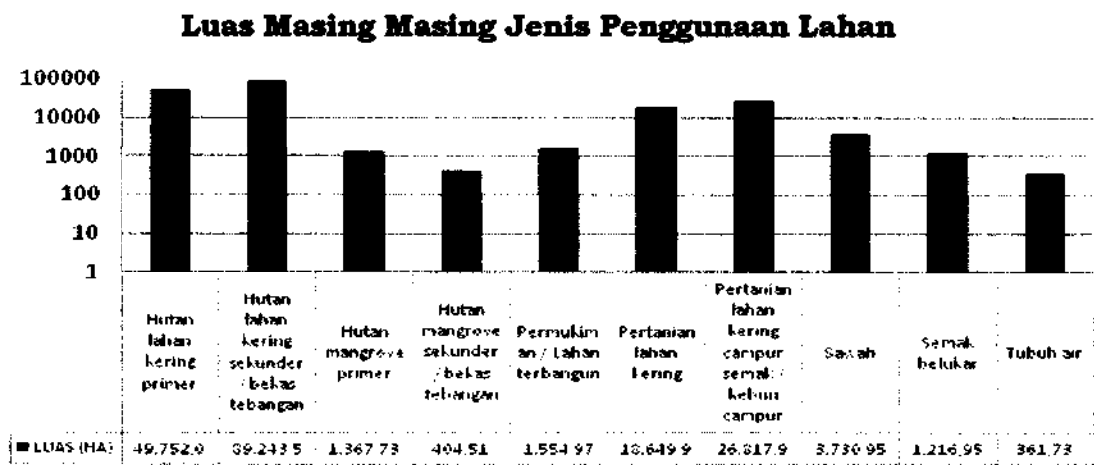


- (e) belukar hutan
- (f) kebun campuran

Sedangkan untuk penggunaan non-pertanian terdiri atas:

- (a) bakau
- (b) hutan belukar
- (c) hutan
- (d) pemukiman
- (e) badan air

Gambar 2.2.



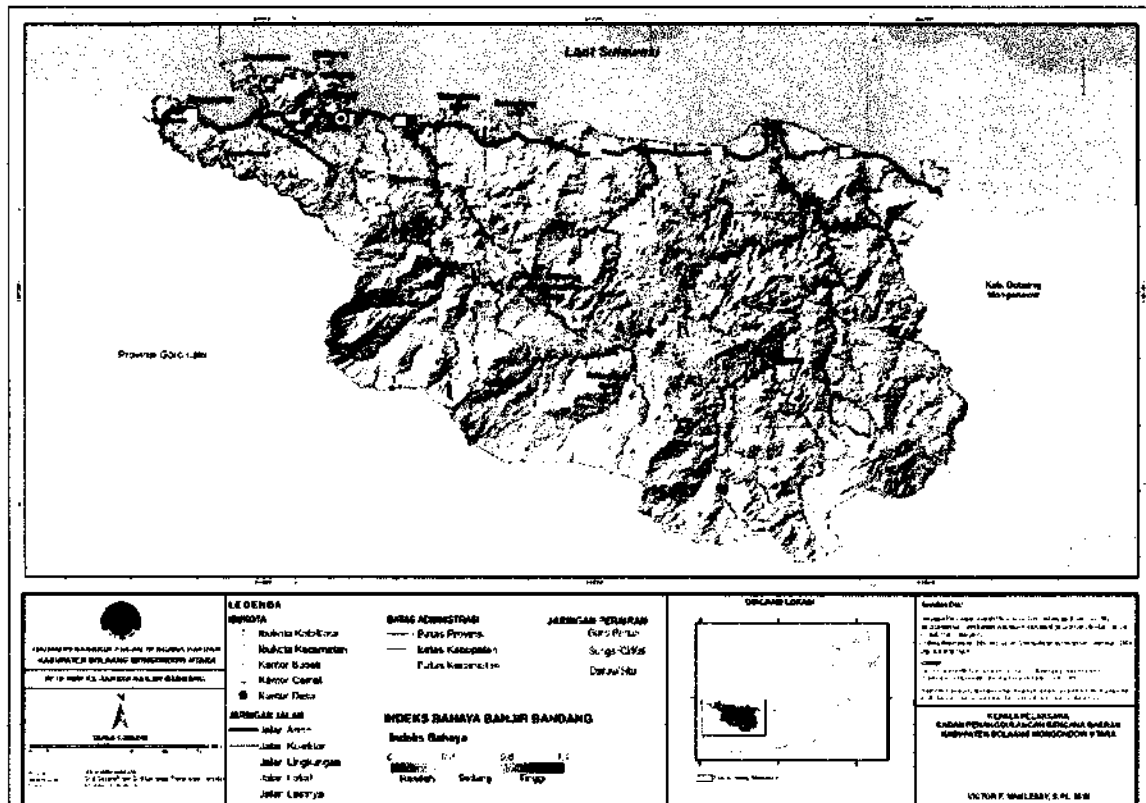
Sumber: RTRW Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2033, 2022

2.1.1.6 Wilayah Rawan Bencana

Sebagai implikasi topografi dan geografi, menyebabkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki beberapa ancaman bencana dengan tingkat ancaman bencana yang bervariasi. Jenis bencana yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi: ancaman tanah longsor, ancaman banjir dan banjir bandang, ancaman tsunami, ancaman angin puting beliung, ancaman cuaca ekstrim (angin kencang, abrasi, perubahan iklim), ancaman kekeringan, ancaman gempa bumi, ancaman epidemi/wabah penyakit, ancaman kebakaran pemukiman, hutan, dan lahan.



## Utara



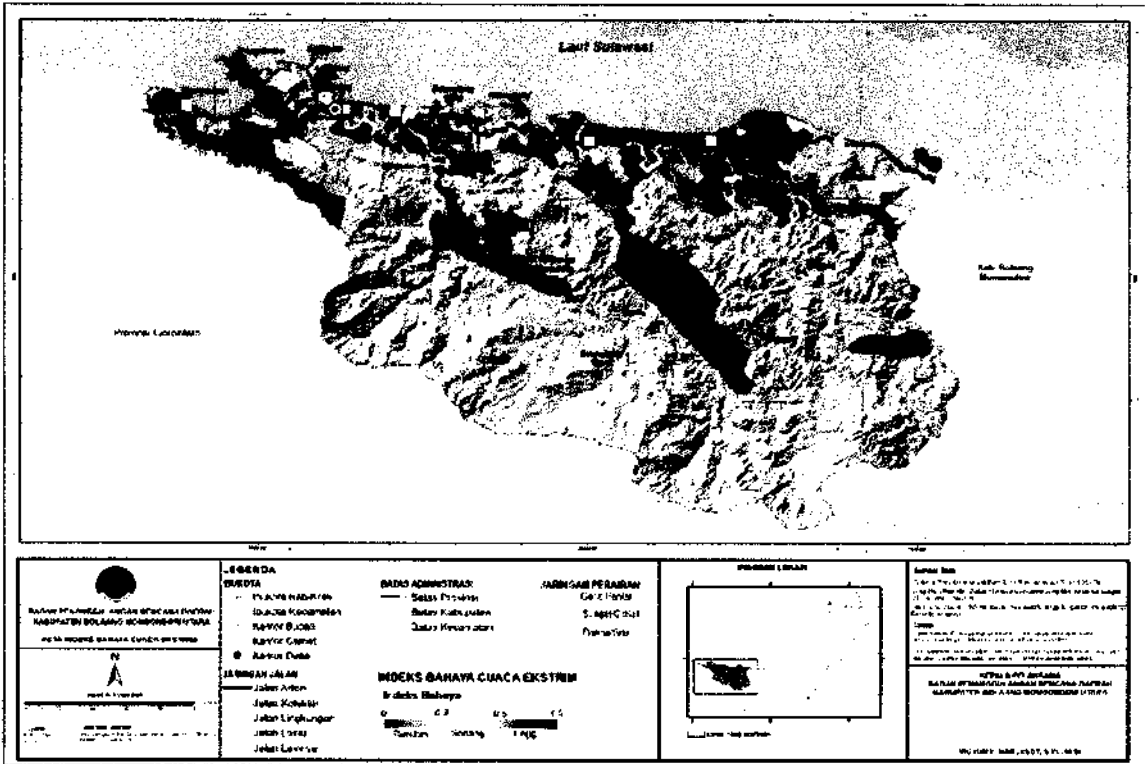
**Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2022**

Cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, antara lain : fenomena cuaca panas, hujan lebat dan angin kencang. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor terutama di wilayah perbukitan yang mempunyai potensi hujan lebat. Hujan disertai angin juga dapat disertai dengan kilat/petir bisa menyebabkan pohon tumbang/roboh selain itu dapat meningkatkan tinggi gelombang air laut.



Gambar 2.3

Peta Indek Bahaya Cuaca Ekstrim Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



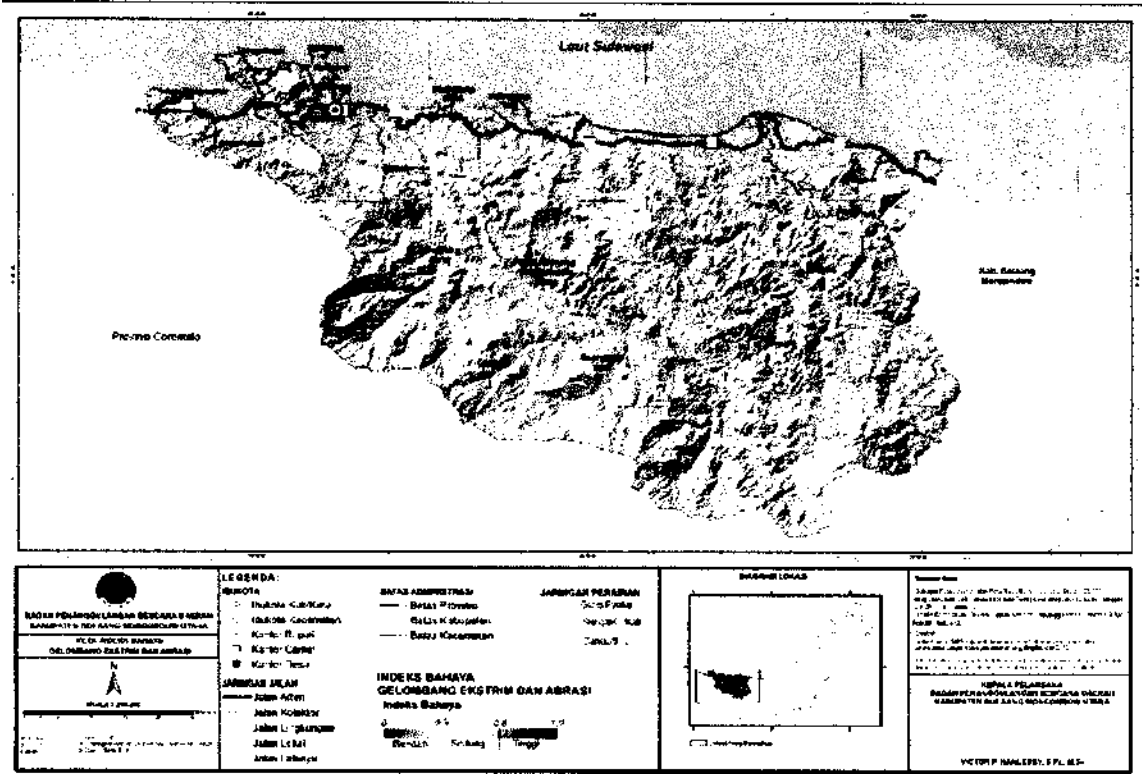
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2022



Gambar 2.4

Peta Indeks Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

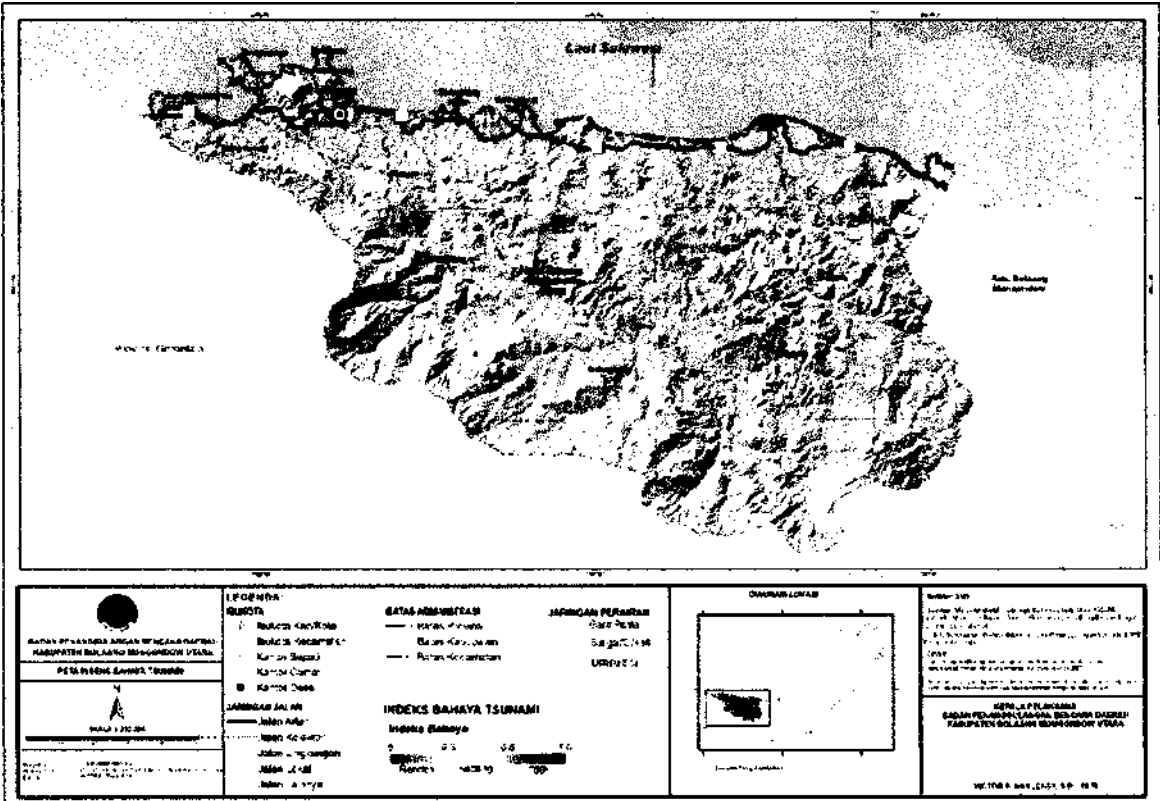


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2022



Gambar 2.5

Peta Indek Bahaya Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2022

Tsunami adalah ancaman dengan probabilitas relatif rendah tetapi berdampak sangat tinggi terhadap penghidupan dan kehidupan masyarakat.

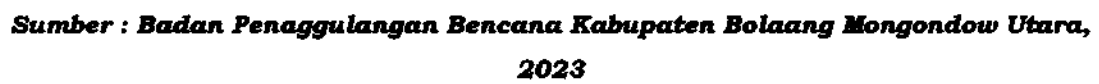
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah daerah rawan bencana. Longsor adalah bencana yang intensitasnya paling tinggi sampai sedang. Ancaman longsor terutama ada di kawasan Perbukitan. Untuk meminimalkan risiko bencana longsor Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan upaya mitigasi struktural dan mitigasi





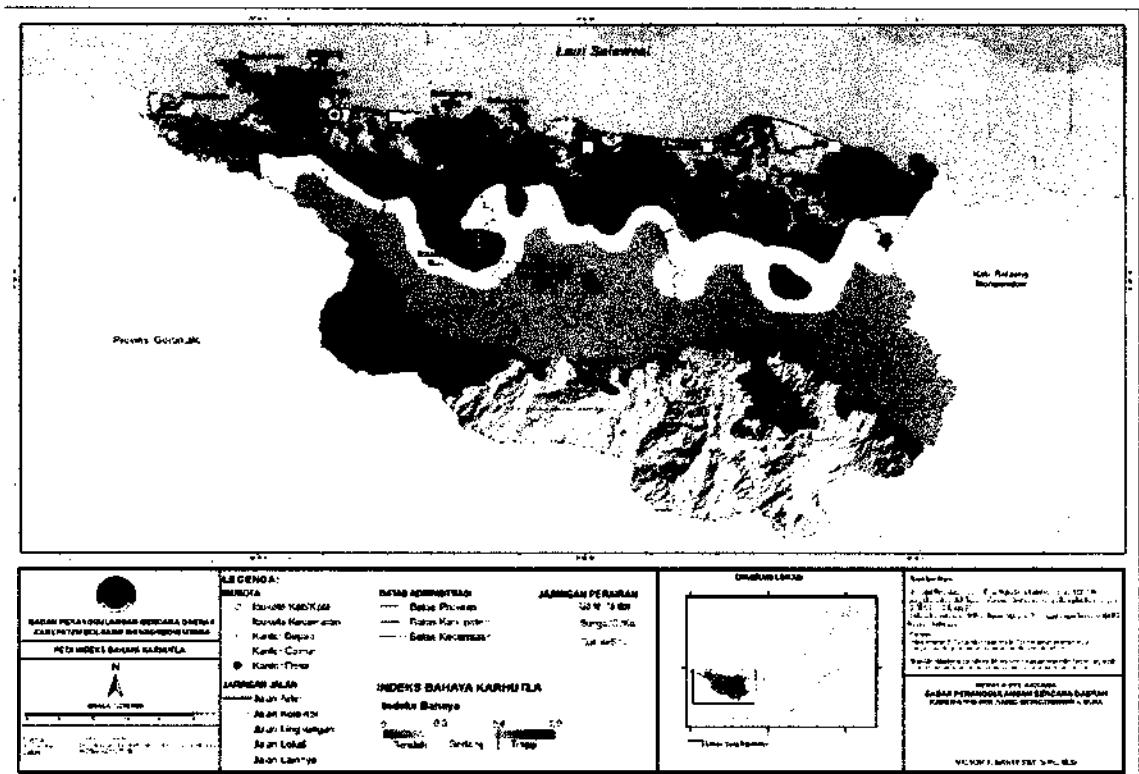


**Peta Indeks Bahaya Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**



Gambar 2.8

Peta Indeks Bahaya Gempa Karhutla Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



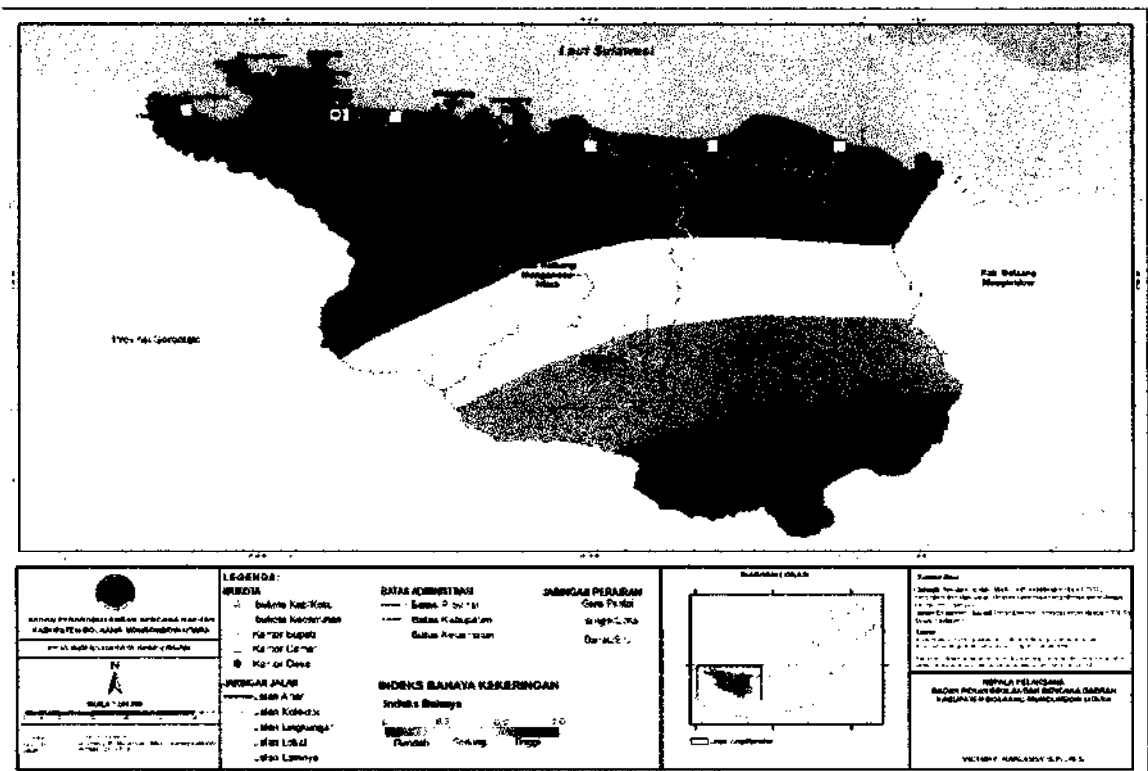
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2022

Selain ancaman longsor, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di musim kemarau juga memiliki ancaman kekeringan. Jumlah kejadian kekeringan dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena sudah ada beberapa tindakan pengurangan risiko bencana yang cukup komprehensif dari berbagai pihak. Mulai dari upaya (edukasi) pelestarian sumber mata air yang digagas masyarakat, PAMSIMAS, PAM Desa, PAM Mandiri Masyarakat; penambahan jaringan air bersih oleh PDAM.



Gambar 2.9

Peta Indeks Bahaya Kekeringan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

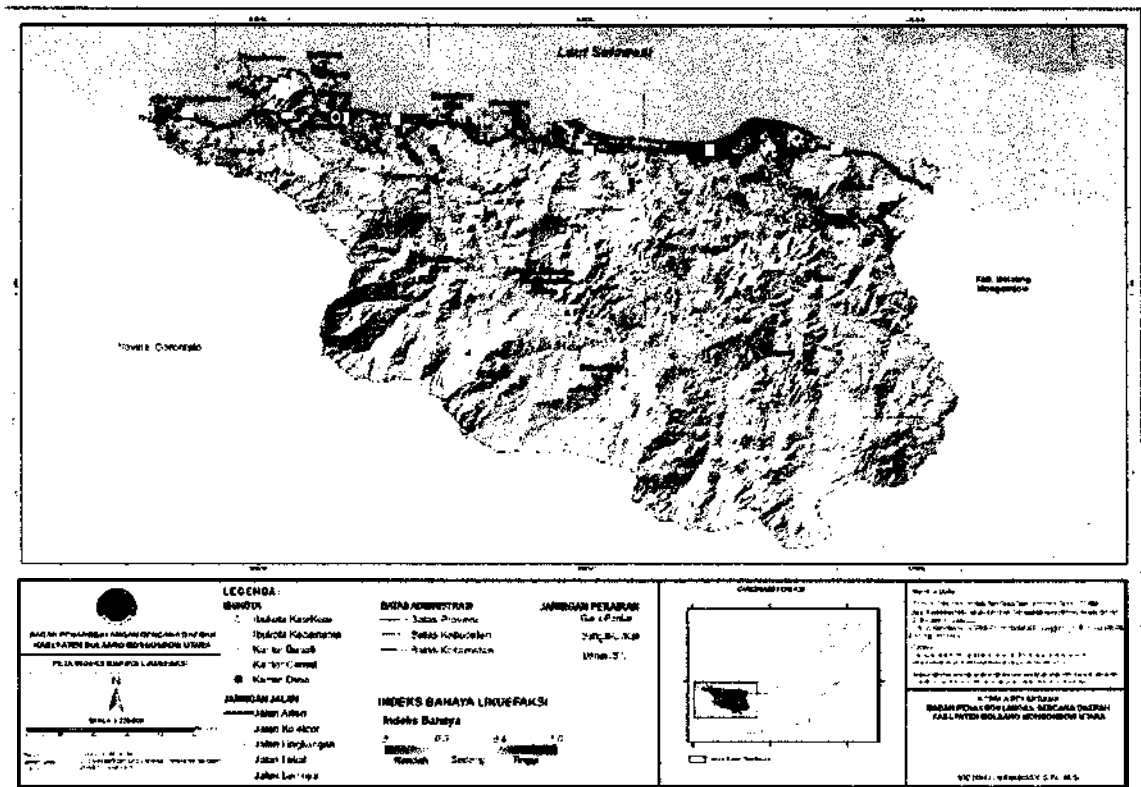


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2022



Gambar 2.10

Peta Indeks Bahaya Likuifaksi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Sumber: *Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2022*

Selain ancaman bencana ada kawasan ancaman bencana yang bisa terjadi tanpa mengenal kawasan seperti kebakaran pemukiman, hutan dan lahan, gempa bumi, wabah penyakit dan cuaca ekstrim. Dengan kondisi topografi dan geografi, hampir dipastikan tidak ada daerah yang benar-benar aman dari ancaman bencana, sehingga kejadian bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hampir selalu terjadi pada tiap tahun. Hal itu disebabkan banyaknya penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tinggal di daerah rawan bencana. Ada kawasan yang memiliki satu ancaman bencana, namun lebih banyak daerah yang memiliki multi ancaman bencana. Untuk informasi lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut :



Bencana yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2018 sampai pada tahun 2022 lebih banyak didominasi oleh bencana hidrometeorologi dari pada bencana geologi. Bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor disusul cuaca ekstrim/angin kencang; banjir; gelombang ekstrim; kebakaran hutan dan lahan; kekeringan. Sedangkan kelompok bencana geologi adalah gempa bumi terjadi dengan probabilitas yang rendah. Untuk informasi kejadian bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2.3.**  
**Matriks Bencana Yang Pernah Terjadi Di**  
**Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

--



MATRES STICAJA YUNG MENDANTIRKAN  
 DI KABUPATEN SOLOANG SINDONG CONW LUBA

[illegible]

### **2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

1. Rencana Kawasan Hutan Produksi, terdiri atas kawasan hutan
2. Produksi tetap, kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur dan Pinogaluman dengan luasan kurang lebih 3.846 Ha. Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman dengan luasan 58.091,38 Ha. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di kecamatan Sangkub dan Bintauna dengan luasan kurang lebih 15.988 Ha.
3. Rencana Kawasan Hutan Rakyat, direncanakan pada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dapat berfungsi ganda, seperti sebagai penghasil buah, penghasil kayu dan lain-lain yang sekaligus juga berfungsi ekologis. Kawasan ini terdapat di Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur dan Pinogaluman, Bolangitang Barat dan Kaidipang kurang lebih 36.844 Ha.
4. Rencana Kawasan Pertanian, terdiri atas kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman, dengan komoditi, yakni :
  - a) Padi sawah seluas kurang lebih 8.240 Ha;
  - b) Sagu seluas kurang lebih 45 Ha;
  - c) Jagung seluas kurang lebih 3.229 Ha;



- d) Ubi kayu seluas kurang lebih 289 Ha; dan
- e) Ubi jalar seluas kurang lebih 224 Ha.

Kawasan pertanian hortikultura terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman, memanfaatkan sebagian lahan sawah yang ada dengan komoditi, yakni:

- a) Kacang panjang seluas kurang lebih 86 Ha;
- b) Cabe seluas kurang lebih 329 Ha;
- c) Tomat seluas kurang lebih 49 Ha;
- d) Terong seluas kurang lebih 69 Ha;
- e) Kedele seluas kurang lebih 184 Ha;
- f) Kacang tanah seluas kurang lebih 592 Ha;
- g) Kacang hijau seluas kurang lebih 516 Ha;
- h) Buncis seluas kurang lebih 11 Ha;
- i) Ketimun seluas kurang lebih 85 Ha; dan
- j) Mangga, duku/langsat, durian, pisang dan matoa.

Kawasan pertanian perkebunan terdapat di Kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman, dengan komoditi yakni:

- a) kelapa seluas kurang lebih 17.065 Ha;
- b) cengkeh seluas kurang lebih 278 Ha;
- c) pala seluas kurang lebih 131 Ha;
- d) kopi seluas kurang lebih 123 Ha;
- e) kakao seluas kurang lebih 4735 Ha;
- f) aren seluas kurang lebih 172 Ha; dan
- g) kelapa sawit seluas kurang lebih 17.500 Ha,

Kawasan peternakan terdapat di hampir semua kecamatan yang terdiri atas:

- a) ternak besar, meliputi sapi dan kuda;
- b) ternak kecil, meliputi babi dan kambing; dan





- c) ternak unggas meliputi ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras dan itik.

Untuk Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian, berupa Kawasan Agropolitan di Kecamatan Sangkub dan Pinogaluman.

5. Rencana Kawasan Perikanan, terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan ikan, Kawasan pangkalan pendaratan ikan dan Kawasan cadangan dan konservasi perairan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di enam Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri dari: (1) budidaya perikanan air laut maupun air payau terdapat di kecamatan Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Timur dan Bolangitang Barat dengan budidaya diantaranya keramba jaring apung, rumput laut dan teripang; dan (2) budidaya perikanan air tawar terdapat di enam kecamatan. Kawasan peruntukan pengolahan ikan terdapat di Desa Kuhanga kecamatan Bintauna dengan bentuk pengolahan utama yaitu ikan asap dan di Desa Tanjung Sidupa, Tombulang dan Buko Kecamatan Pinogaluman, dengan bentuk pengolahan utama yakni ikan asin. Kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) terdapat di Boroko kecamatan Kaidipang, Kecamatan Pinagoluman dan Kecamatan Sangkub sebagai prasarana kawasan peruntukan perikanan. Kawasan cadangan dan konservasi perairan diarahkan di sebagian kawasan perairan di Kecamatan Pinagoluman dan Kecamatan Sangkub. Kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budidaya di kecamatan Sangkub dan Pinogaluman ditetapkan sebagai kawasan minapolitan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
6. Rencana Kawasan Pertambangan, terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, non logam dan batuan dan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam terdiri atas:



- a) kawasan pertambangan emas tersebar di wilayah pertambangan emas dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman;
- b) tembaga dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Tuntung Kecamatan Pinogaluman;
- c) mangan dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Tanjung Buaya Desa wakat Kecamatan Bolangitang barat;
- d) biji besi dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Wakat, Tote, Mokoditek dan Iyok kecamatan Bolangitang Timur dan kecamatan Bolangitang Barat; dan
- e) pasir besi dengan kriteria eksplorasi terukur terdapat di Desa Bintauna kecamatan Bintauna dan di Desa Busisingo kecamatan Sangkub.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan terdiri atas:

- a) Lanau (tanah liat) dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di enam kecamatan;
- b) graywacke (pemadatan pasir yang halus) dengan kriteria eksplorasi terindikasi dan terukur terdapat di enam Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- c) pasir kwarsa dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang;
- d) andesit (batu pasang) dengan kriteria eksplorasi terkira terdapat di Desa Inomunga Utara kecamatan Kaidipang, Desa Wakat Kecamatan Bolangitang Barat, Desa Komus I Kecamatan Pinogaluman, dan Desa Pontak kecamatan Kaidipang;
- e) sirtu dengan kriteria eksplorasi terkira terdapat di Desa Inomunga, Desa Pontak Kecamatan Kaidipang, Desa Paku kecamatan Bolangitang Barat, Desa Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur,



Desa Busato kecamatan pinogaluman dan Desa Huntuk kecamatan Bintauna, Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub; dan

- f) batu granit dengan kriteria eksplorasi terukur terdapat di Desa Inomunga kecamatan Kaidipang dan di Desa Ollot Kecamatan Bolangitang Barat.
  - g) Kawasan pertambangan yang sudah ditiadakan dan/atau kawasan bebas tambang oleh kontrak karya/kuasa pertambangan dapat dijadikan lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
  - h) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Tote Kecamatan Bolangitang Barat.
7. Rencana Kawasan Industri, untuk Kawasan peruntukan industri sedang yaitu rencana industri pembuatan balok es dan cool storage di kecamatan Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Sangkub dan Bintauna. Kawasan peruntukan industri rumah tangga diantaranya meliputi:
- a) Industri kecil Nata de Coco di Kecamatan Pinogaluman, Kaidipang dan Bolangitang Timur;
  - b) Industri pengolahan biji kopi di Kecamatan Bolangitang Barat;
  - c) Industri pembuatan kerupuk dan bakso ikan di Kecamatan Pinogaluman;
  - d) Industri pembuatan ikan teri di Kecamatan Pinogaluman;
  - e) Industri anyaman rotan di Kecamatan Bintauna;
  - f) Industri pembuatan kursi bambu dan kerajinan di Kecamatan Pinogaluman
  - g) Industri pembuatan batu bata dan batako Kecamatan Bintauna, Pinogaluman, Kaidipang dan Bolangitang Barat, Bolangitang Timur;
  - h) Industri pembuatan gula merah/gula aren di Kecamatan Bintauna dan Pinogaluman, Kecamatan Kaidipang;



- i) Industri pengolahan rumput laut dan teripang di Kecamatan Pinogaluman, Kecamatan Bolangitang Barat dan Kecamatan Bolangitang Timur; dan
- 8. Rencana Kawasan Pariwisata, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan wisata dan rekreasi. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, kawasan pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara direncanakan terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata alam, kawasan peruntukan pariwisata buatan dengan sebaran objek wisata. Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi:
  - a) Situs budaya Rumah Raja Komalig yang berada di Kaidipang;
  - b) Makam raja-raja Bintauna (Jere) yang berada di Desa Pangkusa, Kecamatan Sangkub;
  - c) Makam Raja-Raja Kaidipang (Jere) yang berada di Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang; dan
  - d) Makam Raja Bolangitang yang terdapat di Kecamatan Bolangitang Barat.

Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:

- a) Taman Nasional Dumoga Nani Warta Bone, di sebagian Kecamatan Sangkub dan Bintauna;
- b) Pantai Batu Pinagut yang berada di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang;
- c) Pulau Bongkil yang berada di Kecamatan Pinogaluman;
- d) Pantai Air Belanda yang berada di Kecamatan Kaidipang;
- e) Pantai Bintauna yang berada di Desa Talaga, Kecamatan Bintauna;
- f) Pantai Kuhanga yang berada di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna;
- g) Pantai Busisingo yang berada di Desa Busisingo, Kecamatan Sangkub;
- h) Pantai Tanjung Dulang yang berada di Desa Inomunga Utara,



Kecamatan Kaidipang;

- i) Pulau Damar di Boroko kecamatan kaidipang;
  - j) Pulau Keramat di Kecamatan Pinogaluman;
  - k) Pantai Tanjung Haji dan Batu Buaya yang berada di Kecamatan Bolangitang Barat;
  - l) Pantai Batu Meja yang berada di Desa Sampiro, Kecamatan Sangkub;
  - m) Air Terjun Pinosaula yang berada di Desa Huntuk, Kecamatan Bintauna; dan
  - n) Air Terjun Pontak Kecamatan Kaidipang. Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi:
    - o) Bendung Sangkub yang berada di Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub;
    - p) Bendung Pontak yang berada di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang;
    - q) Bendung Busato yang berada di Desa Busato, Kecamatan Pinogaluman; dan
    - r) Bendung Paku yang berada di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat.
9. Rencana Kawasan Permukiman terdiri dari kawasan perumahan yang dibangun oleh penduduk sendiri di bangun oleh perusahaan pembangunan perumahan dan dibangun oleh pemerintah. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan, kawasan peruntukan permukiman perdesaan dan kawasan peruntukan untuk permukiman baru. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi:
- a) klaster Bolangitang – Boroko - Pinogaluman;
  - b) kawasan ibukota kecamatan;
  - c) rencana pengembangan diarahkan di kecamatan Pinogaluman, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Sangkub dan Bintauna dengan luasan pengembangan kurang lebih 2.710 Ha.



Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dan permukiman baru meliputi:

- a) kawasan Transmigrasi UPT Ollot 1 dan Ollot 2;
  - b) kawasan minapolitan dan Agropolitan Kecamatan Sangkub dan Pinogaluman;
  - c) pemukiman yang terbentuk dari kawasan perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
10. Pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Perda RTRW, dan setelah ada kajian komprehensif dan mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas: kawasan peruntukan pendidikan, kawasan peruntukan ibadah, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan kesehatan, kawasan peruntukan pemerintahan, kawasan peruntukan Taman Pemakaman Umum (TPU), Kawasan peruntukan Taman Makam Pahlawan (TMP), kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi, kawasan Pemerintahan, kawasan rencana jalan lingkaran dalam dan lingkaran luar, kawasan resting area dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- Kawasan peruntukan pendidikan yang dimaksud yaitu rencana pembangunan fasilitas pendidikan tinggi yang terletak di Kecamatan Kaidipang dan fasilitas pendidikan tinggi lainnya tersebar di wilayah lain sesuai kebutuhan. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri atas:
- a) Kawasan perdagangan skala besar diarahkan di sepanjang koridor jalan Kaidipang;
  - b) Kawasan perdagangan skala kecil hingga menengah di sepanjang Koridor Jambusarang, Bolangitang, Kuala dan Boroko;



- c) Pasar tradisional (manajemen modern) diarahkan dengan mempertahankan pasar di Bolangitang dengan sistem operasional yang bersifat temporer (2 hari dalam 1 minggu);
- d) Rencana pengembangan pasar baru terkait dengan rencana terminal tipe A di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang.

Kawasan peruntukan kesehatan terdiri atas peruntukan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Bolangitang Barat di Desa Talaga Tomoagu. Kawasan peruntukan pemerintahan terdiri atas: kawasan Pusat Pemerintahan, pemerintahan pendukung dan pemerintahan Desa/kelurahan dan kecamatan:

- a) Kawasan peruntukan pusat Pemerintahan diarahkan pada Kecamatan Kaidipang, Desa Boroko;
- b) Kawasan peruntukan Pemerintahan Desa/kelurahan dan kecamatan diarahkan pada masing- masing Desa/kelurahan dan kecamatan.

Kawasan peruntukan TPU terdiri atas TPU skala besar yang diupayakan terpusat pada satu atau dua lokasi dengan perkiraan kebutuhan luasan lahan sesuai standar dan perhitungan per penduduk yaitu 11,447 m<sup>2</sup>/unit lahan pemakaman dan TPU skala kecil yang dapat tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dengan ketentuan satu (1) TPU untuk satu (1) atau dua (2) Desa/kelurahan. Kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) dibutuhkan lahan 4 Ha diarahkan di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang. Kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi ditujukan untuk memberikan kesegaran pada kota, dan netralisasi polusi udara sebagai paru- paru kota dan sarana hiburan serta rekreasi olahraga masyarakat, terdiri dari:

- a) kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi skala kabupaten diarahkan di lapangan kembar Boroko Kecamatan Kaidipang tepatnya di Boroko;
- b) kawasan peruntukan Olahraga dan Rekreasi lainnya skala Kecamatan diarahkan pada masing-masing kecamatan (Desa dan



kelurahan) yang memiliki potensi lapangan dan ruang terbuka;

- c) rencana hutan kota diarahkan di Kecamatan Kaidipang dan Bolangitang. Kawasan Pemerintahan meliputi pusat pemerintahan di Boroko, Kecamatan Kaidipang. Kawasan rencana jalan lingkaran dalam dan lingkaran luar di Kecamatan Kaidipang dan Bolangitang Barat. Kawasan resting area desa Kuala Utara. Kecamatan Kaidipang dan Desa Sampiro Kecamatan Sangkub.

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi:

- a) Rencana pembangunan kawasan pangkalan (LANAL) TNI AL di Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur;
- b) Rencana Pembangunan Posal (Pos TNI AL) di desa Tuntung Kecamatan Pinogaluman dan Pulau Bongkil;
- c) Rencana lokasi kawasan latihan Militer Angkatan Darat diarahkan di Kecamatan Sangkub;
- d) Rencana lokasi markas Kodim di Boroko Kecamatan Kaidipang;
- e) Rencana lokasi Polres di Boroko Kecamatan Kaidipang;
- f) Markas Koramil (Komando Rayon Militer) berada di kecamatan-kecamatan di wilayah kabupaten; dan
- g) Polsek (Kepolisian Sektor) di setiap kecamatan di wilayah kabupaten.

### **2.1.3 Demografi**

#### **2.1.3.1 Komposisi dan Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2022 sebesar 84.543 jiwa, dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2020, penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 0,98 persen. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin Tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,76. Jumlah penduduk terbanyak terkonsentrasi di Kecamatan Bolangitang Barat dengan jumlah penduduk 16.222 Jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di kecamatan Sangkub dengan 11.086 Jiwa.





sebagaimana pada tabel 2.4. dibawah ini:

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2022 (%)
(1)	(2)	(3)
Kecamatan Sangkub	11.086	1,35
Kecamatan Bintauna	15.114	0,98
Kecamatan Bolangitang Timur	15.267	0,91
Kecamatan Bolangitang Barat	16.222	0,65
Kecamatan Kaidipang	15.005	1,13
Kecamatan Pinogaluman	11.849	0,99
J u m l a h	84.543	0,98

Sumber: Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2023

**2.1.3.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk**

Kepadatan Penduduk merupakan ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah, dimana distribusi dan kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Pinogaluman dengan angka 160,21 per kilometer persegi dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Sangkub dengan angka 26,50 per kilometer persegi. sebagaimana pada tabel 2.5. dibawah ini:



Tabel 2.5.

Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Presentasi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)
Kecamatan Sangkub	13,11	26,50
Kecamatan Bintauna	17,88	43,31
Kecamatan Bolangitang Timur	18,06	36,10
Kecamatan Bolangitang Barat	19,19	51,90
Kecamatan Kaidipang	17,75	156,64
Kecamatan Pinogaluman	14,02	160,21
J u m l a h	100	50,55

Sumber: Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2023

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu umumnya diukur melalui laju konstan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam waktu periode tertentu. PDRB pada tingkat regional provinsi menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan



oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Dengan kata lain PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah pada waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2020 sebagai dasar penilaian. Besaran PDRB menurut sektor usaha menggambarkan nilai produk barang dan jasa yang tercipta sebagai hasil dari kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah tertentu. PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi menurut lapangan usaha. Tercatat nilai PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 atas dasar harga berlaku (ADHB) berjumlah 2,9 Triliun Rupiah sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 sebesar 1,8 Triliun Rupiah.

Berdasarkan nilai dan kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas Dasar Harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 2.6. berikut.

**Tabel 2.6.**

**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas dasar harga belaku (ADHB) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Tahun 2020-2022**

Sektor	PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)					
	2020	%	2021	%	2022	%
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.176.262,40	45,69	1.218.337,40	44,66	1.335.036,09	44,77
Pertambangan dan Penggalian	299.503,80	11,63	320.688,10	11,76	346.419,34	11,62



Industri Pengolahan	81.798,50	3,18	89.694,30	3,29	99.017,96	3,32
Pengadaan Listrik dan Gas	1.131,00	0,04	1.185,80	0,04	1.292,01	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulangt	6.539,90	0,25	6.997,70	0,26	7.307,54	0,25
Konstruksi	368.347,00	14,31	401.314,70	14,71	441.167,01	14,79
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	291.053,80	11,31	317.372,10	11,63	354.242,93	11,88
Transportasi dan Pergudangan	33.703,60	1,31	34.945,10	1,28	39.405,19	1,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.830,30	0,27	7.199,50	0,26	7.776,65	0,26
Informasi dan Komunikasi	14.300,50	0,56	15.054,80	0,55	15.849,38	0,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	23.267,90	0,90	25.528,80	0,94	26.065,86	0,87
Real Estate	77.733,70	3,02	82.397,70	3,02	88.649,05	2,97
Jasa Perusahaan	330,60	0,01	353,80	0,01	380,76	0,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	84.168,40	3,27	88.460,20	3,24	93.416,19	3,13
Jasa Pendidikan	61.346,10	2,38	65.530,00	2,40	69.314,07	2,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27.375,60	1,06	31.188,80	1,14	33.505,91	1,12
Jasa Lainnya	20.495,80	0,80	21.620,60	0,79	23.371,09	0,78
<b>PDRB</b>	<b>2.574.188,90</b>	<b>100,00</b>	<b>2.727.869,40</b>	<b>100,00</b>	<b>2.982.220,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, 2023

Berdasarkan data struktur perekonomian tahun 2020 sampai tahun 2022 perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih tergantung kepada sektor pertanian, pertambangan dan perikanan. pada tahun 2020 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB atas dasar harga kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berlaku sebesar Rp. 1.176.262,40 atau memberikan kontribusi sebesar 45,69% pada



PDRB. hampir setengah dari total PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 kontribusi sektor pertanian mengalami kenaikan cukup baik yaitu sebesar Rp.1.335.036,09 atau sekitar 44.77%, secara nominal kenaikan tersebut tidaklah seberapa. Namun secara persentase apabila dibandingkan dengan sektor lainnya menjadi sektor yang paling berkontribusi terhadap perekonomian. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki potensi memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama 3 tahun terakhir atas dasar konstan, dimana angka PDRB pada tahun 2020 sebesar Rp.1.691.090.50 sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.1.846.111,03 Berdasarkan nilai dan kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 2.7. berikut ini.



**Tabel. 2.7.**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan**  
**(ADHK)**  
**Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Tahun 2020-2022**

Sektor	PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)					
	2020	%	2021	%	2022	%
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	748.004,44	44,23	753.273.60	43,05	802.972,40	43,49
Pertambangan dan Penggalian	198.697.20	11,75	212.230.60	12,13	217.337,59	11,78
Industri Pengolahan	57.566	3,40	61.209.90	3,50	64.776,62	3,50
Pengadaan Listrik dan Gas	977.40	0,06	1.018.20	0,06	1.086,25	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulangt	4.589.20	0,27	4.850.80	0,28	4.975,46	0,27
Konstruksi	261.323.80	15,45	275.184.40	15,73	291.043,40	15,77
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	196.242.60	11,60	207.517.90	11,86	221.651,78	12,02
Transportasi dan Pergudangan	18.496.60	1,09	18.713.80	1,07	19.786,65	1,07
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.559.40	0,27	4.763.40	0,27	4.984,45	0,27
Informasi dan Komunikasi	10.779.60	0,64	11.126.80	0,64	11.475,08	0,62
Jasa Keuangan dan Asuransi	17.253.10	1,02	18.101.40	1,03	17.342,72	0,94
Real Estate	55.134.40	3,26	57.091.70	3,26	59.672,22	3,24
Jasa Perusahaan	209.20	0,01	219.40	0,01	228,58	0,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	48.823.70	2,89	51.299.10	2,93	52.515,54	2,84
Jasa Pendidikan	35.538.80	2,10	37.308.70	2,13	38.677,88	2,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20.471.60	1,21	22.617.30	1,29	23.800,19	1,29
Jasa Lainnya	12.423.50	0,73	13.035.90	0,75	13.784,19	0,74
<b>PDRB</b>	<b>1.691.090.50</b>	<b>100,00</b>	<b>1.749.562.80</b>	<b>100,00</b>	<b>1.846.111,03</b>	<b>100</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2023*

Gambaran struktur di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor



tersier cukup signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan sebagian besar berasal dari sektor pemerintahan. Berdasarkan pentingnya angka kontribusi sektor primer dan tersier menopang pertumbuhan perekonomian daerah, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih sangat tergantung kepada sumber daya alam yang melimpah dan bantuan dana dari pemerintah.

#### **B. Pertumbuhan Ekonomi**

Nilai PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2020 sebesar 1,691 Triliun Rupiah terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 pada angka 1,846 Triliun Rupiah. Hal ini menggambarkan bahwa perekonomian Bolaang Mongondow Utara 3 tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2020 terhadap tahun 2019 hampir mengalami kontraksi pertumbuhan pada angka 0,71% yang merupakan dampak langsung dari pandemi Covid-19. Namun seiring berakhirnya pandemi ekonomi Bolaang Mongondow Utara kembali membaik hingga pada angka 5,52% pada tahun 2022. Berdasarkan analisis data BPS didapatkan bahwa lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah subsektor perdagangan besar dan eceran dimana subsektor ini mampu tumbuh 6,81% pada tahun 2022 dan menjadi subsektor yang paling tinggi pertumbuhannya pada tahun 2022. Disusul subsektor pengadaan listrik/gas yang mampu tumbuh sebesar 6,69% dan disusul subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan 6,60%.

Hal ini membuktikan terjadi kecenderungan perubahan struktur ekonomi dimana subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Bolaang Mongondow Utara mulai tergantikan dengan subsektor lainnya. Hal ini pula menunjukkan kepada kita bahwa pemerintah daerah mulai memperhatikan sektor-sektor unggulan lainnya selain sektor pertanian, kehutanan dan



perikanan. Berikut disajikan tabel pertumbuhan PDRB ADHK 3 tahun terakhir.

**Tabel 2.8.**  
**Laju Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan**  
**(ADHK)**  
**Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Tahun 2020-2022**

Sektor	PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2,55	0,70	6,60
Pertambangan dan Penggalian	1,91	6,82	2,39
Industri Pengolahan	0,84	6,33	5,83
Pengadaan Listrik dan Gas	4,24	4,17	6,69
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,95	5,70	2,57
Konstruksi	-3,97	5,30	5,76
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,20	5,75	6,81
Transportasi dan Pergudangan	-6,65	1,17	5,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,03	4,48	4,64
Informasi dan Komunikasi	12,13	3,22	3,13
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,60	4,92	-4,19
Real Estate	0,65	3,55	4,52
Jasa Perusahaan	0,72	4,88	4,18
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,67	5,07	2,37
Jasa Pendidikan	2,06	4,98	3,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,03	10,48	5,23
Jasa Lainnya	-4,890	4,93	5,74





Sektor	PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
<b>PDRB</b>	<b>0,71</b>	<b>3,46</b>	<b>5,52</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2023*

Dari tabel diatas terlihat bahwa beberapa subsektor pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan antara lain: Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Akomodasi dan Makan minum yang mengalami kontraksi cukup parah hal ini diakibatkan oleh kebijakan refocusing oleh pemerintah pada saat pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, disisi lain ekonomi Bolaang Mongondow Utara masih sangat bergantung kepada belanja pemerintah (Government Expenditures).

**C. Angka Kemiskinan**

Kemiskinan adalah keadaan seseorang dengan barang yang dibutuhkan lebih banyak atau lebih besar dari pada pendapatan yang diperoleh, dalam hal ini fokus utamanya terdapat pada rumah tangga ataupun individu yang memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka (World Bank Institute, 2005).

Kemiskinan tersebut dapat diukur dengan membandingkan pendapatan individu dengan konsumsi yang dibutuhkan. Besaran ini diukur berdasarkan tingkat kebutuhan makanan dan non makanan. Sedangkan kemiskinan dapat pula dilihat dengan standar garis kemiskinan (poverty line) makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang/jasa lainnya. Kemiskinan juga dapat dipandang dari sisi relatif dan absolut (Profil Analisis Kemiskinan, 2013).

Kemiskinan relatif adalah kondisi miskin karena pengaruh kebijakan



pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan, kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan untuk bisa bertahan hidup. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau kelompok masyarakat secara absolut atau relatif dalam suatu wilayah menjadi miskin yang disebabkan oleh kondisi natural ataupun struktural sehingga dapat menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat tersebut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan demi kelangsungan hidupnya.

Dalam mengukur kemiskinan sesuai dengan BPS digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara umum semakin kecil. Namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2022 selalu berada di atas Provinsi Sulawesi Utara yang artinya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Jika dilihat dari penyebabnya,



kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bervariasi, dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan skill (keterampilan) dan pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja.

Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2018-2022 mengalami kenaikan kesenjangan pada tahun 2021 namun mengalami penurunan Kembali pada Tahun 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2018-2022 mengalami tren kenaikan namun pada tahun 2021 mengalami lonjakan kenaikan menjadi 0,26 namun pada tahun 2022 turun lagi di angka 0,17. Hal ini tentu terkait dengan pandemi global serta adanya tekanan terhadap perekonomian masyarakat secara luas khususnya masyarakat miskin.

**Tabel 2.9.**

**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**

**Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2022**

Tahun		Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
		Jumlah (x1000 Jiwa)	Persentase (%)		
2018	238.645	6,84	8,64	1,15	0,24
2019	254.835	6,77	8,45	1,32	0,34
2020	264.227	6,82	8,41	0,83	0,14



2021	275.369	6,53	8,03	1,18	0,26
2022	283 627	6,01	7,31	0,90	0,17

Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2023

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

#### A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia dirumuskan pada tahun 1990 oleh UNDP (United Nations Development Programme). Menurut UNDP, pembangunan manusia merupakan perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging the choices of people), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut.

Indeks pembangunan manusia pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang menginginkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Konsep pembangunan manusia harus dibangun dari hal-hal sebagai berikut:

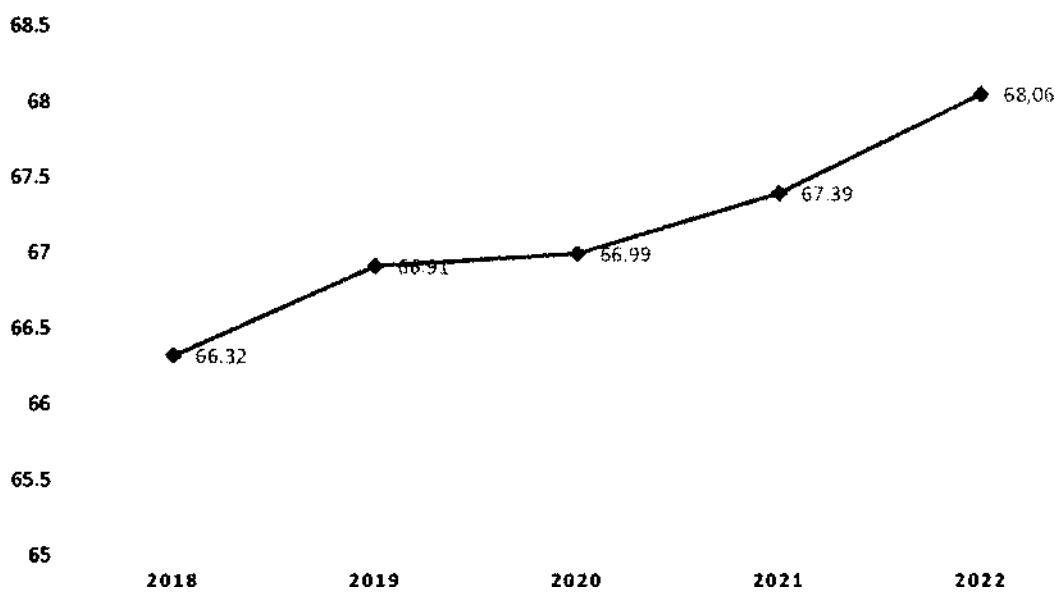
1. Mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Bertujuan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka.
3. Memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal.
4. Didukung empat pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
5. Menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam



menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Tren positif capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam kurun waktu 2018-2022 memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Data tahun 2018 IPM Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai nilai 66,32 meningkat hingga pada tahun 2022 mencapai 68,06.

**Gambar 2.11.**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia**  
**di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**



*Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2023*



**Tabel 2.10.**  
**Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara**

Kabupaten/Kota	IPM Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Manado	78,41	79,12	78,93	79,20	79,66
Kota Tomohon	75,78	76,67	76,69	76,86	77,44
Minahasa	74,97	75,47	75,29	75,73	76,18
Kota Bitung	73,27	74,20	74,10	74,20	74,70
Minahasa Utara	73,05	73,95	73,90	74,11	74,69
Kota Kotamobagu	72,55	73,22	72,97	73,47	79,66
Minahasa Selatan	70,86	71,68	72,11	72,32	72,89
Kepulauan Sangihe	69,67	70,53	70,73	71,07	71,63
Minahasa Tenggara	69,66	70,47	70,51	71,06	71,48
Kepulauan Talaud	68,32	68,97	69,40	69,83	70,43
Bolaang Mongondow	66,91	67,82	67,89	68,16	68,95
Kepulauan Sitaro	66,75	67,48	67,64	68,05	68,94
Bolaang Mongondow Utara	66,32	66,91	66,99	67,39	68,06
Bolaang Mongondow Timur	65,21	66,08	65,99	66,55	67,21
Bolaang Mongondow Selatan	64,49	65,28	65,00	65,42	65,90
Provinsi Sulawesi Utara	72,20	72,99	72,93	73,30	73,81

**Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2023**

**B. Angka Harapan Lama Sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur berapa lama seseorang diharapkan akan menghabiskan waktu di sekolah. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan tingkat pendidikan dari seluruh penduduk di suatu daerah



dibagi dengan jumlah penduduk tersebut. AHLS berguna untuk mengukur tingkat pendidikan suatu daerah dan untuk mengukur perkembangan pendidikan dari waktu ke waktu. Daerah dengan AHLS yang tinggi dianggap memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan daerah dengan AHLS yang rendah dianggap memiliki tingkat pendidikan yang rendah. AHLS juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat pendidikan antar daerah. Daerah dengan AHLS yang lebih tinggi dianggap memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan AHLS yang lebih rendah.

Tabel. 2.11.

Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Utara

Wilayah Administrasi	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2020	2021	2022
Tomohon	14,20	14,21	14,23
Talaud	12,51	12,59	12,65
Sulawesi Utara	12,85	12,94	12,95
Sitaro	11,67	11,86	12,02
Sangihe	12,32	12,47	12,59
Minahasa Utara	12,80	12,92	13,06
Minahasa Tenggara	12,27	12,43	12,44
Minahasa Selatan	12,74	12,83	12,98
Minahasa	13,98	14,15	14,17
Manado	14,15	14,16	14,17
Kotamobagu	12,79	12,88	12,89
Bolaang Mongondow Utara	11,91	12,17	12,34
Bolaang Mongondow Selatan	12,29	12,30	12,31
Bolaang Mongondow	11,52	11,53	11,61
Bolaang Mogondow Timur	11,59	11,86	11,88
Bitung	12,61	12,62	12,65

Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2023



Berdasarkan data angka harapan lama sekolah Bolaang Mongondow Utara menunjukkan tren yang positif, dimana dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 11,91 ditahun 2020 menjadi 12,34 ditahun 2022 atau meningkat 0,43 poin dalam 3 tahun terakhir. Upaya pemerintah daerah untuk memenuhi mandatory spending di bidang pendidikan rata-rata 20% alokasi APBD menjadi salah satu faktor terciptanya kondisi ini.

### **C. Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah sebuah ukuran statistik yang menunjukkan berapa lama rata-rata seseorang diharapkan untuk hidup berdasarkan tingkat kematian saat ini. Ini dihitung dengan menggunakan data demografi dan menghitung rata-rata jangka waktu yang diharapkan seseorang untuk hidup berdasarkan usia saat ini. AHH dapat digunakan untuk mengukur kesehatan suatu daerah dan perkembangan medis di daerah tersebut, dan juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kesehatan antara daerah atau populasi yang berbeda.

Secara singkat AHH dapat dijelaskan bahwa rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir.

Berdasar data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bahwa AHH di Kabupaten Bolaang Mongondow utara cenderung meningkat dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, tercatat pada tahun 2018 sebesar 67,21 Tahun, dan pada Tahun 2022 sebesar 68,05 tahun, yang mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 68,05 tahun. Peningkatan AHH ini menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. AHH dipengaruhi oleh beberapa variabel yang diidentifikasi sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan penduduk.





**Gambar. 2.11**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup**  
**(Dalam Tahun)**

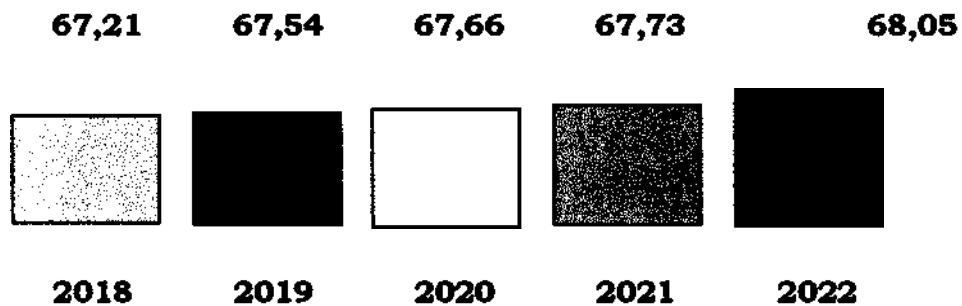


Diagram diatas menunjukkan harapan hidup masyarakat Bolaang Mongondow Utara terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dapat dilihat pada tahun 2018 angka harapan hidup berada pada 67,21 tahun menjadi 10 bulan lebih baik pada tahun 2022 yakni pada angka 68,05 tahun. Hal ini berbanding lurus dengan upaya pemerintah untuk memenuhi sarana dan prasarana kesehatan, terlihat dari pembangunan 2 rumah sakit dan peningkatan status 11 puskesmas di Bolaang Mongondow Utara.

**D. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. Walaupun sempat mengalami peningkatan sebesar 5,08 pada tahun 2018, namun secara umum tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara rentang waktu 2018-2022 cenderung mengalami fluktuasi, berangkat dari angka 4,42 persen pada tahun 2019 menjadi 5,48 persen pada tahun 2020 namun pada tahun 2021 sampai tahun 2022 mulai menurun menjadi 5,10 persen.

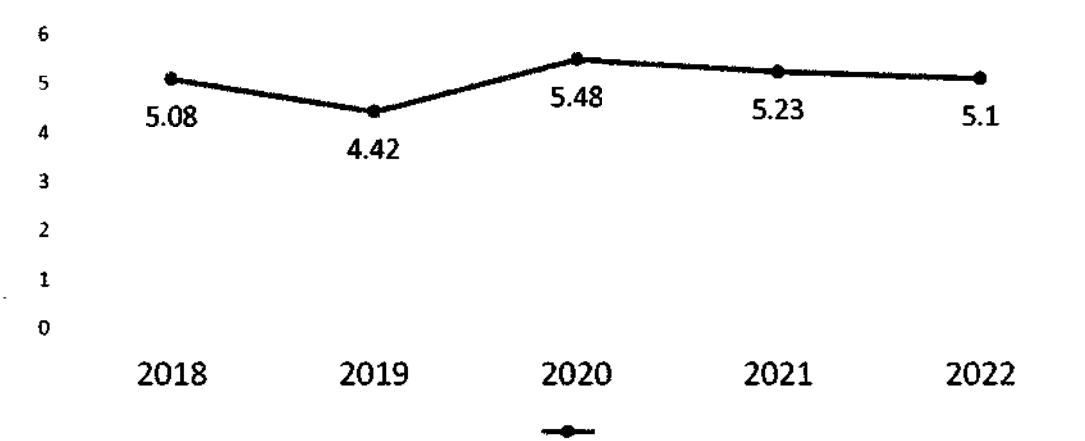
**Tabel 2.12.**  
**Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bolaang**  
**Mongondow Utara, Tahun 2018 – 2021**



Jenis Kelamin	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)			
	Jumlah			
	2018	2019	2020	2021
Laki-Laki	3,18	2,7	3,04	3,13
Perempuan	1,9	1,92	2,44	2,1
Total	5,08	4,62	5,48	5,23

Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2022

Gambar 2.12.  
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2023

Naiknya pengangguran terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak selalu menandakan kondisi perekonomian yang sedang lesu, namun lebih diakibatkan oleh naiknya jumlah angkatan kerja, transformasi/ pergeseran struktur ekonomi serta korelasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja yang kurang optimal.

#### D. Gini Ratio

Gini ratio adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu daerah. Indeks ini dikembangkan oleh seorang ekonom Italia bernama Corrado Gini pada tahun 1912.

Indeks Gini dihitung dengan mengukur perbedaan antara distribusi



teoritis yang sama rata dengan distribusi aktual dari pendapatan atau kekayaan. Nilai Gini yang mendekati 0 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sangat merata, sementara nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa pendapatan sangat tidak merata.

Gini ratio dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Daerah dengan nilai Gini yang rendah dianggap sebagai daerah dengan distribusi pendapatan yang merata dan kesejahteraan yang lebih tinggi, sementara daerah dengan nilai Gini yang tinggi dianggap sebagai daerah dengan distribusi pendapatan yang tidak merata dan kesejahteraan yang lebih rendah.

Pada Tahun 2020 adanya kecenderungan peningkatan nilai rasio gini di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, menunjukkan semakin timpang pemerataan pendapatan. Adapun data Rasio Gini Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2022 sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.13.**

**Rasio Gini Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018-2022**

Tahun	Rasio Gini	Kriteria Oshima
2018	0,380	Ketimpangan Moderat
2019	0,340	Ketimpangan Moderat
2020	0,390	Ketimpangan Moderat
2021	0,328	Ketimpangan Moderat
2022	0,351	Ketimpangan Moderat

*Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2023*

Gini Ratio Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada angka 0,351, ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan atau kekayaan di Bolaang Mongondow Utara cenderung merata. Angka ini berada di bawah rata-rata Gini ratio Nasional Tahun 2022 pada angka 0,381 dan Provinsi Sulawesi Utara pada angka 0,359, yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Bolaang Mongondow Utara cenderung lebih merata



dibandingkan Nasional dan Provinsi.

Angka 0,351 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan atau kekayaan yang diterima oleh setiap individu di Bolaang Mongondow Utara cenderung sama dan tidak ada kelompok yang sangat kaya atau miskin. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan pemangku kebijakan di Bolaang Mongondow Utara berhasil dalam menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk meningkatkan pendapatannya.

#### **E. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah suatu rencana aksi Global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Berdasarkan amanah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 bahwa pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Dalam Menjalankan komitmen Global terdapat 17 Poin Utama dan 4 Pillar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yaitu :

1. Pilar Pembangunan Sosial yang mencakup Poin (1)Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan berkualitas, (5) Kesetaraan Gender. Dengan tujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia secara adil dan setara untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Poin (7) Energi Bersih dan terjangkau, (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (10) berkurangnya kesenjangan, (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan yang bertujuan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih dan terjangkau serta didukung kemitraan.



- 3. Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup poin 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, (13) Penanganan Perubahan Iklim, (14) Ekosistem Lautan, (15) Ekosistem Daratan bertujuan untuk tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
- 4. Pilar Hukum dan Tata Kelola yang mencakup poin (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh yang pada intinya untuk bertujuan untuk terwujudnya hukum dan tata Kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Target TPB/SDGs menjadi salah satu prioritas pembangunan di Bolaang Mongondow Utara, terbukti dari pelaksanaan TPB/SDGs sebagaimana matriks berikut.

**2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hingga Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 13 klub , data ini menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap olah raga meningkat serta didukung komitmen pemerintah untuk peningkatan prestasi olah raga masyarakat melalui pembinaan dan pengembangan klub olah raga yang ada dimasyarakat.

**Gambar 2.13**  
**Perkembangan Cabang Olahraga Berprestasi Hingga Tahun 2022**



*Dari 14 cabor yang dibina, 6 diantaranya telah mampu berpartisipasi dikancah provinsi, regional maupun nasional*

**Sumber data: Dispora Kab. Bolmut, 2023**



Adapun cabang olahraga yang diunggulkan untuk mampu bersaing di level provinsi maupun regional diantaranya: Cabang olahraga Taekwondo, Tenis Meja, Voli, Panjat Tebing, dan Sepak Takraw.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan, hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.14.  
Realisasi Indeks Pendidikan Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah	11,88	11,90	11,91	12,17	12,34
Rata-Rata Lama Sekolah	8,11	8,12	8,40	8,41	8,57

Sumber data : Dikbud Kab. Bolmut, 2023

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pembentuk indeks pendidikan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Jika dilihat dari postur perkembangan tabel tersebut, maka Indeks Pendidikan



dari 2018 sampai dengan 2022 terjadi trend kenaikan di setiap tahunnya untuk harapan lama sekolah terjadi kenaikan sebesar 0,3 sampai pada tahun 2022 dan untuk rata-rata lama sekolah sebesar 0,55 pada tahun 2022.

Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan secara moderat. Apabila pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah hanya 8,11 tahun, pada tahun berikutnya, 2019, menjadi 8,12 tahun. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah menjadi 8,40 tahun, tahun 2021 sebesar 8,41 tahun dan tahun 2022 menjadi 8,57 tahun. Namun demikian angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Utara yang pada tahun 2022 berada pada angka 9,68.

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Pada tahun 2022, AHLS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai 12,34 tahun, artinya bahwa penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah. AHLS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2021 ini masih dibawah dari angka Provinsi Sulawesi Utara yang besarnya 12,95 tahun. Berikut disajikan terkait data pendukung terkait dengan Urusan Pendidikan:



**Tabel 2.15.**  
**Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2018-2022**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
APK PAUD	67,02	72,04	73,00	94,74	86,50
APK SD/MI/ sederajat	108,34	103,63	100,00	100,00	109,10
APM SD/MI/ Sederajat	90,82	92,38	96,00	92,00	93,10
APK SMP/ MTs/ Sederajat	112,86	114,32	100,00	100,00	107,40
APM SMP/ MTs/ Sederajat	82,77	83,61	85,00	84,00	73,50
Angka Partisipasi Pendidikan Non Formal	28,00	35,00	58,00	90,00	90,00
Nilai Rata-rata Rapor Siswa Kelas VI SD	48,00	53,00	55,00	62,00	76,77
Nilai Rata-rata Rapor Siswa Kelas IX SMP	50,00	55,00	58,00	90,36	77,16
Penerapan kurikulum pada setiap jenjang satuan pendidikan	100	100	100	100	100
Persentase Sarana, Prasarana dan SDM disetiap Jenjang Pendidikan	43,25	100	100	56,97	76,43

*Sumber data: Dikbud Kab. Bolmut, 2023*

Fluktuasi APM SD masih berada dibawah angka 100% menunjukkan





keterjangkauan pendidikan dasar belum merata di seluruh wilayah. Artinya hal ini disebabkan oleh masih terjadinya kasus anak SD yang usianya dibawah 7 tahun namun telah mengikuti sekolah dasar. Kemungkinan kedua adalah banyak terdapat anak usia diatas 12 tahun namun masih berada di bangku SD. Berbanding terbalik dengan angka partisipasi pendidikan non formal, dimana terjadi kenaikan signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Ini menunjukkan besarnya minat masyarakat yang sudah bukan usia sekolah namun ingin bersekolah melalui program kejar paket A/B/C.

Penurunan APK Paud pada tahun 2022 diakibatkan oleh masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana belajar PAUD dibuktikan dengan masih rendahnya persentase ketersediaan ruang kelas/ ruang guru PAUD yang hingga tahun 2022 kinerjanya masih berada pada angka 60%.

2.3.1.2 Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Beberapa indikator pencapaian urusan Kesehatan di kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai berikut :

**Tabel 2.16.**  
**Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Tahun 2018-2022**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
AKI(AKI) per 1000 KH	145.8	146.2	299.8	76.3	232.7
AKB (AKB) per 1000 KH	9.48	16.81	10,00	8.42	6.98
Indeks Keluarga Sehat	0,50	0,83	0,114	0.116	0,136



Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Prevalensi Stunting	22,24	15,30	9,70	1.61	2,21
Persentase Penurunan Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular	25,90	15,20	34.9	17.94	15,38
Cakupan Universal Health Coverage	54,25	96,3	96.93	81.54	95,69
Rasio Tenaga Kesehatan	0,49	0,60	0,62	1.25	1,26
Persentase Fasilitas Kesehatan Bermutu dan Terstandarisasi	83,33	92,31	84.61	92.3	92,3

Sumber : Dinkes Kab. Bolmut, 2023

Sampai saat ini tenaga kesehatan yang tersedia di Kab. Bolaang Mongondow Utara ada 8 dokter, 26 perawat, sebagai petugas kesehatan yang professional yang siap melayani masyarakat Bolaang Mongondow Utara.

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan ibu dalam suatu populasi. AKI dihitung dengan mengalikan jumlah kematian ibu dalam suatu tahun dengan 1000 dan dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama. AKI digunakan sebagai indikator kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu, serta sebagai tolok ukur kualitas pelayanan kesehatan yang diterima ibu.

AKI yang tinggi menunjukkan masalah kesehatan yang serius dalam suatu populasi dan dapat menjadi indikator dari masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan yang lebih luas. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi AKI termasuk akses terbatas terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi, dan diskriminasi gender.



AKI Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 adalah 232,7 Per 1000 Kelahiran Hidup yang artinya apabila terjadi 1000 kasus kelahiran hidup maka ada 232,7 kasus ibu yang meninggal, dengan menggunakan perhitungan standar Maternal Mortality Rate (MMR), di Bolaang Mongondow Utara, terjadi 3 kasus kematian dari 1.289 proses persalinan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum mencapai target Rasio AKI secara Nasional yaitu 183/1000 kelahiran hidup, yang artinya target nasional untuk wilayah Bolaang Mongodondow Utara angka maksimal kasus kematian ibu harusnya dibawah dari 2 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 3 kasus dari total Kelahiran Hidup 1.289. AKI Tahun 2022 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 pada angka 76,3 (1 Kasus) hal ini di karenakan banyaknya jumlah ibu hamil dengan risiko tinggi, terlalu tua dan terlalu muda untuk hamil.

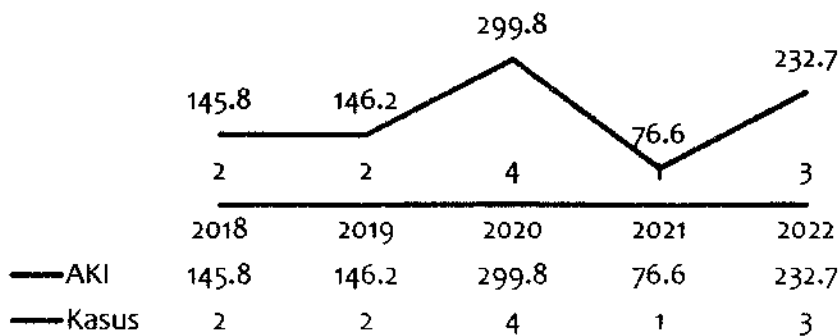
Sudah dilakukan tindakan pertolongan persalinan sesuai prosedur akan tetapi mengalami kendala pada akses rujukan Rumah Sakit yang terlalu jauh dan adanya penolakan dari pihak keluarga untuk dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit meskipun sudah dilakukan edukasi oleh tenaga kesehatan sehingga memperlambat proses rujukan.

Sesuai dengan Target Renstra, Target AKI Tahun 2022 153/1000 KLH, capaian Tahun 2022 232,7/1000 KLH, untuk capaian kinerja indikator AKI Tahun 2022 ada pada angka 65.74% atau dengan kata lain tidak mencapai target.

Pentingnya optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta dukungan dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan agar penurunan AKI dan bayi tidak mengalami peningkatan pada tahun-tahun mendatang, dan ini dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



**Gambar 2.14.**  
**Angka Kasus Kematian Ibu Tahun 2018-2022**



**Sumber : Dinkes Kab. Bolmut, 2023**

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bayi dalam suatu populasi. AKB dihitung dengan mengalikan jumlah kematian bayi dalam suatu tahun dengan 1000 dan dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama.

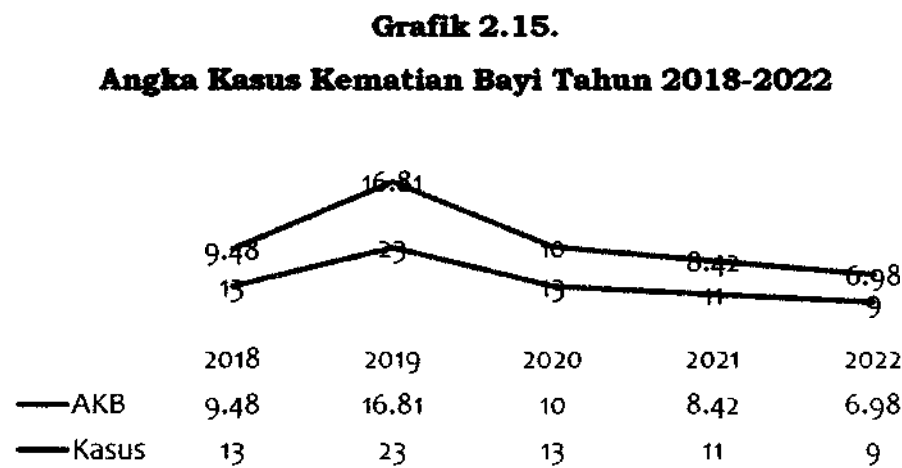
AKB di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai target sesuai dengan perhitungan dari rasio AKB per 1000 kelahiran hidup dengan menggunakan perhitungan Infant Mortality Rate (IMR).

Target Nasional AKB 16/1000 dan untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara target AKB adalah 17,17/1000 KLH, yang dapat diartikan bahwa apabila di Bolaang Mongondow Utara terjadi 1000 kasus kelahiran hidup maka jumlah kasus kematian bayi yang terjadi tidak boleh melebihi angka 17,17 kasus, atau apabila di Bolaang Mongondow Utara terjadi 1.289 kasus kelahiran hidup maka ambang batas maksimal kasus kematian bayi berada pada angka 22 kasus.

Pada Tahun 2022 hanya terdapat 9 kasus AKB dari 1289 kasus kelahiran, sehingga Bolaang Mongondow Utara melampaui target untuk pencapaian AKB. Dapat dijelaskan pula bahwa 9 kasus tersebut terdiri dari kematian Neonatal (0-28 Hari) 8 Orang dan Kematian Bayi (29 Hr-11 Bln) 1 Orang. Dengan Penyebab Kematian Neonatal Berat badan Lahir Rendah dan



Asfiksia, penyebab Kematian Bayi Febris, dan gambaran ini dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



**Sumber : Dinkes Kab. Bolmut, 2023**

Upaya penurunan angka kematian bayi merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan kesehatan. Angka kematian bayi yang tinggi menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi diantaranya adalah:

1. Peningkatan akses ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan persalinan yang aman dan pemeriksaan kesehatan prenatal.
2. Penyediaan vitamin dan suplemen makanan untuk ibu hamil, terutama untuk ibu hamil yang tidak mendapat gizi yang cukup.
3. Penyediaan pelayanan kesehatan neonatal yang berkualitas, seperti pelayanan neonatal intensif, pelayanan imunisasi, dan pelayanan perawatan bayi baru lahir.
4. Penyuluhan dan edukasi kesehatan tentang cara merawat bayi baru lahir dan cara mengatasi masalah kesehatan yang mungkin terjadi pada bayi.



5. Peningkatan akses ibu dan bayi terhadap pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Upaya-upaya ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan sinergis dengan dukungan pemerintah, dan masyarakat untuk dapat mencapai target penurunan angka kematian bayi yang signifikan

Beberapa kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat untuk dapat peningkatan perekonomian wilayah secara makro dan mikro, selain berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran juga membawa manfaat lain bagi masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Berdasarkan hasil temuan lapangan maka dapat dijelaskan manfaat inovasi kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan berdampak secara langsung pada nilai edukasi masyarakat akan pentingnya harapan hidup, sehingga memberi ruang kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga serta mampu meningkatkan pendidikan anak secara berkelanjutan. Manfaat tambahan bagi masyarakat lebih sering berobat ke Puskesmas hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah pilihan masyarakat sebagai berikut; Puskesmas sebesar 85%, Pustu sebesar 11%, Rumah Sakit sebesar 2% dan Poliklinik sebesar 2%. Dengan alasan yang substansial adalah jaraknya terdekat dengan rumah pasien, pelayanannya cepat, jaraknya tidak membutuhkan ongkos yang besar. Bahkan dalam pelayanan ibu dan bayi terpenuhi dengan baik saat berobat dengan skor terpenuhi sebesar 71%, kadang terpenuhi sebesar 8%, tidak terpenuhi sebesar 3% dan tidak tahu sebesar 18%. Namun dari segi pelayanan kendaraan Ambulance di tingkat Desa, masyarakat sangat mengharapkan bantuan pemerintah karena letak geografis dari daerah Kabupaten Bolmut bergunung sehingga memberi dampak kurang mendukung, sehingga responden cukup mengharapkan ketersediaan Ambulan yang siaga ada di desa polosok, hal ini sebagaimana sebaran



kuesioner keberadaan Ambulance di Desa ; tersedia sebesar 11,8%, kadang tersedia sebesar 23,2%, tidak tersedia sebesar 57,7% dan tidak tahu sebesar 7,3%.

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali yang dilakukan oleh Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi (Komisi Akreditasi) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. Akreditasi Puskesmas dan RSUD adalah pengakuan terhadap puskesmas dan RSUD yang diberikan oleh Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa puskesmas dan RSUD telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas dan RSUD yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas dan RSUD secara berkesinambungan. Adanya kendala Pandemi Covid-19 dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 belum dilakukan Survey Akreditasi sehingga terdapat 1 Puskesmas Baru yaitu Puskesmas Biontong yang Beroperasi Dari Tahun 2019 belum dilakukan Survey Akreditasi sehingga belum memperoleh predikat nilai Akreditasi Dari Komisi Akreditasi kementerian Kesehatan RI.

Tabel 2.17.

Tingkatan Akreditasi Puskesmas Tahun 2022

PUSKESMAS	KATEGORI	KATEGORI	TAHUN PEROLEHAN	HASIL	CAPAIAN	KET
		RI AKREDITASI				
RSUD	RSUD Rujukan Kabupaten	Dasar	2018	1	100%	
Boroko	Rawat Inap	Utama	2019	1	100%	
Bolangitang	Rawat Inap	Utama	2019	1	100%	



PUSKESMAS	KATEGORI	KATEGORI		HASIL	CAPAIAN	KET
		RI AKREDITASI	TAGU PEROLEHAN			
Bintauna	Rawat Inap	Utama	2019	1	100%	
Bohabak	Rawat Inap	Madya	2019	1	100%	
Ollot	Rawat Jalan	Madya	2019	1	100%	
Mokoditek	Rawat Jalan	Dasar	2019	1	100%	
Sangtombolaling	Rawat Jalan	Madya	2018	1	100%	
Sangkub	Rawat Inap	Dasar	2018	1	100%	
Bintauna Pantai	Rawat Jalan	Dasar	2018	1	100%	
Buko	Rawat Inap	Madya	2017	1	100%	
Tuntung	Rawat Jalan	Madya	2017	1	100%	
Biontong	Rawat Jalan			1	0%	
Rata-rata Kabupaten				12	92,3%	

Sumber: Dinkes Bolmut, 2023





Dalam penyusunan Dokumen Distrupsi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat beberapa rekomendasi yang penting untuk diperhatikan dalam peningkatan layanan kesehatan diantaranya :

1. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan SDM tenaga medik/non medik (Perawat, tenaga ahli, Dokter dll) sejak dini dalam bentuk kemitraan dengan Perguruan Tinggi penghasil tenaga medis yang siap kerja untuk mendukung kinerja peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Bolmut.
2. Pemerintah daerah dengan segera menyediakan Unit Transfusi Darah (UTD) sebagai bentuk penjaminan kesehatan masyarakat dalam pertolongan gawat darurat.
3. Pemerintah daerah perlu menyediakan fasilitas labolatorium dan SDM yang dibutuhkan dalam peningkatan layanan kesehatan di daerah.
4. Pemerintah daerah segera membangun kemitraan dengan penyedia obat-obatan (Apotik Profesional dan berlisensi) dalam mendukung pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu di Wilayah Kabupaten Bolmut.
5. Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi secara kontinue dalam pengelolaan Manajemen Rumah Sakit Daerah secara transparan dan objektif sesuai kebutuhan pengembangan Rumah Sakit Menuju Tipe B.

#### **2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Infrastruktur merupakan suatu fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah untuk menunjang aktifitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas, efisiensi, dan keterjangkauan fasilitas. Tujuan Pembangunan Infrastruktur dapat merubah wajah ibukota Kabupaten sebagai kawasan yang maju dan mempunyai karakter. Secara Umum Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di fokuskan pada 4 aspek yaitu a) Peningkatan layanan Jalan dan Jembatan, b) Peningkatan layanan Irigasi, c) Peningkatan Layanan Air Minum dan Air



limbah, serta d) Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang. Keempat aspek tersebut merupakan program prioritas kabupaten Bolaang mongondow Utara yang melekat pada Misi ke-4 yaitu “Memantapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Handal”.

**Tabel. 2.18.**

**Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Jalan dalam keadaan mantap	52	53	75	74,57	74,95
Persentase Jaringan Irigasi D.I Kabupaten Berkondisi Baik	90	90	90	90	90
Persentase Jumlah penduduk yang memiliki Akses Air Minum Layak	75	79	85	88	90
Persentase Penduduk yang memiliki Akses Air Limbah Aman	21	23	25	28	29
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	77	78,72	89,85	80	81

*Sumber: Dinas PUPR Kab. Bolmut, 2023*

Pembangunan Infrastruktur di kabupaten masih perlu perbaikan, hal ini dapat dilihat pada data di atas. Namun, ada beberapa aspek juga yang telah mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti persentase Jumlah Penduduk yang memiliki akses air bersih dan Persentase penduduk yang memiliki akses Air limbah aman. Berdasarkan data layanan air bersih bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mendapat layanan akses air minum baik yang berasal dari jaringan



perpipaan maupun berasal dari sumur. Demikian pula dengan akses air limbah sebagian besar masyarakat telah memiliki jamban/septic tank untuk pembuangan limbah dan ada beberapa masyarakat yang telah mendapat layanan IPAL Komunal untuk pembuangan limbah.

Persentase Jalan dalam keadaan mantap dan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir, beberapa factor yang mempengaruhi pencapaian indikator tersebut antara lain yaitu adanya covid 19 pada tahun 2020 sehingga terjadinya refocusing anggaran yang pada akhirnya berpengaruh pada pembangunan infrastruktur kabupaten. Selain itu terjadi kerusakan di beberapa ruas jalan karena beban angkutan yang berlebihan serta masih ada beberapa permukaan jalan yang berbatu atau kerikil.

Berbeda dengan beberapa indikator sebelumnya, jaringan Irigasi tidak mengalami perubahan selama lima tahun terakhir. Pencapaian indikator tersebut sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu 90 persen. Hal tersebut dikarenakan tidak ada pembangun baru jaringan irigasi setiap tahunnya, jaringan irigasi lebih difokuskan pada perbaikan-perbaikan jaringan yang telah mengalami kerusakan.

#### **2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai fungsi yang strategis dalam peranan sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Urusan perumahan merupakan kebutuhan yang pokok dan wajib dipenuhi demi kesejahteraan rakyat serta peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat dengan sasaran yaitu penurunan angka rumah tidak layak huni di kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



**Tabel 2.19.**

**Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Presentase luas areal kawasan kumuh	2,19	2,12	2,05	2,00	1,95

**Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Bolmut, 2023**

Berdasarkan SK Nomor 211 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bahwa luasan kumuh yaitu sekitar 50,75 ha yang tersebar di 5 Kecamatan dan 12 Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kawasan perumahan dan permukiman kumuh antara lain faktor sosial, faktor ekonomi, faktor sarana dan prasarana, faktor kepadatan penduduk, faktor kondisi bangunan, faktor ketersediaan lahan dan juga faktor aksesibilitas.

Dinas Perumahan dan Permukiman berupaya membuat program dan kegiatan untuk mendukung berkurangnya luas areal kawasan kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Beberapa diantaranya yaitu melalui bantuan sosial RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.545 Unit atau sekitar 67 persen RTLH telah ditingkatkan. Selain itu ada juga bantuan provinsi melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan jenis bantuan berupa pembuatan jalan dan drainase di kawasan permukiman kumuh yang berlokasi di Kecamatan Bolangitang Barat, Desa Bolangitang II serta bantuan Pusat berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



**2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat**

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salah satu kabupaten yang terletak di jalur utara Pulau Sulawesi merupakan wilayah yang sangat strategis. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini dilewati jalur utama perekonomian di Pulau Sulawesi sehingga tingkat mobilitas transportasi manusia dan barang sangat tinggi. Hal tersebut berpotensi menyebabkan ancaman gangguan ketertiban dan keamanan.

**Tabel 2.20.**  
**Kinerja Urusan Tranlinmas (Satpol-PP)**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kejadian Kebakaran yang Tertangani	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00
Persentase Penegakkan Perkada	18,00	18,00	24,00	29,00	35,00
Persentase penegakkan Perda	0	0	0	50,00	58,00

*Sumber : Satpol-PP Kab. Bolmut, 2023*

Kejadian kebakaran yang tertangani tahun 2021 sebanyak 4 kali, untuk tahun 2022 sebanyak 2 kali hal ini terjadi penurunan capaian karena tingkat pemahaman tentang bahaya kebakaran saat ini sangat tinggi karena adanya monitoring dan evaluasi dan sosialisasi di wilayah kecamatan se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilaksanakan setiap 3 bulan oleh Tim satuan pemadam kebakaran. Sosialisasi tersebut antara lain Penggunaan APAR tempat-tempat usaha, gedung-gedung pemerintah maupun swasta dan rumah-rumah penduduk.

Capaian penegakan Perkada pada Tahun 2022 mengalami



peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana pada tahun 2021 capaian penegakkan Perkada sebesar 29 persen meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 35 persen. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah Perkada yang dilakukan penegakkan baik melalui Patroli dan Pengawasan maupun melalui operasi Non Yustisi. pada tahun 2021 dilakukan penegakkan sejumlah 6 (enam) Perkada dan pada tahun 2022 sejumlah 7 (tujuh) Perkada dari total sebanyak 12 (dua belas) Perkada yang direncanakan dilakukan penegakkan melaui Patroli dan pengawasan maupun Non Yustisi.

Demikian pula dengan penegakan Perda pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana pada tahun 2021 capaian penegakkan Perda sebesar 50 persen meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 58 persen Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah Perda yang dilakukan penegakkan baik melalui Patroli dan Pengawasan maupun melalui operasi Non Yustisi. pada tahun 2021 dilakukan penegakkan sejumlah 6 (enam) Perda dan pada tahun 2022 sejumlah 7 (tujuh) Perda yang memuat sanksi dari total sebanyak 12 (dua belas) Perda yang memuat sanksi.

Pencegahan, Mitigasi dan Kesiap-siagaan Bencana adalah upaya konkrit dalam meminimalisir dampak dari bencana, sehingga perlu dilakukan manajemen utuh yang melibatkan sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada. Saat ini tercatat bahwa jumlah wilayah rawan bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu 71 Desa yang tersebar di 6 kecamatan diantaranya Kecamatan Sangkub 12 Desa, Kecamatan Bintauna 12 Desa, Kecamatan Bolangitang Timur 16 Desa, Kecamatan Bolangitang Barat 10 Desa, Kecamatan Kaidipang 10 Desa dan Kecamatan Pinogaluman 11 Desa.

Dalam rentang waktu 2018-2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana di 2 Desa, Pertama di Desa Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur



pada Tahun 2018 dan pelaksanaan sosialisasi kedua di Desa Suka Makmur Kecamatan Sangkub Tahun 2022. Namun karena keterbatasan anggaran, keberlanjutan proses pembentukan hingga terbentuknya Desa tangguh Bencana (DESTANA) belum terlaksana karena keterbatasan anggaran.

**Tabel. 2.21.**  
**Capaian Kinerja Urusan Kebencanaan**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Wilayah Siaga Bencana	100	100	100	100	100
Persentase Respon Cepat Hasil Penetapan Status Darurat Bencana dan Penetapan KLB kurang dari 24 jam	0	100	100	0	0

Sumber : BPBD Kab. Bolmut, 2023

Selama lima tahun terakhir pencapaian kinerja untuk wilayah siaga bencana telah mencapai 100 persen, beberapa kegiatan telah berhasil dilakukan dan pada akhirnya mendukung pencapaian indikator tersebut. Akan tetapi berbeda dengan indikator Persentase Respon Cepat Hasil Penetapan Status Darurat Bencana dan penetapan KLB kurang dari 24 jam yang hanya terlaksana di tahun 2019 dan tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan kejadian bencana terjadi hanya pada tahun tersebut yang pertama pengeluaran SK Status Tanggap Darurat Penanganan Banjir, Longsor dan Cuaca Ekstrem Tanggal 7 Januari 2019, SK Keadaan Darurat Kekeringan tanggal 11 September 2019, dan SK darurat bencana banjir dan longsor tanggal 4 Maret 2020.

**2.3.1.6 Sosial**

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.



**Tabel 2.22.**  
**Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018 - 2022**

Indikator kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PMKS yang menerima bantuan Sosial	88,89	89,89	66,66	89,89	89,89
Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75,00	75,00	87,5	87,5	87,5

*Sumber data: Dinsos Kab. Bolmut, 2023*

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat kurang lebih 9 (sembilan) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yakni :

1. Lanjut Usia
2. Penyandang Disabilitas
3. Anak yang berhadapan dengan Hukum
4. Anak dengan Disabilitas
5. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
6. Korban Bencana Alam
7. Korban Bencana Sosial
8. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
9. Keluarga Miskin (DTKS).

Pada Tahun 2020 PMKS yang tertangani hanya 4 PMKS. Terdapat kelambatan pada pencapaian indikator sasaran Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial dikarenakan adanya relokasi/refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemic covid 19. Pada Tahun 2021 s/d 2022 Jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 8 (delapan) PMKS.

Bentuk penanganan PMKS dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana. Salah satunya yakni Peran aktif PSKS dalam penyelenggaraan





Kesejahteraan Sosial. Sebagai upaya penanganan PMKS tahun berikutnya akan dilaksanakan beberapa kegiatan bimbingan sosial pada beberapa PMKS lainnya serta akan dilaksanakan sistem layanan rujukan dan peningkatan kapasitas dalam rangka pemberdaya aktifan PSKS baik tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Sehubungan dengan ketercapaian kinerja pada tahun 2022, Hal ini tidak lepas dari dukungan sumber daya baik internal Dinas Sosial maupun Relasi Dinas Sosial serta unsur stakeholder dalam rangka melaksanakan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Namun disisi lain dari pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari hambatan/kendala yang menjadi masalah dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan sosial kepada PPKS akan tetapi bagian dari kendala-kendala terselesaikan dengan baik dengan tetap melaksanakan monitoring, evaluasi serta langkah-langkah strategis berdasarkan assessment dari unsure TKS, TKSK serta PSKS lainnya yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

### **2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

#### **2.3.2.1 Tenaga Kerja**

Salah satu Permasalahan ketenagakerjaan di Bolaang Mongondow Utara yakni perlunya penyiapan SDM yang berkualitas guna meningkatkan keterampilan dan keahlian pencari kerja serta pemenuhan akses lapangan pekerjaan. Untuk itu pemerintah terus mendorong SDM tenaga kerja berkualitas melalui paket-paket pelatihan dan keterampilan dan juga terus mendorong terbukanya lapangan pekerjaan melalui kemudahan pengurusan izin usaha bagi para investor.



**Tabel 2.23.**

**Kinerja Urusan Ketenagakerjaan**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	46,88	10,42	79,10	33,70	49,72
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	55.65	55.64	55.64	65.65	69,72
Tingkat Pengangguran Terbuka	5.08	4.62	5.48	5.23	5,83
Persentase Kasus Perselisihan Kerja Yang terselesaikan	100	100	100	50,00	100

**Sumber : Disnakertrans Kab. Bolmut, 2023**

Persentasi tenaga kerja yang di tempatkan mengalami fluktuasi dari setiap tahunnya sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (supply) yang dapat terlibat dalam produksi barang/jasa pada tahun 2022 ada pada angka 65.65% namun terjadi kenaikan pada tahun 2022 menjadi 69.72%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dan dampak dari pandemi sangat dirasakan bagi tenaga kerja mulai tahun 2020 dan 2021 meningkat hingga 5.83% beberapa penyebab yang membuat naiknya tingkat pengangguran terbuka adalah Kondisi ekonomi yang buruk akibat terdampak covid 19 perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menghemat biaya dan meningkatkan laba, selanjutnya teknologi dan otomatisasi ketika teknologi dan otomatisasi semakin maju, beberapa pekerjaan dapat dilakukan oleh mesin, sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Selanjutnya Hubungan industrial dalam indikator Persentase Kasus



Perselisihan Kerja Yang terselesaikan pada tahun 2021 terdapat 2 kasus ketenagakerjaan yang dilaporkan dan seharusnya terselesaikan pada tahun yang sama namun hanya 1 kasus yang terselesaikan pada tahun 2021 sehingga capaian kinerja hanya 50% (tidak tercapai), namun pada tahun 2022 capaian kinerja tercapai 100%.

**2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat beberapa indikator yang menjadi IKD keberhasilan urusan ini sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.24.**

**Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022 <sup>A</sup>
Indeks Pembangunan Gender	86,19	86,92	86,77	87,02	87,02
Persentase Capaian KLA	n/a	15,00	25,00	70,00	75,00

*Sumber data: DDPPPAPPEB Kab. Bolmut, 2023*

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2021 berada pada level 87,02 dari skala 0-100, indeks tersebut turun 0,15 poin dari tahun sebelumnya. IPG mendekati 100 mengidentifikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IDG tersebut naik 1,8 poin dari tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa perempuan semakin menunjukkan perannya dalam pembangunan khususnya dalam politik dan ekonomi.

Capaian KLA tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. tren positif Hal ini menunjukkan adanya trend positif kenaikan dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak anak di Bolaang Mongondow Utara, baik dari aspek hak sipil, lingkungan keluarga/pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus anak.



2.3.2.3 Pangan

Program dan kegiatan dalam urusan pangan dilaksanakan dalam rangka penguatan cadangan pangan, aksesibilitas pangan dan ketersediaan informasi dan peningkatan mutu konsumsi pangan. pada tahun 2022 Indeks Ketahanan Pangan terjadi kenaikan seperti yang tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.25.  
Kinerja Urusan Pangan

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks ketahanan pangan	75.16	80.12	81.29	81.11	82.95

Sumber : Dishanpang Kab. Bolmut, 2023

Dalam gambaran tabel diatas menunjukan angka yang bergeser naik pada 1,88 % itu disebabkan terjadi kenaikan drastis pada salah satu indikator program yang mempengaruhi indikator kinerja utama yaitu indeks pemanfaatan yang naik secara signifikan pada angka 14,23 % namun tidak ditopang dengan 2 indikator program yang mengalami penurunan yaitu Indeks keterjangkauan sebesar 8,48 % sedangkan indeks ketersediaan hanya naik sebesar 0,17% . Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi ketahanan pangan kabupaten Bolaang Mongongondow Utara cenderung menguat. Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan indeks ketahanan pangan meliputi beberapa hal, di antaranya:

1. Peningkatan produksi pangan melalui teknologi pertanian yang baik dan praktik pertanian yang ramah lingkungan.
2. Pembentukan sistem distribusi yang efisien untuk menjamin ketersediaan pangan di seluruh wilayah.
3. Pengembangan sistem penyimpanan pangan yang baik untuk mencegah kerugian dan kerusakan pangan.



4. Pemberdayaan petani dan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pangan di daerah mereka.
5. Pembentukan kerjasama antarnegara dalam pembangunan ketahanan pangan.
6. Peningkatan investasi dalam infrastruktur logistik dan transportasi untuk mempermudah distribusi pangan.
7. Memperkuat sistem informasi pasar pangan untuk mengetahui ketersediaan dan permintaan pangan.
8. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi tentang pangan yang aman dan berkualitas.
9. Peningkatan kerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan ketahanan pangan.

#### **2.3.2.4 Lingkungan Hidup**

Pada urusan lingkungan hidup, penilaian Kualitas Lingkungan Hidup diukur secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) Dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Ketiga indeks ini didukung oleh beberapa program yang ada pada Urusan Lingkungan Hidup diantaranya Persentase B3 Dan LB3 Yang Terkelola, Pemulihan Kualitas Lingkungan, peningkatan sekolah dan desa yang berwawasan lingkungan, peningkatan kinerja pengelolaan sampah, dan penanaman pohon pada kawasan konservasi SDA.



Tabel. 2.26.

Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	n.a	79,97 (Baik)	76,31 (Baik)	76,24 (Baik)	81,99 (Baik)
Indeks Kualitas Air	n.a	57	57	59,52	63,33
Indeks Kualitas Udara	n.a	93,77	93,61	92,30	97,66
Indeks Tutupan Lahan	n.a	86,84	86,84	85,04	85,04

Sumber : DLHK Kab. Bolmut, 2023

Tabel diatas menunjukkan indikator kinerja kualitas lingkungan hidup pada tahun 2018-2022 secara konsisten dinilai “baik” sepanjang tahun dengan capaian tertinggi 81,99 persen pada tahun 2022. Indeks Kualitas Air menunjukkan sedikit peningkatan selama lima tahun dengan capaian 63,33 persen pada tahun 2022. Selanjutnya Indeks Kualitas Udara sedikit mengalami penurunan di tahun 2021 dan Indeks Tutupan Lahan tetap konsisiten pencapaiannya 85,04 persen setiap tahunnya. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan setiap tahunnya oleh dinas lingkungan hidup bahwa perhitungan capaian indikator diatas dipengaruhi oleh perhitungan IKLH yang terus mengalami perubahan sesuai dengan pedoman yang berlaku ,selain itu factor lingkungan juga berpengaruh dalam pengukuran IKLH. Sehingga secara keseluruhan data diatas menunjukkan bahwa kualiatas lingkungan di kabupaten Bolaang Mongondow utara masih perlu ditingkatkan lagi.

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Menjaga ekosistem dengan melakukan pengelolaan lingkungan yang baik dan berkelanjutan.



2. Menerapkan pola pikir 5R (Refuse, Reduse, Reuse, Recycle, Rot) dalam kehidupan sehari-sehari untuk mengurangi produksi sampah dan pemakaian sumber daya alam.
3. Melakukan pengendalian pencemaran udara, air dan tanah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.
4. Mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan.
5. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

**2.3.2.6      Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 2 indikator kinerja yaitu pertama persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang indikator pengukurannya yaitu Kepemilikan KTP-e, kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan kepemilikan kartu identitas anak (KIA). Indikator kedua yaitu persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang indikator pengukurannya yaitu kepemilikan akta kelahiran 0 – 18 tahun, kepemilikan akta kematian, kepemilikan akta perkawinan dan kepemilikan akta perceraian. Kondisi urusan Aministrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.27.**

**Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi kependudukan	91.82	62.18	73.13	76.76	77.70
Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	259.54	99.08	99.35	99.49	99.78

*Sumber data: Disdukcapil Kab. Bolmut, 2023*



Untuk Indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan pada tahun 2018 pencapaian kinerja masuk dalam kategori berhasil dengan persentase di atas 90%. Untuk persentase tahun berikutnya yaitu tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan indikator pengukuran persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang sebelumnya pada tahun 2018 hanya menggunakan 2 indikator pengukur yaitu KTP dan KK, pada tahun 2019 sampai pada tahun 2022 sudah menggunakan 3 indikator pengukur yaitu KTP, KK dan KIA. Dimana persentase KIA sendiri masih sangat rendah sehingga berimplikasi terhadap persentase kepemilikan dokumen kependudukan.

Untuk indikator kedua, persentase pencapaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil tahun 2018 melewati target diatas 100 persen, hal ini dikarenakan mengejar target nasional yang dituntut kedaerah tentang akte kelahiran dan akte kematian. Pada tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan jemput bola untuk akte kelahiran baik didesa-desa maupun sekolah-sekolah dan melaksanakan validasi dan pencatatan kembali data kelahiran baik untuk akte kelahiran yang manual atau akte kelahiran yang belum tercatat di aplikasi SIAK serta akte kelahiran yang masih berupa surat keterangan lahir.

#### **2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut





hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

**Tabel 2.28.**

**Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	85,00	90,00	50,00	98,10	98,10
Persentase Lembaga Desa yang dilatih / dibina	99,00	99,00	50,00	33,33	66,00
Jumlah Desa Maju Berdasarkan IDM	-	6	11	12	14
Persentase Kinerja Aparatur Desa sesuai target	94,00	99,00	83,00	90,00	99,00

*Sumber data: DPMD Kab. Bolmut, 2023*

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Jumlah Desa Maju berdasarkan data Indeks Desa Maju (IDM) sampai dengan 2022 berjumlah 14 desa kategori desa maju di Kab.Bolaang Mongondow Utara. Persentase Kinerja Aparatur Desa sesuai Target, pada tahun 2022 mengalami peningkatan capaian kinerja.

**2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Sasaran yang ingin dicapai dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui program keluarga berencana dengan indikator laju pertumbuhan penduduk dengan capaian sebagai berikut :



**Tabel 2.29.**

**Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,42	1,33	1,18	1,23	1,35

*Sumber data: DPPKBPPPA Kab. Bolmut, 2023*

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menurun sampai dengan 1,18 persen. Penurunan ini disebabkan berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak peran serta masyarakat dalam program KB, namun pada tahun 2021 LPP mengalami sedikit peningkatan sekitar 1,33 persen dikarenakan masa pandemi Covid-19 dan pemerintah khususnya OPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum melaksanakan pelayanan KB (Work From Home/Kerja Dari Rumah) sehingga terjadi peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk/ Baby Boom, sehingga angka kelahiran meningkat. Untuk Tahun 2022 Laju pertumbuhan penduduk meningkat Karena banyaknya pasangan usia subur.

**2.3.2.9 Perhubungan**

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari beberapa sektor salah satunya yaitu transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuen logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal. Selain itu kelengkapan sarana prasarana dan menjadi hal penting dalam mendukung perhubungan terutama dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas.



**Tabel. 2.30.**  
**Capaian Kinerja Urusan Perhubungan**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Perhubungan yang layak fungsi	30	70	75	80	85
Persentase Meningkatnya Keselamatan Berlalu lintas	45	60	65	70	70

*Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bolmut, 2023*

- a. Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Ada beberapa kegiatan yang mendukung indikator tersebut diantaranya yaitu faktor ketersediaan kelengkapan atribut jalan dan ketersediaan transportasi yang memadai.
- b. Indikator Peningkatan Keselamatan Berlalu Lintas tidak mengalami kenaikan di tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak tersedia balai pengujian kendaraan bermotor sehingga Dinas Perhubungan hanya bertugas memberikan surat rekomendasi bagi masyarakat yang akan melakukan Uji KIR, kemudian sosialisasi dilakukan namun terbatas dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi untuk kegiatan tersebut dan terakhir yaitu penyediaan rambu lalu lintas tidak mengalami ketambahan sehingga capaiannya sama seperti tahun sebelumnya.

**2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika**

Kinerja makro urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat dari 2 (dua) indikator antara lain Indeks Komunikasi Informasi publik yang selalu tercapai targetnya pada setiap tahun karena sejak terbentuknya domain Pemda maka seluruh informasi terkait pemerintah daerah di muat dalam website artinya hampir setiap



agenda pemerintah sudah terpublikasi dengan baik. dan untuk Indeks SPBE terkait dengan pelayanan telah mulai dilaksanakan pada tahun 2020 dan meningkat setiap tahunnya saat ini hanya tersisa 2 perangkat daerah yang belum menggunakan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo yaitu Kantor camat Bolangitang timur dan kantor camat sangkub dikarenakan belum adanya akses provider di wilayah tersebut, sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola dan memberikan layanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi. *E-Government* ini merupakan sebuah cara untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan layanan yang dibutuhkan, *E-Government* juga memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi, dibawah ini adalah gambaran capaian dari kinerja urusan Komunikasi dan Informatika:

**Tabel 2.31.**

**Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Komunikasi Informasi publik	40	40	60	86	100
Indeks SPBE	0,00	0,00	43	57	71

*Sumber : Diskominfo . Bolmut, 2023*

Indeks komunikasi informasi publik menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi/data yang disampaikan oleh media melalui Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian, dimana dalam proses kurasi informasi yang akan disajikan oleh media telah sesuai dengan standar yang objektif dalam memonitor dan mengevaluasi informasi yang disampaikan ke masyarakat, indeks ini juga digunakan sebagai early warning system membantu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan



pengelolaan informasi publik yang memerlukan perhatian dan langkah-langkah konkrit lebih lanjut. Sebagaimana digambarkan pada tabel bahwa informasi yang sampai ke masyarakat sering direspon sangat cepat oleh masyarakat, artinya informasi yang disampaikan dipercaya oleh masyarakat.

Untuk penerapan SPBE di lingkungan pemerintah daerah masih terkendala dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan infrastruktur (bandwith) yang masih terbatas sehingga capaian indeks SPBE pada tahun 2022 maksimal berada pada angka 71 poin.

**2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Perkembangan koperasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

**Tabel 2.32.**  
**Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase koperasi aktif/sehat	46,99	13,03	17,39	30,43	39,13
Persentase UMKM naik kelas	8,20	1,16	1,74	2,03	0,87
Persentase IKM yang berstandarisasi	0,00	0,00	0,00	24,49	28,57

*Sumber data : Disperdaginkop Kab. Bolmut, 2023*

Defenisi koperasi aktif dan sehat pada tahun 2020 telah terjadi reformasi total koperasi, dimana koperasi yang telah lama tidak memiliki kegiatan perkoperasian, sehingga dari Kementerian Koperasi membekukan sejumlah 16 Koperasi, namun yang terjadi hanyalah pembekuan sementara oleh Kementerian Koperasi RI. di Tahun 2021 telah diaktifkan kembali Koperasi yang telah melakukan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berakibat pada jumlah koperasi aktif dan sehat , maka terjadi kenaikan angka capaian dari Tahun 2020, 17,39



persen menjadi 30,43 persen sampai pada tahun 2022 naik lagi sebesar 39,13 persen. Realisasi di dapat dari data perhitungan jumlah koperasi yang aktif di setiap tahun di bagi dengan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT setiap tahunnya.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Kondisi penanaman modal daerah dapat dilihat dari pertumbuhan nilai investasi dan banyaknya izin investasi yang diterbitkan.

Tabel 2.33.  
Kinerja Urusan Penanaman Modal

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat	78,69	80,43	80,11	85,26	81,12
Jumlah Investor Meningkat	73	72	47	31	23

Sumber : DPMTSP Kab. Bolmut, 2023

Jumlah investor dihitung dengan melihat banyaknya pengusaha/investor yang mengurus izin usahanya, artinya di sisi lain masa berlaku surat izin perdagangan (SIUP) berlaku seumur hidup sehingga tidak perlu melakukan perpanjangan selama perusahaan masih aktif menjalankan kegiatannya, sehingga dapat ditafsirkan bahwa jumlah investor yang tercantum sebagaimana tabel diatas merupakan investor baru, artinya pada tahun 2021 sebanyak 31 perusahaan/investor menanamkan modalnya di Bolaang Mongondow Utara. Dan bertambah 23 investor baru ditahun 2022, sehingga rentang tahun 2021/2022 investor baru di Bolaang Mongondow Utara yang menanamkan modalnya di Bolaang Mongondow Utara sebanyak 53 investor.



2.3.2.12 **Kepemudaan dan Olah Raga**

Kemajuan suatu daerah pada masa mendatang salah satunya bergantung kepada generasi muda yang akan meneruskan estafet pembangunan. Kondisi urusan kepemudaan dan Olah Raga dari tahun 2018-2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.34.**  
**Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah organisasi pemuda yang aktif	7	13	15	16	17
Presentase atlet berprestasi	7.56	12.13	12.13	12.27	16.87

*Sumber : Dispora Kab. Bolmut, 2023*

Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan sesuai dengan target yang direncanakan. Target ditentukan sesuai dengan Organisasi Pemuda Yang Aktif administrasi Berdasarkan Keabsahan SK Notaris yang aktif.

Atlet breprestasi mengalami peningkatan seiring dengan makin tingginya minat atlet untuk mengembangkan bakat olahraga yang dimiliki oleh masing-masing atlet yang didukung oleh makin banyaknya turnamen yang dilaksanakan di daerah dan event diluar daerah. Salah satu Event di luar Daerah yang diikuti Pada Tahun 2022 adalah Pekan Olahraga Provinsi dimana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendapatkan peringkat ke 11.

2.3.2.14 **Statistik**

Statistik memiliki peran penting dalam mendukung kinerja dan pembangunan daerah dengan memberikan data yang akurat, informasi, monitoring dan evaluasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang



efektif dan tepat adapun beberapa keterlibatan dari statistik adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan data yang akurat dan relevan, Statistik daerah dapat menyediakan data yang akurat dan relevan tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di daerah tersebut, yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja daerah dan mengambil keputusan yang tepat.
2. Monitoring dan evaluasi statistik daerah dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
3. Perencanaan statistik daerah dapat digunakan dalam proses perencanaan, seperti dalam pengembangan rencana pembangunan daerah dan menentukan prioritas pembangunan daerah.
4. Penyusunan anggaran statistik daerah dapat digunakan dalam penyusunan anggaran daerah untuk menentukan alokasi dana yang tepat untuk berbagai program pembangunan.
5. Penyusunan kebijakan statistik daerah dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan daerah, seperti dalam pengembangan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
6. Evaluasi program statistik daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pemerintah daerah dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja program.
7. Penyediaan informasi statistik daerah dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan kondisi di daerah tersebut

#### **2.3.2.15 Persandian**

Persandian adalah Kegiatan di bidang Pengamanan data/Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten





serta terkait pada etika profesi sandi. Urusan Persandian saat ini dalam pengamanannya terhadap informasi publik, tidak berfokus pada informasi rahasia, Layanan yang diberikan persandian tidak hanya pada kerahasiaan, namun juga keutuhan, keotentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan nir penyangkalan atas informasi dan yang terpenting adalah pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh. Untuk kabupaten Bolaang Mongondow Utara persandian belum dapat diukur dikarenakan belum ada pencapaian kinerja karena keterbatasan sumber daya manusia dan penganggaran.

#### **2.3.2.16 Kebudayaan**

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan identitas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai sebuah Daerah pesisir pantai dalam proses pembangunannya juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Daerah ini. Perkembangan kelompok kesenian di Kabupaten Bolaang Mongondow utara sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.32 menunjukkan belum terjadi perkembangan yang optimal disebabkan karena beberapa faktor diantaranya dokumen dan data sejarah masih dalam proses pengkajian, disamping itu terkendala dengan regulasi pengelolaan cagar budaya yang harus memiliki izin karena pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah pusat.



**Tabel 2.35.**

**Kinerja Urusan Kebudayaan**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Ekosistem Kebudayaan	25,00	27,00	30,00	30,00	53,67
Jumlah Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan	23,00	25,00	35,00	35,00	49,00
Jumlah dokumen dan data sejarah daerah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	1,00	-	-	1	1
Persentase kebudayaan yang dikembangkan	25	27	30	57,33	57,33

*Sumber : Dikbud Kab. Bolmut, 2023*

Pada tahun 2018 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menyusun dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang memuat identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan, Identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan prasarana Kebudayaan, Potensi Masalah Pemajuan Kebudayaan dan Analisis serta rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pada tahun 2021 peneliti dari Universitas Hasanuddin telah melakukan penelitian peninggalan sejarah/purbakala yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

**2.3.2.17 Perpustakaan**

Perpustakaan sebagai tempat untuk memperoleh informasi sangat penting kedudukannya dalam rangka mengembangkan dan menambah pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal. Perpustakaan berfungsi antara lain, (1) menyimpan koleksi (informasi), (2) menyediakan informasi bagi masyarakat, (3) sarana untuk belajar baik di lingkungan formal maupun



non formal, (4) mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya dan (5) menjadi tempat untuk rekreasi. Upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah sudah dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah melalui berbagai promosi minat baca, penambahan fasilitas perpustakaan, dan penambahan jumlah koleksi perpustakaan. Perpustakaan daerah juga menyelenggarakan perpustakaan keliling dan pameran buku dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, namun hasilnya belum terlihat signifikan dalam meningkatkan jumlah pengunjung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan belum tinggi. Kemajuan teknologi juga semakin pesat, masyarakat semakin dimudahkan dalam mengakses internet hanya menggunakan handphone maupun tablet. Perpustakaan digital juga sudah berkembang, sehingga masyarakat tidak perlu berkunjung ke perpustakaan, mereka cukup mengakses melalui internet Kondisi urusan Perpustakaan dan Kearsipan dari tahun 2018 s/d 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.36.**  
**Kinerja Urusan Perpustakaan**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pengunjung ke Perpustakaan per tahun	5.094	2.284	1.685	1.126	1.130
Persentase Bahan pustaka yang terkelola dengan baik	42,10	80,00	70,30	71,00	71,00

*Sumber data: DKPD Kab. Bolmut, 2023*

Penurunan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan lebih diakibatkan oleh pesatnya penyaluran informasi melalui media online/elektronik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mampu



beradaptasi dengan kondisi ini. Dengan mengupayakan perpustakaan online dan arsip elektronik agar dapat eksis di era 4.0.

2.3.2.18 Kearsipan

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pelaksanaan urusan kearsipan masih sangat kurang. Arsip yang ada, harus dialihmediakan supaya mempermudah pengguna dan juga berfungsi sebagai back up data. Kondisi urusan Kearsipan dari tahun 2018 s/d 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.37.

Kinerja Urusan Kearsipan

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pengelola arsip yang bersertifikasi	81,00	71,40	73,55	77,77	78,90

Sumber : DKPD Kab. Bolmut, 2023

Pengelola Arsip yang mengikuti Diklat Arsiparis adalah para Kasubag Kepegawaian di semua SKPD, dan yang mendapatkan sertifikat 9 (sembilan) orang.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan konsep yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah diciptakan dengan basis ekonomi sektor pertanian sub sektor perikanan, yang direncanakan mampu tumbuh dan berkembang sejalan dengan komoditas unggulan dan usaha agribisnis yang dikembangkan. Pengembangan Kawasan Minapolitan (PKM) dipusatkan di Kecamatan Pinogaluman yang merupakan kecamatan



penghasil ikan terbesar di Kabupaten Bolang Mongondow Utara. Tetapi bukan berarti di wilayah sekitarnya tidak berpotensi di sub sektor perikanan ini, sehingga wilayah sekitarnya merupakan wilayah penyangga.

Kegiatan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Bolang Mongondow Utara dilakukan secara terintegrasi baik dengan pengembangan wilayah secara fisik maupun dengan koordinasi antar stakeholder yang dituangkan dalam program kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah terkait. Peran sektor kelautan dan Perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dinilai sangat strategis karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, mengurangi kesenjangan sosial dimasyarakat serta mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Potensi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut diatas.

**Tabel 2.38.**  
**Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	5,000	5,200	4,139	4,065	5.055
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	100	150	24	39	87

*Sumber : DKP Kab. Bolmut, 2023*

Beberapa hal yang menyebabkan penurunan produksi perikanan budidaya yakni adanya bencana alam (banjir) pada tahun 2020 yang mengakibatkan banyak petani yang gagal panen, berdasarkan hasil evaluasi terdapat banyak bibit mati yang disebabkan oleh kualitas bibit yang kurang baik serta harga pakan yang cenderung mahal.

Sedangkan untuk perikanan tangkap di tahun 2021 juga kembali mengalami penurunan sebesar 1,79 persen hal ini disebabkan oleh adanya



virus COVID-19 sehingga pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk melakukan refocusing anggaran, serta *force majeure* seperti angin kencang dan ombak yang relative tinggi.

Pada tahun 2022 hasil perikanan tangkap kembali mengalami peningkatan drastis yakni sebesar 990 ton atau 24 persen dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Hal tersebut berbanding lurus dengan banyaknya jumlah bantuan alat penangkap ikan maupun alat bantu penangkapan ikan yang tersalur kepada nelayan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Demikian pula dengan perikanan budidaya pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 123 persen hal ini di dukung oleh adanya peningkatan sumberdaya manusia dan peningkatan bantuan sarana pendukung budidaya sehingga produksi naik.

**2.3.3.2 Pariwisata**

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawan seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:



**Tabel 2.39.**  
**Kinerja Urusan Pariwisata**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kunjungan wisata	13,655	21,829	22.800	49,241	52,043
Jumlah Event Wisata	7	7	1	1	2

*Sumber : Dispar Kab. Bolmut, 2023*

Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan event wisata belum berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisata. Hal ini dapat dimaklumi mengingat metodologi yang digunakan untuk mengukur kunjungan wisata dengan menghitung jumlah orang yang berkunjung ke Bolaang Mongondow Utara secara kumulatif tanpa melihat tujuan kunjungannya. Disisi lain Bolaang Mongondow Utara merupakan jalur utama trans sulawesi sehingga banyak dilalui/dikunjungi oleh pengguna jalan walaupun mereka tidak berwisata, namun dengan pendekatan ini dianggap melakukan kunjungan wisata.

**2.3.3.3 Pertanian**

Potensi Pertanian di kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat diukur melalui beberapa variable diantaranya Produksi Pertanian Pangan, Produksi Perkebunan dan Produksi Peternakan. Ketiga varibel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut yang merupakan capaian kinerja Urusan Pertanian.



**Tabel. 2.40.**  
**Kinerja Urusan Pertanian**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Peningkatan Produksi Pertanian</b>					
Produksi Tanaman Pangan (Padi)	71.460	63.202	54.548	42.083	43.387
Produksi Tanaman Pangan (Jagung)	420	66.196	50.337	51.654	53.160
Produksi Tanaman Pangan (Tomat)	n.a	36,60	2,50	6,40	8,20
Produksi Tanaman Pangan (Cabai)	n.a	30,70	12,23	24,50	71,8
Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa	15.548	15.549	15.551	15.210	15.300
Produksi Tanaman Perkebunan Kakao	802,88	624,36	424,36	424	324
<b>Peningkatan Produksi Peternakan</b>					
Populasi Sapi	18.221	16.028	16.558	16.982	17.232
Populasi Kambing	11.142	8.250	8.572	8.798	8.924

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Bolmut, 2023

a. Produksi Pertanian Padi

Produksi Pertanian Padi sempat mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pengolahan padi dari sebelum proses penanaman sampai pada waktu panen dan pasca panen memakan biaya yang cukup tinggi
2. Teknologi pendukung yang cukup mahal
3. Benih, Pupuk dan Obat yang cukup mahal, sehingga petani merasa rugi jika harus menanam padi dan memilih untuk beralih ke pertanian lain.
4. Faktor cuaca atau banjir bandang yang terjadi pada tahun 2019 di Kec. Sangkub dan Bintauna juga membuat lahan pertanian padi menjadi rusak. Sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk pulih kembali.

b. Produksi Pertanian Jagung





Produksi pertanian jagung mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir dan kenaikan yang tertinggi di tahun 2019 dikarenakan adanya intervensi program dimana terdapat bantuan bibit jagung dari APBN sebesar 150 Ton selama 2 kali dalam setahun serta mendapat bantuan pupuk dari Dana Alokasi Umum. Faktor selanjutnya yaitu banyak petani yang beralih menjadi petani jagung karena produksi jagung cukup menguntungkan.

**c. Produksi Tanaman Tomat**

Produksi tanaman tomat mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 sehingga masyarakat atau petani tomat lebih memilih untuk menanam tanaman lain atau beralih pekerjaan lain. Selain itu tidak terdapatnya anggaran atau adanya refocusing anggaran sehingga tidak mendapat benih tomat dari pemerintah daerah.

**d. Produksi Tanaman Cabai**

Peningkatan produksi pertanian cabai sempat mengalami penurunan dikarenakan covid-19, akan tetapi mulai meningkat lagi di tahun 2020-2022, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya bantuan bibit cabai dari anggaran APBN Pusat sebesar 400 sachet di tahun 2022
2. Adanya bantuan bibit cabai dari anggaran APBD I sebesar 128 sachet di tahun 2022
3. Adanya bantuan pupuk dari anggaran DAU

**e. Produksi Kelapa**

Produksi Kelapa mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 341 ton. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Adanya pengurangan lahan di desa Binjeita untuk pembangunan PLTU sekitar 30 hektar.



2. Adanya serangan hama kelapa (Brontispa, kumbang api).
3. Umur kelapa yang sudah kurang memproduksi.
4. Fluktuasi harga yang tidak menentu menyebabkan harga produksi lebih tinggi dari nilai jual.

f. Produksi Pertanian Kakao

Produksi tanaman kakao mengalami kecenderungan penurunan setiap tahunnya dikarenakan adanya peralihan tanaman dari tanaman kakao ketanaman pangan karena dianggap lebih menguntungkan. Disisi lain intervensi dari pemerintah masih terkendala terkait alokasi dan kebijakan khususnya pengadaan pupuk bersubsidi.

g. Populasi Sapi

Populasi ternak sapi mengalami peningkatan di tahun 2022, Keberhasilan sasaran ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Adanya bantuan sapi sebesar 20 ekor yang berasal dari dana APBD
2. Adanya bantuan sapi sebesar 100 ekor dari APBD Provinsi
3. Adanya Program IB (Inseminasi Buatan ) mendukung program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri)

h. Populasi Kambing

Sama halnya dengan populasi ternak sapi, produksi kambing juga mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan ini yaitu :

1. Adanya bantuan kambing sebesar 11 ekor (APBD)
2. Peningkatan kelahiran ternak kambing
3. Pelayanan kesehatan hewan yang rutin dilakukan.



2.3.3.4 Perdagangan

Kondisi capaian kinerja sektor perdagangan rentang 2018-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.41.**  
**Kinerja Urusan Perdagangan**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	-	-	20,00	10,00	20,00
Persentase alat ukur,takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera	-	-	2,71	11,22	20,60
Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas	-	5%	4%	0,15%	0,15%

Sumber data : Disperdaginkop Kab. Bolmut, 2023

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan Tera-tera Ulang UTTP belum bisa dilaksanakan karena sampai tahun 2019 Unit Metrologi Legal belum terbentuk, menindaklanjuti hal tersebut maka pada tahun 2019 dilakukan upaya pembentukan UNIT Metrologi Legal dengan mengadakan Tenaga Teknis Penera, Peralatan Standar dan Pengajuan Penilaian Pembentukan Unit Metrologi Legal. Terkait hal tersebut maka tahun 2020 ditargetkan Unit Metrologi Legal terbentuk sehingga dapat melakukan pelayanan Tera-tera Ulang UTTP pada Tahun 2021.

2.3.3.5 Perindustrian

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki potensi industri cukup banyak antara lain kopi, gula aren dan limbah organik. Dengan banyaknya



unut usaha/pengrajin tersebut maka diperlukan hilirisasi industri dari atas sampai bawah dengan berbagai inovasi. Secara umum permasalahan yang dihadapi yaitu produk IKM yang telah ada belum di Standarisasi dapat di lihat dari data berikut :

**Tabel 2.42.**  
**Kinerja Urusan Perindustrian**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase IKM yang berstandarisasi	n/a	n/a	n/a	24,49	28,57

*Sumber data: Disperdaginkop Kab. Bolmut, 2023*

Kurun waktu 2018-2020 pendampingan terhadap IKM belum terdokumentasi dengan baik, sehingga program intervensinya juga masih sangat minim. Berbeda halnya sejak tahun 2021 intervensi terhadap IKM oleh pemerintah daerah sudah mulai menunjukkan tren positif walaupun masih banyak didapati kekurangan misalnya keterbatasan IKM yang didampingi dan sumber daya manusia pendamping yang masih minim. Upaya ini menunjukkan hasil pada tahun 2022 dimana jumlah IKM yang telah berstandarisasi meningkat menjadi 28,57% yang pada tahun sebelumnya hanya sebesar 24,49%.

**2.3.3.6 Transmigrasi**

Tujuan utama dari penyelenggaraan transmigrasi di daerah adalah untuk mengatasi masalah ketimpangan penduduk dan pembangunan yang tidak merata di Indonesia. Tujuan lain dari transmigrasi adalah:

1. Pemberian lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi transmigran.
2. Pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan transmigrasi.
3. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di daerah tujuan transmigrasi.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan transmigrasi.



- 5. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat transmigran dan masyarakat setempat.
- 6. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini masyarakat transmigrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara bertahap dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus dilakukan peningkatan keterampilan melalui pelatihan. Rata-rata presentase masyarakat transmigrasi yang telah dilatih dari tahun 2018-2022 sebesar 83,33 persen.

2.3.4 Fokus Layanan Urusan Pendukung Pemerintahan

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada beberapa indikator berikut ini:

Tabel 2.43.

Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Capaian Target Kinerja Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesra	94,81	92,12	100,00	100,00	100,00
Capaian Target Kinerja Bidang perekonomian dan Pembangunan	95,71	97,07	97,72	98,00	98,00
Persentase laporan LPPd tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Nilai LPPD	3,0402	3,1502	3,100	3,3274	3,3274
Meningkatnya LAKIP	C	B	B	B	B

Sumber data : Sekretariat Daerah Kab. Bolmut, 2023



Capaian target kinerja bidang hukum pemerintah dan kesra dinilai berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya kemajuan dalam program-program yang dijalankan di bidang hukum dan kesra, kualitas pelayanan pemerintahan di bidang agama, budaya dan sosial kemasyarakatan, serta jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dan ditindaklanjuti.

Capaian target kinerja bidang perekonomian dan pembangunan dinilai berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya kualitas kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan, kualitas pengadaan barang dan jasa serta presentase BUMD yang dibina.

Hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan nilai 3,3274 poin dengan kategori “B” pada tahun 2022. Sama halnya dengan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan oleh Kementerian PAN dan RB. Nilai indeks ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan berbagai upaya demi kemajuan penyelenggaraan pemerintah di daerah selama tahun 2022 terlihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada.

#### **2.3.4.2 Sekretariat DPRD**

Capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat pada indikator berikut ini:



**Tabel 2.44.**

**Kinerja Urusan Pendukung (Sekretariat DPRD)**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Presentase Agenda DPRD yang terlaksana tepat waktu	100	100	80,00	80,00	90,00

*Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Bolmut, 2023*

Target kinerja Sekretariat DPRD di tahun 2021 termasuk dalam kategori kurang berhasil hal ini dikarenakan terdapat 3 dokumen Naskah akademik yang tidak menunjukkan adanya realisasi perda inisiatif DPRD dengan kata lain masih dalam proses pembahasan. Selain itu terdapat beberapa masalah yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama ini yakni:

1. Adanya perbedaan persepsi antar Anggota DPRD terhadap kebijakan politik;
2. Lemahnya koordinasi lintas instansi untuk menyiapkan draft produk hukum dan sekaligus meyakinkan pihak legislatif terhadap pentingnya kebijakan tertentu sehingga mempengaruhi lahirnya produk hukum daerah;
3. Keterbatasan sumber daya yang dapat menopang pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. Belum adanya standar pelayanan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran dan indikator kinerja.

Berbeda dengan tahun 2021, persentase agenda DPRD ditahun 2022 mengalami kenaikan capaian sebesar 10 persen dari tahun 2021 hal ini didukung oleh tersusunnya kajian naskah akademik sebanyak 3 Ranperda Inisiatif Anggota DPRD yang akan dijadikan Produk Hukum Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



**Tabel 2.45.**

**Data Ranperda/Perda (Sekretariat DPRD)**

Ranperda/Perda	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ranperda	7	4	3	17	14
Perda	5	4	3	8	7

*Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Bolmut, 2023*

Secara umum terdapat beberapa kendala dalam penetapan Ranperda yaitu :

1. Ranperda yang diusulkan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Terkait kelengkapan administrasi, biasanya Ranperda sudah diusulkan tetapi Naskah Akademiknya belum siap;
3. Urgensi dari Ranperda, yaitu Ranperda yang prioritas atau tuntutan masyarakat yang sangat kompleks dan segera harus dibahas;
4. Waktu Pembahasan yang tidak cukup karena banyaknya Ranperda yang diusulkan.

**2.3.5 Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan**

**2.3.5.1 Perencanaan**

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan





berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Kesesuaian target dokumen perencanaan perangkat daerah terhadap target prioritas pembangunan daerah menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

2.3.5.2 Keuangan

Pajak daerah pada tahun 2022 naik disebabkan oleh peningkatan realisasi/pembayaran atas target pajak yang juga naik dari tahun 2021 ke tahun 2022 seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.46.  
Kinerja Urusan Keuangan

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran	2 Poin	2 Poin	2 Poin	2 Poin	2 Poin
Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat Kepatutan Penyajian Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase menurunnya temuan terkait penatausahaan dan pengelolaan BMD	5%	4%	9,5%	11%	11,5%
Persentase Peningkatan PAD	8.16%	17.20%	37%	17,29%	38,50%
Nilai pencapaian kinerja	80	85	90	90	90

Sumber data : BPKD Kab. Bolmut, 2023



2.3.5.3 Kepegawaian

Kebutuhan pegawai pada tahun 2018 mencapai 47 persen namun mengalami fluktuasi setiap tahunnya. pada tahun 2019 mengalami penurunan dikarenakan banyaknya pegawai yang pensiun dan pindah tugas didaerah lain sementara usulan formasi sesuai Analisi Beban Kerja (ABK) rata-rata di bawah 50 persen yang disetujui oleh Pemerinah Pusat. Namun ditahun 2022 mengalami kenaikan dikarenakan adanya penerimaan calon Pegawai negeri sipil, sementara target Updating Data Kepegawaian memiliki capaian target meningkat pada angka 98 persen dikarenakan data dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) telah terupdate secara optimal, seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.47.  
Kinerja Urusan Kepegawaian

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kebutuhan Pegawai	47.00%	45.00%	53.00%	52.00%	57.00%
Persentase Pengembangan Karir Pegawai	83.00%	86.00%	90.00%	91.00%	92.00%

Sumber data : BKPP Kab. Bolmut, 2023

2.3.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Pada indikator Persentase ASN yang berkompoten tidak terealisasi di tahun 2020 dan 2021 di karenakan refocusing anggaran ke penanganan COVID-19 sehingga target mengalami penurunan pada angka 54 persen, untuk CPNS yang lulus Pelatihan Dasar pada 5 (lima) tahun terakhir hanya 1 (satu) tahun yang tidak terealisasi dikarenakan tidak ada Prajabatan pada tahun 2017 seperti tergambar dalam tabel dibawah ini:



**Tabel 2.48.**

**Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase ASN yang Berkompeten	100.00%	0.00%	66.00%	54.00%	43.00%

*Sumber data : BKPP Kab. Bolmut, 2023*

**2.3.5.5 Penelitian dan Pengembangan**

Kondisi urusan penelitian dan pengembangan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat di cerminkan lewat publikasi data-data pembangunan melalui berbagai media. Terbentuknya Website Bapelitbang sejak tahun 2015 telah dimanfaatkan sebagai media informasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sekaligus media publikasi hasil-hasil pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan akses penyebaran informasi pembagunan daerah, maka mulai tahun 2021 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merancang system aplikasi yang disebut ASIDA (Aksi Sistem Data Terpadu) sebagai bank data. Selain itu penerapan Sistem Informasi pembangunan Daerah (SIPD) dibidang perencanaan dan keuangan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyebaran informasi pembangunan.

**2.3.5.6 Pengawasan**

Fungsi pengawasan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih terus dioptimalkan dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten hanya saja ada beberapa tenaga fungsional yang di pindah tugaskan menjadi pegawai struktural sehingga bisa mempengaruhi salah satu capaian indikator, demikian juga dengan Monitoring Control for Prevention (MCP) yang mulai diberlakukan sejak tahun 2018 dan setiap tahun memiliki perubahan aplikasi sehingga permintaan data semakin



banyak dan belum terpenuhi sehingga capaian bisa menurun seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.49.**

**Kinerja Urusan Pengawasan**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase OPD dengan nilai AKIP terbaik	5.55%	6.66%	13.33 %	56.66%	72.00 %
Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2
Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2
Persentase temuan yang di tindaklanjuti	62.00%	63.00 %	52.58 %	60.80%	74.00 %
Tingkat Kepatuhan Pencapaian MCP	60.00%	66.00 %	51.04 %	51.42%	74.00 %
Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi	-	-	-	16.87%	18.38 %

*Sumber data: Itda Kab. Bolmut, 2023*

**2.3.5.7 Fokus Urusan Kewilayahan**

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten. Capaian kinerja Kecamatan dapat dilihat pada indikator berikut ini:



**Tabel 2.50.**  
**Kinerja Urusan Kewilayahan (Kecamatan)**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pinogaluman	2	2	3	3	3
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kaidipang	N A	N A	3	3	3
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kaidipang	75	75	93	95	95
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bolangitang Barat	2	2	3	3	3
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bolangitang Barat	75	75	76	77	77
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bolangitang Timur	1	1	3	3	3
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bolangitang Timur	75	75	75	77	77
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bintauna	2	2	3	3	3
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bintauna	75	75	75	85	85
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sangkub	2	2	3	3	3
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sangkub	75	75	75	75	78

*Sumber : Kantor Camat Se-Kab. Bolmut, 2023*



Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan rata-rata masih sama dengan tahun 2021 namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 tergolong mengalami kenaikan. Hal ini dapat diartikan bahwa akuntabilitas kinerja kecamatan menunjukkan hal yang positif, dan tidak lepas dari peran Bapelitbang yang melakukan pendampingan sejak perumusan indikator kinerja sampai dengan pelaporan evaluasi kinerja.

Begitu juga dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, hampir rata-rata ke 6 kecamatan masih sama dengan capaian tahun 2021. Berbeda dengan ke 5 kecamatan lainnya khususnya Kecamatan Sangkub mengalami kenaikan sebesar 4 persen dari tahun sebelumnya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Sangkub untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kecamatan Sangkub, yang salah satunya adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat yang tersebar di 16 desa. Dan dari hasil survey tersebut di temukan bahwa telah terjadi peningkatan IKM di Kecamatan Sangkub yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar 75 persen menjadi 78 persen di tahun 2022.



**Tabel 2.49**  
**Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah RPJMD Tahun 2018 - 2022**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET RPJMD					CAPAIAN RPJMD					Keterangan terhadap hasil capaian RPJMD 2022	Sumber Data
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,88	11,9	11,91	11,92	11,93	11,88	11,9	11,91	12,17	12,34	Tercapai	BPS
				Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,11	8,12	8,4	8,46	8,5	8,11	8,12	8,4	8,41	8,57	Tercapai	BPS
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,21	67,54	67,66	67,99	68,22	67,21	67,24	67,66	67,73	68,05	Tidak Tercapai	BPS
			Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Juta Rupiah	8,99	9,06	9,36	9,66	9,85	8.992	9.366	9.062	9.143	9.285	Tidak Tercapai	BPS
				Gini Rasio	Poin	0,39	0,38	0,36	0,34	0,33	0,38	0,34	0,39	0,33	0,33	Tercapai	BPS
			Menurunnya beban pengeluaran keluarga	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,08	4,62	4,5	4,04	3,75	5,08	4,62	5,48	5,23	5,83	Tercapai	BPS
				Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	37,01	39,74	41,94	50,74	50,94	0,38	0,39	0,37	66,95	66,95	Tercapai	DPPKB PPPA



No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET RPJMD					CAPAIAN RPJMD					Keterangan terhadap hasil capaian RPJMD 2022	Sumber Data
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
2	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and Clean Government)	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai	ITDA
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	C	C	C	C	C	CC	B	B	B	B	Tercapai	SELUR UH OPD
				Meningkatnya pelayanan masyarakat (Rata-Rata IKM)	Persen	70,42	72,08	73,02	76,39	77,5	NA	NA	80,35	85,38	82,24	Tercapai	SETDA
3	Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	29,14	30,97	32,8	34,63	34,46	29,14	30,97	32,8	31,79	36,48	Tercapai	BPS
				Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	8,60	9,14	9,68	10,22	10,76	8,60	9,14	9,68	8,37	10,76	Tercapai	BPS
				Kontribusi sub sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	Persen	0,68	0,7	0,8	0,9	1	0,68	0,7	0,8	0,79	1	Tercapai	BPS
				Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Milyar Rupiah	10,43	14,61	7,88	12	15	43,353	67,093	41,468	5,958	6,78	Tidak Tercapai	PTSP
4	Memantapkan pemerataan pembangunan	Meningkatkan cakupan dan kualitas	Meningkatkan ketersediaan	Cakupan Universal Access	Persen	67,85	74,28	80,71	87,14	93,57	77,57	80,71	83,99	87,14	93,57	Tercapai	PERKI MTAN





No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET RPJMD					CAPAIAN RPJMD					Keterangan terhadap hasil capaian RPJMD 2022	Sumber Data
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
	infrastruktur wilayah yang handal	layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan	infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan														
				Persentase Kepatuhan Terhadap RTRW	Persen	73,98	83	86	89	90	77	78,82	89,85	92,3	88	Tidak Tercapai	PUPR
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Prov/Kab/kota	Persen	76,31	76,31	79,97	73,01	75,04	0	79,97	76,31	76,24	81,99	Tercapai	DLHK



BAB III  
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum, perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2022 digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1  
Rata-Rata Pertumbuhan APBD Tahun 2018-2022

KODE REK.	URAIAN	Anggaran					Rata-rata (persen)
		2018	2019	2020	2021	2022*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENDAPATAN DAERAH	709.357.544.856,22	877.394.651.578,04	664.815.365.128,11	781.853.782.844,00	676.354.918.981,80	-1,18
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.223.087.927,22	21.107.712.880,00	27.736.023.829,11	23.151.208.178,00	23.994.514.319,00	10,27
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	682.146.724.458,00	645.224.399.053,00	625.517.730.462,00	667.200.607.382,00	652.560.396.662,00	-1,10
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.981.152.473,00	10.962.539.645,00	11.561.610.838,00	11.501.967.384,00	0,00	1,56
5	BELANJA DAERAH	685.139.710.528,33	579.312.482.881,27	578.476.357.591,48	581.584.802.412,00	589.405.895.288,80	-0,66
5.1	BELANJA OPERASI	417.800.365.657,30	398.069.302.564,08	393.907.333.513,95	404.246.612.141,00	406.268.693.907,00	-0,70
5.2	BELANJA MODAL	185.399.536.052,00	170.863.318.117,27	175.042.546.926,97	185.257.390.271,00	181.062.917.782,00	-0,59
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.939.808.820,00	1.379.862.000,00	9.526.477.150,14	1.500.000.000,00	2.074.283.609,00	1,69
5.4	BELANJA TRANSFER	117.713.310.309,73	127.883.326.183,51	123.902.592.506,00	124.201.585.184,00	111.887.628.600,00	-1,26
	SURPLUS / DEFISIT	(13.495.455.980,84)	(28.901.157.286,78)	(37.563.984.967,95)	(13.851.804.752,00)	(24.738.612.917,08)	16,36
6	PENBIAYAAN DAERAH	13.495.455.980,84	28.901.157.286,78	37.563.984.967,95	13.851.804.752,00	24.738.612.917,00	16,36
	PENBIAYAAN NETTO	13.495.455.980,84	28.901.157.286,78	37.563.984.967,95	13.851.804.752,00	24.738.612.917,80	16,36
	SISA LEBIH/KURANG PERHITUNGAN TAHUN BERKEMPAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

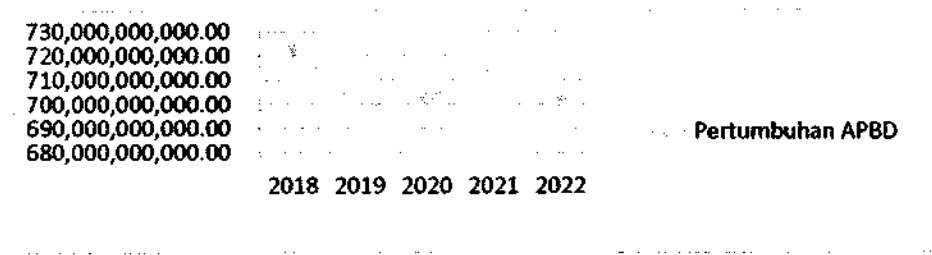
Sumber : BPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022

Dari perhitungan rasio pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan total Pendapatan Daerah dan total Belanja Daerah kab. Bolaang mongondow Utara dari tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan.

Pada komponen PAD dari tahun 2018-2022 rasio peningkatan sebesar 10,27 persen dan komponen Belanja tidak terduga rasio peningkatan sebesar 1,69 persen.



Grafik 3.1  
Rata-Rata Pertumbuhan APBD Tahun 2018-2022



1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 3.2  
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022

KODE RES.	URAIAN	Realisasi					Rata-rata (persen)
		2018	2019	2020	2021	2022*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENDAPATAN DAERAH	694.013.341.302,94	671.982.937.484,71	653.335.425.235,49	696.923.949.054,83	666.161.862.722,77	-1,02
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.425.467.982,94	24.174.311.734,71	20.594.781.946,69	28.667.546.301,83	18.714.427.034,77	4,67
4.1.1	Pajak Daerah	4.492.953.023,00	5.107.187.220,46	4.191.329.217,00	4.801.906.943,00	5.848.515.268,75	6,81
4.1.2	Retribusi Daerah	2.440.841.313,00	1.162.677.518,00	1.161.526.756,70	1.981.920.493,93	3.538.940.845,00	9,73
4.1.3	Hasil Pengkajian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	886.839.194,00	1.055.651.225,00	596.478.408,00	826.924.358,00	717.084.719,00	-5,17
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	6.604.834.452,94	16.848.795.771,25	20.641.367.524,99	13.856.789.406,10	9.609.886.202,02	2,80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	687.384.153.326,00	633.110.820.750,00	615.424.803.328,00	667.892.746.753,00	646.447.435.888,00	-0,78
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	540.281.510.143,00	532.804.642.934,00	485.682.851.419,00	644.858.516.018,00	626.423.641.822,00	3,77
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	110.968.287.000,00	84.800.247.000,00	119.703.378.000,00	0,00	0,00	3,86
4.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.182.047.177,00	15.505.130.816,00	9.238.573.910,00	22.234.224.735,00	20.023.793.866,00	7,17
4.2.4	Bantuan Kasangan	932.339.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	-7,37
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.223.720.000,00	14.218.605.000,00	11.348.128.000,00	11.161.668.000,00	0,00	2,97
4.3.1	Pendapatan Hibah	10.223.720.000,00	14.218.605.000,00	11.348.128.000,00	0,00	0,00	5,32
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	11.161.668.000,00	0,00	1,00

Sumber : BPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022

Berdasarkan rasio pertumbuhan, Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan sebesar 1,02 persen.

Pada PAD beberapa komponen yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya adalah pajak, retribusi, lain PAD yang sah, dan komponen hasil



pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, setiap tahunnya mengalami penurunan sebesar 5,17 persen.

Pada Pendapatan transfer beberapa komponen yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya adalah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih bergantung pada pusat dan provinsi melalui bantuan dana transfer.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan, yang berarti belanja harus berorientasi pada kepentingan publik.

Tabel 3.3  
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2022

KODE REK.	URAIAN	Realisasi					Rerata ( persen )
		2018	2019	2020	2021	2022*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	BELANJA DAERAH	560.045.480.887,00	527.492.842.920,54	553.531.978.385,00	564.251.704.897,00	522.744.387.844,65	-2,10
5.1	BELANJA OPERASI	308.438.254.881,00	372.221.789.494,54	375.784.458.971,00	388.396.264.714,00	371.154.107.235,20	-1,76
5.1.1	Belanja Pegawai	212.447.486.269,00	201.091.039.191,00	196.513.995.704,00	203.513.991.120,00	213.501.889.839,00	0,12
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	147.874.671.199,00	166.254.267.803,54	171.842.400.253,00	168.048.913.493,00	149.312.186.036,20	0,24
5.1.5	Belanja Hibah	37.958.097.423,00	4.524.462.500,00	6.640.563.014,00	9.747.714.528,00	4.017.279.528,00	-42,96
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	158.000.000,00	352.000.000,00	787.500.000,00	7.085.647.573,00	4.322.751.832,00	128,71
5.2	BELANJA MODAL	169.225.839.088,00	154.490.978.426,00	168.408.238.884,00	175.738.816.383,00	150.795.823.824,45	-2,84
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.355.500.000,00	3.148.200.000,00	2.428.125.700,00	0,00	0,00	15,59
5.2.2	Belanja Modal Perakatan dan Mesin	37.699.103.900,00	29.127.005.107,00	62.029.048.909,00	45.308.771.544,00	39.650.813.999,00	1,27
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.884.834.220,00	62.780.291.988,00	60.121.828.322,00	61.940.130.931,00	46.686.878.023,45	4,02
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	87.585.351.424,00	52.118.159.831,00	39.290.752.989,00	62.933.435.108,00	60.424.763.037,00	-8,86
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.691.050.142,00	7.317.321.500,00	4.547.482.974,00	5.656.458.600,00	4.033.367.965,00	10,65
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.391.586.320,00	779.295.000,00	9.338.279.500,00	116.622.000,00	794.456.785,00	-13,08
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.391.586.320,00	779.295.000,00	9.338.279.500,00	116.622.000,00	794.456.785,00	-13,08
5.4	BELANJA TRANSFER	117.550.341.200,00	127.663.288.790,00	123.534.202.850,00	123.843.676.535,00	111.687.325.795,00	-1,27
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	493.868.522,00	577.003.686,00	536.935.050,00	541.848.335,00	722.022.195,00	9,96
5.4.2	Belanja Bantuan Kasangan	117.065.472.678,00	127.086.285.104,00	122.997.267.600,00	123.301.828.209,00	110.965.303.600,00	-1,33

Sumber : BPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022



Selama periode 2018-2022 belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja lainnya, setiap tahun cenderung meningkat terutama pada komponen belanja pegawai. Peningkatan belanja pegawai paling tinggi pada tahun 2022 sebesar Rp. 213.501.889.839,00.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkan kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD.

Tabel 3.4  
Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022

KODE REK.	URAIAN	Realisasi					Rata-rata (persen)
		2018	2019	2020	2021	2022*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	13.492.838.080,84	20.901.157.286,78	37.562.360.531,38	13.912.045.295,63	24.738.612.917,66	16,36
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	13.492.838.080,84	20.901.157.286,78	37.562.360.531,38	13.912.045.295,63	24.738.612.917,66	16,36
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.495.455.980,84	20.901.157.286,78	37.563.584.967,95	13.851.804.752,07	24.738.612.917,66	16,36
6.1.2	Koreksi SILPA	(2.617.900,00)	0,00	(1.224.436,57)	60.240.543,56	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	13.492.838.080,84	20.901.157.286,78	37.562.360.531,38	13.912.045.295,63	24.738.612.917,66	16,36
	SISA LEBIH/KEKURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKEMAJUAN	20.901.157.286,78	37.246.843.060,95	13.851.804.752,07	24.738.612.917,66	56.466.762.800,78	28,21

Sumber : BPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022



3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak Legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari neraca daerah akan diturunkan dalam beberapa sub-sub rekening yang lebih rinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5  
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2018-2022

KODE REK	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022*	Rata-rata (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ASET	1.112.541.258.547,93	1.172.785.798.938,19	1.241.148.675.673,80	1.318.684.855.486,28	1.445.104.456.243,51	6,76
1.1	ASET LANCAR	33.611.192.841,51	53.862.856.571,89	25.832.212.818,09	50.615.881.875,94	26.508.012.088,72	-5,69
1.1.1	Kas di Kas Daerah	20.344.685.558,94	32.370.446.068,90	13.266.626.200,99	24.592.916.196,22	250.257.469,44	
	Kas di Bendahara Penerimaan	449.121.270,00	273.648.037,00	3.222.626,20	356.556,00	0,00	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	12.443.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kas Dana BOS	116.411.295,00	4.849.110.838,00	487.241.276,00	124.828.695,00	0,00	
	Kas Dana Kapitasi pada PKTP	1.830.431,80	222.497.986,01	258.080.549,44	20.511.470,44	0,00	
	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.387.523,00	0,00	
	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Piutang Pendapatan	4.371.207.906,00	2.971.742.898,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	1.011.218.574,00	1.697.196.710,00	1.698.828.474,00	
1.1.4	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	35.520.000,00	12.883.800,00	
1.1.5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	717.084.719,25	717.084.719,25	
1.1.6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	214.243.600,00	2.084.839.000,00	2.084.839.000,00	
1.1.7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.8	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	10.644.483.104,00	10.644.483.104,00	
1.1.9	Piutang Lainnya	364.563.298,00	3.101.985.723,81	244.200.000,00	0,00	486.758.430,00	
1.1.10	Penyisihan Piutang	(324.611.028,07)	(77.289.017,86)	(838.083.926,00)	(710.057.900,40)	(710.057.900,40)	
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	140.833.333,33	98.333.333,33	95.289.440,00	72.488.876,71	72.488.876,71	
1.1.12	Persewaan	8.133.996.842,51	9.251.560.704,70	11.090.174.278,46	11.332.446.125,72	11.332.446.125,72	
1.1.13	Aset Untuk Dibonafidikasi						
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.001.300.000,00	5.001.300.000,00	6.023.400.000,00	6.023.400.000,00	6.023.400.000,00	4,76
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.001.300.000,00	5.001.300.000,00	6.023.400.000,00	6.023.400.000,00	6.023.400.000,00	
1.3	ASET TETAP	1.088.239.132.983,58	1.106.695.766.185,73	1.281.038.757.391,47	1.254.321.902.425,27	1.404.547.481.159,72	7,13
1.3.1	Tanah	51.784.930.530,00	57.834.030.646,00	59.472.206.472,00	60.089.836.662,00	60.089.836.662,00	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	202.220.943.259,30	227.647.980.330,55	287.859.943.562,55	326.845.130.564,55	366.680.206.063,55	
1.3.3	Gedung dan Bangunan	368.322.338.599,30	426.263.646.024,15	511.109.157.247,15	559.032.195.234,15	573.305.260.578,15	



1.3.4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	894.612.213.917,52	942.012.926.940,52	976.786.739.102,52	1.037.004.746.531,52	1.092.101.746.452,52	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	30.933.095.716,09	37.668.696.920,09	42.219.543.636,09	44.888.076.051,09	47.564.375.664,09	
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.303.193.583,00	28.288.871.130,58	5.896.415.618,70	28.779.196.666,06	66.943.336.026,51	
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(508.937.582.611,62)	(613.010.385.894,16)	(682.312.247.247,54)	(802.117.279.287,10)	(802.117.279.287,10)	
1.4	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	ASET LAINNYA	7.889.632.712,83	8.026.676.252,57	8.254.385.663,34	7.444.851.965,87	7.943.562.985,87	0,82
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	2.421.126.880,79	2.460.322.880,79	2.460.326.880,79	2.436.426.880,79	2.436.426.880,79	
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	728.659.882,49	875.368.045,83	3.589.729.914,00	4.203.911.614,00	4.502.822.614,00	
1.5.4	Aset Lain-lain	4.539.846.149,55	4.690.985.325,95	4.262.637.018,55	3.540.224.826,95	3.540.224.826,95	
1.5.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	(2.038.388.150,00)	(2.537.911.336,67)	(2.537.911.336,67)	
1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	KEWAJIBAN	2.856.437.560,38	2.908.494.421,54	559.717.326,28	2.194.808.363,06	521.454.196.268,71	299,09
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.856.437.560,38	2.908.494.421,54	559.717.326,28	2.194.808.363,06	521.454.196.268,71	299,09
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	11.601.268,96	(15.862.038,04)	163.365.900,56	2.387.523,00	15.404.104,00	
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	8.570.622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.6	Utang Belanja	12.443.934,00	0,00	0,00	0,00	(237.392.521,00)	
2.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.023.821.735,00	2.924.556.459,58	396.351.425,70	2.191.620.840,06	2.615.729.502,06	
2.1.8	R/K PRKD					519.260.359.183,65	
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (UKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	EKUITAS	1.118.484.820.987,55	1.169.877.104.508,65	1.240.580.958.347,64	1.316.418.947.123,22	1.316.425.947.123,22	4,34
3.1	EKUITAS	1.118.484.820.987,55	1.169.877.104.508,65	1.240.580.958.347,64	1.316.418.947.123,22	1.316.425.947.123,22	4,34
3.1.1	Ekuitas	1.118.484.820.987,55	1.169.877.104.508,65	1.240.580.958.347,64	1.316.418.947.123,22	1.316.410.947.123,22	
3.1.2	Ekuitas SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Ekuitas untuk Disposisi/Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
	KERANGKAA EKUITAS	1.112.541.288.947,83	1.172.785.796.838,19	1.241.148.675.678,80	1.316.804.592.486,28	1.316.808.847.381,83	13,37

Sumber : BPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2023

Aset memberikan memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun Pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Aset terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Kewajiban merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang terjadi dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi, aset tetap dan aset lainnya (tidak



termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam perkembangannya dapat dianalisis berdasarkan kondisi tahun 2018-2022, untuk melihat seberapa efektif perkembangan keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kebijakan mulai dari pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah (termasuk Pendapatan Asli Daerah) harus benar-benar mampu merespon perkembangan keuangan daerah yang diperkirakan akan terjadi. Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan dengan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, perlu adanya strategi koleksi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam menggali penerimaan daerah dan struktur ekonomi/sosial masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Adapun kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2018-2022 yang juga dipergunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018-2022 antara lain sebagai berikut:





1. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah bidang pendapatan (Dinas Pendapatan dan perangkat daerah terkait);
2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
3. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah;
6. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Perimbangan.

Sedangkan arah pengelolaan pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain meliputi :

1. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah;
3. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil;
4. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada kas umum daerah;
5. Mendayagunakan dana melalui pola deposito.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan



dapat memberikan dukungan program-program strategis. Namun lebih dari itu, belanja daerah diharapkan akan memprioritaskan terhadap belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun Anggaran 2018-2022 , antara lain adalah :

1. Mengalokasikan anggaran dana transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10 persen dan 20 persen untuk urusan pendidikan sebagaimana amanat perundang-undangan. Hal ini sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di fasilitas kesehatan dan sekolah-sekolah sesuai kewenangan;
3. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur yang meliputi infrastruktur di lingkup urusan pekerjaan umum, urusan perhubungan dan urusan lingkungan yang berfungsi sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah, dan peningkatan perekonomian daerah;
4. Peningkatan program revitalisasi pertanian yang dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas per satuan hektar dengan diiringi peningkatan kesejahteraan petani. Revitalisasi pertanian dalam skala yang luas (komponen pendukung bidang pertanian) ini meliputi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan optimalisasi panca usaha pertanian dan pengolahan pasca panen;
5. Peningkatan aktivitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM sehingga memiliki daya saing, yang sekaligus seiring dengan upaya penyediaan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;



6. Pengembangan Pariwisata dan pelestarian budaya dengan tetap memegang teguh kearifan lokal dan berkelanjutan sehingga dapat tampil dan berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya di kancah nasional dan regional yang tentunya akan berkontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah;
7. Pengendalian Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan program *Pro environment*, yang diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang mengikuti prinsip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan. Penyediaan Fasilitas Umum juga mendapatkan perhatian berupa Ruang Terbuka Hijau sebagaimana diamanatkan perundang-undangan yang berfungsi antara lain untuk estetika dan kelestarian lingkungan hidup serta edukasi;

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain :

1. Penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun sebelumnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA;
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri



sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal;

2. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Namun dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2016-2020 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD. Penggunaan anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena sebagian besar APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara digunakan untuk belanja publik. Berikut tabel mengenai



analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2022:

Tabel 3.6  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	212.447.486.269,00	686.605.022.097,00	30,94
2019	201.091.039.191,00	655.155.251.710,54	30,69
2020	196.513.995.704,00	677.066.181.015,00	29,02
2021	203.513.991.120,00	688.095.381.432,00	29,58
2022	213.501.889.839,00	634.431.712.839,65	33,65

Sumber : BPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2023

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung stabil walaupun di sisi lain belum memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal adanya pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang



bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berikut merupakan tabel berkenaan dengan defisit riil anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022:

Tabel 3.7  
Defisit Riil Anggaran Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Kondisi Tahun (Rp)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	694.013.341.302,94	671.502.937.484,71	653.355.625.235,69	698.921.949.054,03	666.161.862.722,77
2	Realisasi Belanja Daerah	686.605.022.097,00	655.155.251.710,54	677.066.181.015,00	688.095.381.432,00	634.431.712.839,65
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	00,00,00	00,00,00	00,00	00,00	00,00
4	Surplus/ (Defisit) Riil (1-2-3)	7.408.319.205,94	16.347.685.774,17	(23.710.555.779,31)	10.826.567.622,03	31.730.149.883,12
5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.495.455.980,84	20.901.157.286,78	37.563.584.967,95	13.851.804.752,07	24.738.612.917,66
6	Koreksi SiLPA	(2.617.900,00)	-	(1.224.436,57)	60.240.543,56	-
7	Pembiayaan Neto(5+6)	13.492.838.080,84	20.901.157.286,78	37.562.360.531,38	13.912.045.295,63	24.738.612.917,66
8	SiLPA Tahun Berkenaan (4+7)	20.901.157.286,78	37.248.843.060,95	13.851.804.752,07	24.738.612.917,66	56.468.762.800,78

Sumber : BPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2023

Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cukup kuat untuk membiayai belanja daerah. SiLPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif Jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi over target dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah. SiLPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan dapat menjadi rencana kedepan agar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat secara efektif menjalankan program yang telah



direncanakan sehingga jumlah SiLPA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat diperkecil.

Tabel 3.8  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Kondisi Tahun (Rp)				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelampauan penerimaan PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	13.492.838.080,84	20.901.157.286,78	37.562.360.531,38	13.912.045.295,63	24.738.612.917,66
5	Kewajiban kepada pihak ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Kegiatan lanjutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		13.492.838.080,84	20.901.157.286,78	37.562.360.531,38	13.912.045.295,63	24.738.612.917,66

Sumber : BPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2023

3.3. Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Kerangka pendanaan dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi secara umum baik dalam konteks efektifitas kinerja aparatur (birokrasi) maupun efisiensi anggaran pendanaan pemerintah daerah berupa pengurangan anggaran insentif.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan informasi mengenai pendapatan daerah yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah analisis tren yang didasarkan pada data historis dalam 5 tahun terakhir pada masing-masing obyek pendapatan. Selain menggunakan pertimbangan hasil analisis tren, proyeksi dirumuskan



dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut lebih realistis.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD

Pada tahun 2024, pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. kondisi ini mampu mempengaruhi besaran belanja publik terhadap total belanja daerah. Hal ini perlu diantisipasi mengingat belanja operasional dan pegawai cenderung mengalami peningkatan, disisi lain belanja publik masih sangat mengandalkan dana transfer yang bersifat dinamis (DID/DAK).

Tabel 3.9  
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024-2026

KODE REK	URAIAN	Proyeksi RPD (Tahun)		
		2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	PENDAPATAN DAERAH	487.323.270.148,00	487.352.320.599,00	487.382.720.599,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.320.091.599,00	17.340.091.599,00	17.370.341.599,00
4.1.1	Pajak Daerah	5.770.000.000,00	5.780.000.000,00	5.780.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	4.114.250.000,00	4.124.250.000,00	4.154.500.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	7.435.841.599,00	7.435.841.599,00	7.435.841.599,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	470.003.178.549,00	470.012.229.000,00	470.012.379.000,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	451.071.629.000,00	451.071.629.000,00	451.071.629.000,00





	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>375.089.167.000,00</b>	<b>375.089.167.000,00</b>	<b>375.089.167.000,00</b>
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10.852.166.000,00	10.852.166.000,00	10.852.166.000,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	364.237.001.000,00	364.237.001.000,00	364.237.001.000,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00
	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dana Desa</b>	<b>75.982.462.000,00</b>	<b>75.982.462.000,00</b>	<b>75.982.462.000,00</b>
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.931.549.549,00	18.940.600.000,00	18.940.750.000,00
	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>18.931.549.549,00</b>	<b>18.940.600.000,00</b>	<b>18.940.750.000,00</b>
	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>487.323.270.148,00</b>	<b>487.382.320.599,00</b>	<b>487.382.720.599,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>303.965.209.886,16</b>	<b>284.192.465.583,19</b>	<b>285.909.138.047,35</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	216.335.988.113	220.453.312.181	208.145.545.616
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.399.485.409,08	45.763.675.199,70	50.763.675.199,70
5.1.5	Belanja Hibah	745.422.956,16	425.167.115,89	425.167.115,89
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	21.711.569.105,35	19.266.983.551,01	21.266.983.551,01
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>72.449.570.573,59</b>	<b>93.600.188.490,25</b>	<b>93.234.997.502,44</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	4.994.722.097,60	5.773.590.460,37	5.773.590.460,37
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.180.623.481,59	20.703.565.553,01	21.703.565.553,01
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.539.400.745,78	34.341.190.167,93	38.648.956.732,62
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.421.861.171,93	25.686.788.129,70	25.686.788.129,70
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.463.580.993,35	6.729.863.191,44	6.729.863.191,44
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>108.908.489.688,25</b>	<b>107.559.666.525,56</b>	<b>106.238.585.049,21</b>
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	873.011.870,53	959.964.006,00	1.055.576.589,42
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	108.035.477.817,72	106.599.702.519,56	105.183.008.459,80
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Koreksi SILPA	0,00	0,00	0,00



	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program sisa tahun pembangunan selama 3 tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan sebagaimana yang dihitung dan disajikan pada bagian awal sub bab ini. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.



## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai faktor yang mempengaruhi permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada masing-masing urusan pemerintahan.

Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

##### **1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar (6 Urusan)**

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial;



## **2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan**

### **Dasar (18 Urusan)**

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan;
18. Kearsipan;

### **3. Urusan Pemerintahan Pilihan (6 Urusan )**

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan;
5. Perindustrian;
6. Transmigrasi;

### **4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;



5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1. Perencanaan;
- 2. Keuangan;
- 3. Kepegawaian;
- 4. Pendidikan dan Pelatihan;
- 5. Penelitian dan Pengembangan;

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

- 1. Inspektorat

7. Unsur Kewilayahan

- 1. Kecamatan

8. Unsur Pemerintahan Umum

- 1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun permasalahan pembangunan berdasarkan urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah diuraikan dalam tabel berikut :

Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan
NO		
(1)	(2)	(3)
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar		
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kualitas kelulusan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan dilihat dari masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah jika dibandingkan dengan angka capaian Provinsi Sulawesi Utara;</li><li>b. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini;</li><li>c. Pelaksanaan pendidikan dasar masih belum optimal;</li><li>d. Masih ada tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidik sesuai standar;</li><li>e. Belum optimalnya akses layanan Pendidikan;</li><li>f. Belum tersedianya Perguruan Tinggi.</li></ul>



2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan Kesehatan bermutu belum sepenuhnya diperoleh masyarakat;</li> <li>b. Masih tingginya kasus <i>stunting</i>, berdasarkan survei status gizi;</li> <li>c. Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi;</li> <li>d. Belum optimalnya implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga;</li> <li>e. Masih banyak penduduk yang belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan;</li> <li>f. Minimnya sarana dan prasarana penunjang bidang kesehatan misalnya UTD dan apotik profesional dan berlisensi;</li> <li>g. Belum optimalnya manajemen perencanaan dan evaluasi program-program peningkatan mutu kesehatan;</li> <li>h. Terbatasnya tenaga medis dan paramedis.</li> </ul>
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih rendahnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;</li> <li>b. Belum optimalnya pengelolaan air limbah;</li> <li>c. Belum optimalnya pengelolaan persampahan;</li> <li>d. Belum semua wilayah bebas banjir;</li> <li>e. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang;</li> <li>f. Belum optimalnya pengembangan Jalan yang menjadi wewenang kabupaten.</li> </ul>
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas perumahan;</li> <li>b. Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni.</li> </ul>
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya upaya penegakan perundang-undangan daerah;</li> </ul>



		b. Belum optimalnya sarana prasarana pemenuhan SPM.
6.	Sosial	a. Belum optimalnya penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); b. Pemberian bantuan sosial untuk kebutuhan dasar PMKS/PPKS masih rendah; c. Belum terintegrasi dan terimplementasikannya target-target pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial; d. Belum optimalnya verifikasi dan validasi DTKS.
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>		
1.	Tenaga Kerja	a. Rendahnya kualifikasi tenaga kerja; b. Tingginya angkatan kerja tidak sebanding dengan partisipasi kerja.
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Belum Optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah; b. Tingginya angka pernikahan dini; c. Tingginya angka kekerasan dan Perceraian.
3.	Pangan	a. Masih rendahnya pemanfaatan pangan.
4.	Pertanahan	a. Masih banyaknya tanah belum bersertifikat.
5.	Lingkungan Hidup	a. Belum optimalnya upaya pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup.
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil	a. Belum optimalnya pelayanan pengadministrasi kependudukan berbasis elektronik.



7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Masih rendahnya ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur penunjang di desa yang menyebabkan desa maju (IDM) sulit untuk dicapai.
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Belum optimalnya upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan program pemerintah dalam pengendalian penduduk.
9.	Perhubungan	a. Masih rendahnya keselamatan berlalu lintas.
10.	Komunikasi dan Informatika	a. Masih rendahnya penerapan SPBE dan e-Government dalam birokrasi dan pelayanan publik.
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	a. Masih rendahnya jumlah koperasi aktif; b. Belum Optimalnya Pengembangan UMKM; c. Terbatasnya akses pembiayaan dan perlindungan usaha bagi UMKM.
12.	Penanaman Modal	a. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan Non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara <i>elektronik</i> . b. Belum optimalnya penerapan OSS
13.	Kepemudaan dan Olahraga	a. Masih rendahnya saran dan prasarana olahraga; b. Minimnya pelaksanaan <i>event</i> olahraga pada tingkatan daerah sebagai sarana penjangkaran atlet berprestasi; c. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.
14.	Statistik	a. Belum optimalnya penerapan single data melalui aplikasi satu data Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
15.	Persandian	a. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan persandian informasi (sandiman)





16.	Kebudayaan	a. Belum optimalnya Pengelolaan dan pelestarian warisan dan cagar budaya daerah .
17.	Perpustakaan	a. Belum tersedianya fasilitas perpustakaan yang memadai; b. Masih rendahnya minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan tergerus oleh perkembangan teknologi informasi.
18.	Kearsipan	a. Masih minimnya SKPD yang mengelola arsip sesuai dengan kaidah kearsipan; b. Jumlah pengelola arsip yang bersertifikasi belum memadai.
<b>Urusan Pilihan</b>		
1.	Kelautan dan Perikanan	a. Keterbatasan sarana prasarana penangkapan ikan dan alat tangkap nelayan; b. Belum tersedianya “rantai dingin”; c. Fluktuasi ketersediaan benih dan masih tingginya harga pakan pabrikan; d. Belum berkembangnya pengolahan pasca panen dan pengolahan produk perikanan budidaya; e. Masih terbatasnya akses permodalan bagi nelayan.
2.	Pariwisata	a. Kurangnya minat wisatawan yang berkunjung untuk berwisata ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; b. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB; c. Kurangnya kompetensi SDM pengelola pariwisata dan kurang optimalnya 3A (amenitas, atraksi, aksesibilitas).
3.	Pertanian	a. Kecenderungan petani padi sawah untuk beralih ke komoditas lainnya yang lebih menjanjikan; b. Terbatasnya tenaga tanam dan panen; c. Masih kurangnya kuota pupuk bersubsidi untuk petani jagung;



		<p>d. Masih rendahnya kapabilitas petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil pertanian;</p> <p>e. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menjadi peternak dan pengelolaan ternak secara mandiri;</p> <p>f. Penurunan Produksi hasil Pertanian</p> <p>g. Stabilitas harga panen produksi pertanian yang belum terjaga, hal ini ditandai dengan anjloknya harga produksi pertanian saat panen raya tiba;</p> <p>h. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi pertanian.</p>
4.	Perdagangan	<p>a. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pasar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen;</p> <p>b. Masih adanya pasar yang belum memenuhi persyaratan;</p> <p>c. Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata.</p>
5.	Perindustrian	<p>a. Masih rendahnya cakupan pembinaan unit usaha IKM;</p> <p>b. Masih rendahnya pembinaan unit usaha IKM di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.</p>
6.	Transmigrasi	<p>a. Belum adanya legalitas kepemilikan lahan transmigrasi.</p>
<b><i>Pendukung Urusan Pemerintahan</i></b>		
1.	Sekretariat Daerah	<p>a. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah;</p> <p>b. Belum optimalnya koordinasi lintas bidang/urusan bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>c. Masih rendahnya capaian indeks reformasi birokrasi.</p>
2.	Sekretariat DPRD	<p>a. Masih minimnya Perda inisiatif.</p>



<b><i>Penunjang Urusan Pemerintahan</i></b>		
1.	Perencanaan	a. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pencapaian pembangunan daerah; b. Belum optimalnya perumusan kebijakan pembangunan daerah. c. Masih rendahnya kapasitas aparatur perencana.
2.	Keuangan	a. Masih tingginya temuan terkait penatausahaan dan pengelolaan BMD; b. Masih rendahnya penggalan potensi pajak dan retribusi daerah.
3.	Kepegawaian	a. Belum Optimalnya Penempatan dan pendayagunaan Pegawai yang sesuai dengan keahlian; b. Kecenderungan peningkatan kebutuhan aparatur tidak berbanding lurus dengan perubahan dan pengembangan struktur pembangunan daerah.
4.	Pendidikan dan Pelatihan	a. Rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal; b. Belum terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai; c. Belum optimalnya pejabat yang telah mengikuti diklatpim (II, III dan IV).
5.	Penelitian dan Pengembangan	a. Rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk bahan pengambilan kebijakan; b. Belum adanya tenaga peneliti di Daerah.
<b><i>Pengawasan Urusan Pemerintahan</i></b>		
1.	Inspektorat	a. Sistem pengendalian internal belum optimal dibuktikan dengan jumlah temuan yang cenderung mengalami fluktuasi; b. Tingkat maturitas dan kapabilitas SPIP belum sesuai dengan harapan; c. Belum seluruhnya objek pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan.



<b>Urusan Kewilayahan</b>		
1.	Kecamatan	<div>a. Belum optimalnya forum koordinasi antar Desa – Kecamatan;</div> <div>b. Masih rendahnya koordinasi dalam rangka pendelegasian kewenangan ke kecamatan.</div>
<b>Urusan Pemerintahan Umum</b>		
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik	<div>a. Masih rendahnya kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan;</div> <div>b. Tingginya potensi konflik politik pra dan pasca pemilu serentak menurut indeks demokrasi Indonesia.</div>



## **4.2. Isu Strategis**

### **4.2.1 Isu Strategis Internasional**

#### **4.2.1.1 Ekonomi Global**

Pandemi yang berjalan lebih dari dua tahun, ditangani dengan cukup baik oleh berbagai negara. Namun, ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, dihadapkan dengan guncangan akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang mencuat sejak akhir Februari tahun 2022. Invasi Rusia ke Ukraina tidak hanya memicu bencana kemanusiaan tetapi juga mengakibatkan perlambatan ekonomi regional serta dampak negatif global yang substansial. Sejak awal triwulan II tahun 2022, negara-negara maju telah memberlakukan sanksi keuangan tambahan terhadap Rusia. Uni Eropa juga melakukan embargo impor batu bara mulai Agustus 2022 mendatang dan embargo minyak lintas laut Rusia mulai tahun 2023. Dampak negatif ini menambah masalah yang sudah ada sebelumnya sejak pandemi seperti gangguan rantai pasokan global dan kenaikan harga komoditas secara signifikan.

Ditengah lonjakan harga komoditas dan gangguan rantai pasok, inflasi yang merebak secara global memberikan situasi sulit bagi para pembuat kebijakan antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan tekanan harga yang semakin kuat. Kondisi keuangan secara global semakin ketat dan biaya pinjaman pun meningkat terutama di pasar negara berkembang, yang mencerminkan berkurangnya akomodasi kebijakan dalam merespons tekanan inflasi, ketidakpastian ekonomi, dan risiko geopolitik yang meningkat.

Inflasi global tertekan akibat permintaan yang menguat, gangguan rantai pasok berkelanjutan, pasar tenaga kerja yang ketat, dan lonjakan harga komoditas. Lonjakan inflasi yang persisten menyebabkan bank sentral di berbagai negara menerapkan pengetatan kebijakan moneter, salah satunya dengan menaikkan suku bunga secara agresif. Meskipun demikian, kebijakan menaikkan suku bunga masih dalam tingkat yang jauh lebih lambat dari



pada inflasi utama karena bank sentral umumnya berusaha untuk membaca situasi dari fluktuasi yang didorong oleh harga komoditas.

Harga komoditas energi baik minyak mentah, gas alam, maupun batu bara meningkat. Peningkatan harga didorong oleh permintaan yang menguat ditengah upaya pemulihan dari pandemi dan gangguan rantai pasok yang masih berlanjut, diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. Invasi tersebut menyebabkan gangguan signifikan terhadap perdagangan dan produksi komoditas energi mengingat Rusia adalah eksportir gas alam terbesar di dunia serta menyumbang kontribusi signifikan dalam ekspor batu bara dan minyak mentah secara global. Kenaikan harga energi berpotensi membebani aktivitas ekonomi global. Harga energi yang tinggi akan mengurangi aktivitas di negara-negara importir energi lewat penurunan pendapatan riil, kenaikan biaya produksi, pengetatan finansial, serta terhambatnya kebijakan makro ekonomi. Sementara itu pada beberapa pasar negara-negara eksportir energi akan diuntungkan lewat harga energi yang tinggi apabila didukung oleh perdagangan yang kondusif, produktivitas, dan investasi yang lebih kuat.

Harga komoditas pertanian bergerak variatif. Harga minyak kelapa sawit sepanjang triwulan II tahun 2022 bergerak melandai tetapi rata-rata harga triwulanannya masih lebih tinggi sebesar 52,2 persen (YoY) pada level USD1.633,6 per metrik ton. Naiknya harga minyak kelapa sawit selain karena pembatasan ekspor di produsen utama Indonesia yang semakin menekan pasokan global, juga dipicu oleh rendahnya output dari Malaysia yang sedang menghadapi kekurangan tenaga kerja. Harga minyak nabati global, termasuk minyak kelapa sawit, menguat sepanjang tahun ini karena invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu pengiriman minyak bunga matahari sehingga pasar beralih ke minyak kelapa sawit dan berdampak kenaikan harga komoditas ini. Namun, pada akhir triwulan II tahun 2022, harga kelapa sawit mulai melandai disebabkan perubahan kebijakan di Indonesia untuk mendorong ekspor dengan mengurangi pungutan. Selain itu, produksi



minyak kelapa sawit di Malaysia mengalami peningkatan ditengah melambatnya permintaan global.

#### **4.2.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)**

SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDGs ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan perogram sebelumnya yaitu MDGs (Millennium Development Goals) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep MGDs sekarang diganti dengan SDGs. Tujuan dan sasaran yang terdapat dalam TPB/SDGs ini diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara- negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). 17 tujuan dalam TPB/SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *No Poverty* / Tidak Ada Kemiskinan : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja;
- 2) *Zero Hunger* / Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) *Good Health and Well Being* / Kesehatan Yang Baik : Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia;



- 4) *Quality Education* / Pendidikan Berkualitas : Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas;
- 5) *Gender Equality* / Kesetaraan Gender : Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan;
- 6) *Clean Water dan Sanitation*/Air Bersih dan Sanitasi : Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang;
- 7) *Affordable and Clean Energy*/Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang;
- 8) *Decent Work and Economic Growth*/Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi : Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang;
- 9) *Industry, Innovation and Infrastructure*/Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi;
- 10) *Reduced Inequality*/Berkurangnya Ketidaksetaraan : Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara;
- 11) *Sustainable Cities and Communities*/Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh;
- 12) *Responsible Consumption and Production*/Pemakaian Yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.
- 13) *Climate Action* / Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
- 14) *Life Below Water* / Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya;





- 15) *Life on Land* / Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keanekaragaman hayati;
- 16) *Peace and Justice Strong Institutions* / Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata;
- 17) *Partnerships for The Goals* / Kemitraan untuk Tujuan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan

#### **4.2.1.3 Konvensi Global Perubahan Iklim**

*United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) merupakan sebuah perjanjian internasional tentang lingkungan, secara khusus menyangkut perubahan iklim. Tujuannya menyasar usaha stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai pada level yang akan mencegah intervensi manusia yang membahayakan dengan sistem iklim bumi. Level tersebut haruslah dicapai dalam rentang waktu yang cukup untuk membiarkan ekosistem beradaptasi secara natural terhadap perubahan iklim, untuk menjamin bahwa produksi pangan tidak terancam, dan untuk memberdayakan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mengusung keseimbangan pilar-pilar keberlanjutan (*sustainability pillars*): ekonomi, lingkungan dan sosial, maka Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan rendah karbon (PRK) - *Low Carbon Development Indonesia* (LCDI). LCDI merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan beremisi gas rumah kaca (GRK) rendah dan meminimalkan eksploitasi



sumber daya alam (SDA). dan untuk itu Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan PRK-LCDI ke dalam RPJMN 2020-2024. Sulawesi Utara sejak tahun 2016 telah menjadi percontohan pembangunan rendah karbon di Kawasan Masyarakat Ekonomi Asia Pasifik - Asia Pacific Economy Community (APEC) Energy Working Group (EWG) dikenal dengan Low Carbon Model Town (LCMT) yaitu Kota Model Rendah Karbon di Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

#### **4.2.1.4 Industri 4.0**

Industri 4.0 mencakup seluruh mata rantai dari produsen ke pengguna dan semua fungsi dan jasa suatu bisnis. Tujuannya adalah menghasilkan produk cerdas yang melampaui proses manufaktur dan menjangkau semua data sepanjang masa berlakunya. Industri 4.0 adalah spesialisasi *internet of things* yang diaplikasikan dalam lingkungan industri manufaktur. Industri ini akan mengarah ke proses koleksi data yang masif dan keamanan digital. Sembilan pilar Industri 4.0 mencakup *big data* dan analisis data, utilisasi robot, simulasi, sistem terintegrasi, *internet of things*, keamanan digital dan sistem siber-fisik, *cloud*, proses manufaktur aditif, realitas berimbuah. Industri 4.0 ini secara global kemudian diseimbangkan dengan *society 5.0* yang menjamin peran yang berkelanjutan dari manusia dalam perkembangan industri global. *Society 5.0* juga menjamin tujuan akhir pengembangan industri terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan global.

#### **4.2.2 Isu Strategis Nasional**

##### **4.2.2.1 Perekonomian Nasional**

Perekonomian Indonesia pada triwulan II tahun 2022 terus menunjukkan pemulihan dan semakin menguat, yang tumbuh sebesar 5,4 persen (*YoY*). Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen tumbuh positif kecuali konsumsi pemerintah yang masih berkontraksi. Pertumbuhan tersebut



didorong oleh kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Meningkatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan adanya momen Ramadhan dan hari raya Idul Fitri pada triwulan II tahun 2022, didorong oleh peningkatan aktivitas belanja kelompok masyarakat. Sementara dari sisi produksi, seluruh sektor tumbuh positif kecuali sektor Administrasi Pemerintahan dan Jasa Pendidikan yang masih berkontraksi. Dari mayoritas sektor yang tumbuh positif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan yang dipengaruhi oleh momen liburan dan hari raya Idul Fitri, serta adanya pelonggaran kebijakan syarat perjalanan.

Perkembangan kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga dengan peningkatan signifikan pada pendapatan negara, dan belanja negara yang juga menunjukkan peningkatan. Pendapatan negara dan hibah meningkat 48,5 persen (YoY) menjadi sebesar Rp 1.317,2 triliun atau mencapai 58,1 persen dari pagu APBN 2022. Kinerja tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan, PNPB dan hibah. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.243,6 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 38,1 persen dari APBN sementara TKDD mencapai 45,6 persen. Realisasi TKDD pada triwulan II tahun 2022 lebih rendah 1,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh kontraksi yang terjadi pada realisasi DBH, DAK Nonfisik, dan DID akibat keterlambatan rekomendasi penyaluran sehingga menurunkan kinerja penyaluran. Berdasarkan capaian tersebut, surplus anggaran hingga Juni 2022 sebesar Rp. 73,6 triliun atau sekitar 0,4 persen terhadap PDB. Dengan perkembangan tersebut, posisi utang pemerintah mencapai Rp7.123,6 triliun atau sebesar 39,6 persen terhadap PDB.

Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat 3,50 persen hingga triwulan II tahun 2022 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas nilai tukar ditengah tingginya ketidakpastian pasar global. Normalisasi likuiditas domestik berlanjut



melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) dan pemberian insentif GWM dengan tetap menjaga ketersediaan likuiditas dan intermediasi perbankan. Selain itu, Bank Indonesia juga melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional. Rata-rata nilai tukar Rupiah pada triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 14.549 per USD, melemah 1,13 persen (YoY) yang dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan di pasar keuangan global, seiring dengan gejolak inflasi. Sementara itu, inflasi domestik menunjukkan peningkatan melampaui sasaran inflasi 2022.

Neraca Pembayaran Indonesia mengalami surplus sebesar USD2,4 miliar, didorong oleh peningkatan signifikan surplus transaksi berjalan serta rendahnya defisit transaksi modal dan finansial. Surplus transaksi berjalan setara 1,1 persen dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan nonmigas yang melampaui peningkatan defisit neraca pendapatan primer, defisit neraca jasa, dan defisit neraca perdagangan migas. Sementara itu, neraca perdagangan barang mengalami surplus USD16,8 miliar yang disebabkan oleh perbaikan surplus neraca perdagangan nonmigas, ditengah defisit neraca perdagangan minyak yang cenderung melebar serta surplus neraca perdagangan gas yang menurun. Neraca transaksi modal dan finansial mengalami perbaikan defisit yang setara dengan 0,3 persen PDB, lebih rendah dari kinerja triwulan sebelumnya. Perbaikan defisit transaksi modal dan finansial tersebut didorong oleh investasi langsung yang masih surplus dan penurunan defisit investasi portofolio di tengah kenaikan defisit investasi lainnya.

Perekonomian Indonesia diperkirakan mampu melanjutkan pemulihan ekonomi di tengah tekanan inflasi global dan perlambatan ekonomi beberapa negara pada keseluruhan tahun 2022. Indonesia harus mewaspadai risiko dan dampak yang ditimbulkan seperti ketegangan geopolitik yang masih meningkat, pengetatan kebijakan moneter global, dan kenaikan harga komoditas. Banyak negara telah menunjukkan perlambatan



perkembangan ekonomi dan peningkatan tekanan inflasi sehingga mengindikasikan bahwa semakin kuat dan dekat pada risiko stagflasi. Namun, kondisi tersebut tidak terlihat pada kondisi perekonomian domestik. Fenomena *windfall* memungkinkan pemerintah untuk memperluas stimulus fiskal dengan tetap fokus utama pada proses pemulihan. Secara keseluruhan, PDB diperkirakan akan tumbuh secara kuat pada kisaran 5,0- 5,5 persen pada tahun 2022.

#### **4.2.2.2 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

Tutupan hutan Indonesia cenderung selalu mengalami pengurangan setiap tahunnya. Rata-rata laju deforestasi yang terjadi pada tahun 1990-2017 mencapai 1 juta hektar pertahun. Meskipun laju deforestasi turun hingga menjadi 480 ribu hektar di tahun 2017, namun tanpa kendali yang berarti, pengurangan tutupan hutan akan terus terjadi akibat tekanan pembangunan.

Tutupan hutan diperkirakan berkurang dari 50 persen luas lahan total Indonesia di tahun 2017 menjadi sekitar 45 persen di tahun 2045. Penurunan tutupan hutan akan semakin memicu terjadinya kelangkaan air, khususnya pada wilayah dengan tutupan hutan sangat rendah, seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Berkurangnya tutupan hutan juga memicu penyusutan luas habitat spesies langka di sebelah barat garis Wallace dari 80,3 persen di tahun 2000 menjadi 49,7 persen di tahun 2045. Kondisi yang sama diperkirakan akan terjadi di sebelah timur garis Wallace khususnya wilayah Papua. Hal ini antara lain didorong oleh peningkatan luas perkebunan monokultur khususnya kelapa sawit yang semakin menekan tutupan hutan dan dapat mengakibatkan peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati apabila tidak segera dilakukan penanganan.

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi mempunyai peluang besar untuk mengembangkan produk dari keragaman hayatinya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui kegiatan



bioprospekting dapat memenuhi kebutuhan bahan baku obat, sandang, pangan, rempah, pakan ternak, penghasil resin, pewarna dan lain-lain. LIPI (2014) mencatat sebanyak 410 spesies mikroba telah diketahui berdasarkan data koleksi mikroba pada berbagai koleksi jaringan Indonesia dan hasil penelitian eksplorasi bioprospeksi.

Selain itu, hasil pengujian spons dan makroalgae menunjukkan potensi sebagai antitumor, antioksidan, antikanker dan antibakteri. Di samping itu, diversifikasi produk primer tumbuhan obat menjadi produk sekunder memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi. Walaupun cadangan air nasional secara keseluruhan masih dalam kategori aman, namun masih terdapat permasalahan dalam hal aksesibilitas, kontinuitas, dan juga kualitas yang belum memenuhi standar. Proporsi luas wilayah krisis air secara nasional diproyeksikan akan meningkat dari 6,0 persen di tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045. Hal ini akibat ketidakseimbangan neraca air akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang semakin kritis serta eksplorasi air tanah yang berlebihan terutama di daerah perkotaan.

Beberapa wilayah seperti Pulau Jawa yang nilai ketersediaan air per kapitanya sudah berstatus langka, dan Bali-Nusa Tenggara yang berstatus tertekan membutuhkan perhatian khusus.

Kualitas air diperkirakan terus menurun signifikan akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang kritis dan pencemaran air yang berasal dari permukiman, industri, pertanian serta kegiatan pertambangan. Kajian Bappenas (2018) menunjukkan kandungan *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) rata-rata (mg/L) secara nasional diproyeksikan meningkat 1,1 kali lipat di tahun 2024 dan 1,2 kali di tahun 2030 dibandingkan kondisi tahun 2020. Walaupun proyeksi nilai BOD dan COD tersebut belum melampaui standar baku mutu, namun nilai rata-rata BOD sudah mendekati ambang batas sehingga perlu diperhatikan.

Daya tampung lingkungan hidup juga semakin merosot akibat tingginya pencemaran dan upaya penanganannya yang belum optimal.



Beberapa sumber pencemar yang perlu menjadi prioritas penanganan antara lain adalah sampah rumah tangga, sampah plastic dan limbah B3.

Pada tahun 2018, tingkat keberhasilan penanganan sampah nasional baru mencapai 68,8 persen dari total timbunan sampah yang dihasilkan sebesar 65,8 juta ton, sementara tingkat pengurangan sampah hanya mencapai 2,8 persen. Sebagai dampaknya, terdapat timbunan sampah yang tidak tertangani sebesar 28,4 persen atau sekitar 18,7 juta ton yang dibuang langsung ke lingkungan (leakage) dan menimbulkan pencemaran. Dari timbunan sampah yang tidak tertangani tersebut, sekitar 0,7 juta ton/tahun terbawa hingga ke laut, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan sampah plastik. Selain menimbulkan pencemaran lingkungan, pencemaran sampah plastik juga mengakibatkan gangguan serius bagi kehidupan biota laut. Semakin banyak kejadian penyu, burung laut, hingga mamalia laut mati akibat menelan sampah plastik. Selain itu, kandungan mikroplastik yang semula terakumulasi pada air dan tubuh hewan laut kini ditemukan juga di tubuh manusia sehingga diprediksi akan menimbulkan dampak dan masalah kesehatan di kemudian hari.

Kondisi tersebut disebabkan sistem pengelolaan sampah secara nasional yang masih belum optimal, baik dari sisi infrastruktur, sarana prasarana penunjang, retribusi pengelolaan sampah, kapasitas SDM, kelembagaan, maupun penegakan hukumnya. Untuk itulah diperlukan sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai ke hilir menuju ekonomi sirkular.

Isu Limbah B3 dan Limbah Medis juga perlu menjadi prioritas penanganan secara nasional. Pada tahun 2018, jumlah timbunan limbah B3 dari RS adalah 294,7 ton/hari sementara jumlah rumah sakit yang memiliki izin pengolahan limbah B3 adalah sebanyak 69 rumah sakit dengan kapasitas pengolahan 54,2 ton/hari dan jumlah jasa pengolah limbah medis (pihak ketiga) berizin: 6 jasa dengan kapasitas 115,7 ton/hari. Mengacu kepada data tersebut, diperkirakan terdapat 41.9 persen limbah B3 medis yang belum



terkelola dan berpotensi terbuang langsung ke lingkungan atau ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.

Tingginya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak lepas dari masih maraknya pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup; seperti illegal logging, pembakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa ijin, tumpahan minyak di laut, kerusakan terumbu karang, penguasaan hutan non-prosedural, dan pencemaran limbah B3. Bahkan kawasan konservasi dan perlindungan juga tidak luput dari maraknya tindak kejahatan, seperti perambahan, illegal logging, penggunaan kawasan hutan, dan kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).

#### **4.2.2.3 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Standar Pelayanan Minimal adalah sebuah kebijakan publik yang mengatur mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sebagai sebuah kebijakan, standar pelayanan minimal sudah selayaknya didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri terkait. Target capaian SPM yang harus dicapai setiap tahunnya adalah 100%. Hal ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah untuk mewujudkannya. SPM melekat pada 6 urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1) Pendidikan.

Jenis Pelayanan SPM yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten meliputi:

- a) Pendidikan Dasar, dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs);
- b) Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan;





- c) Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

2) Kesehatan.

Jenis pelayanan SPM yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, dengan indikator Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dengan indikator Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, dengan indikator Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan;
- d. Pelayanan kesehatan balita, dengan indikator Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, dengan indikator Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif, dengan indikator Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, dengan indikator Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, dengan indikator Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, dengan indikator Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, dengan indikator Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan;



- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dengan indikator Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan Kesehatan;
  - l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan, dengan indikator Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- Jenis Pelayanan SPM yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten meliputi:
- a) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - b) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.
- 4) Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman
- Jenis Pelayanan SPM yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten meliputi:
- a) Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota, dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
  - b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.
- 5) Ketenteraman rakyat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.



Jenis Pelayanan SPM yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten meliputi:

- a) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara;
- b) Pelayanan informasi rawan bencana, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
- c) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran

6) Sosial

Jenis Pelayanan SPM yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten meliputi:

- a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, dengan indikator Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti;
- b) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, dengan indikator Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti;
- c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, dengan indikator Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti;
- d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dengan indikator Jumlah Warga Negara/



gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti;

- e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota, dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

#### **4.2.2.4 Implementasi Program Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya Grand Design Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga berupaya melakukan implementasi berbagai program dan upaya untuk perkembangan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, antara lain :

1. Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi ;
2. Deregulasi Kebijakan;
3. Penyederhanaan Organisasi;
4. Perbaikan Tata Laksana;
5. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur;
6. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran;
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

#### **4.2.2.5 Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi**

Pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan peran dalam



pengembangan industri berbasis sumber daya alam tambang. Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Sulawesi akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Proyek Prioritas Strategis (Major Project); (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (4) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

#### 1. Proyek Prioritas Strategis (Major Project)

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (*Major Project*) di wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Manado - Likupang dan (b) Wakatobi;
- 2) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional; 3) Pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar;
- 3) Pemulihan Pasca Bencana Kota Palu dan sekitarnya;
- 4) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar;
- 5) Pembangunan KA Makasar-Parepare;
- 7) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: (a) Bitung dan (b) Makassar;
- 8) Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kuwil Kawangkoan dan (b) Lolak;
- 9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a) Pulau Buton dan (b) Pulau Muna;
- 10) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sulawesi Selatan; dan;
- 11) Pembangunan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sulawesi Selatan

#### 2. Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:



- 1) Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang difokuskan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan/atau Kawasan Industri (KI) antara lain KEK/KI Palu, KEK Bitung, dan KI Takalar;
- 2) Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain DPP Manado-Likupang/KEK Likupang, DPP Baru Toraja-Makassar-Selayar, dan DPP Wakatobi;
- 3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi melalui pembangunan Jalan Trans Sulawesi dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain: Jalan Lintas Gorontalo, Jalan Trans Sulawesi, Tol Manado Bitung, Jalan Lintas Tengah dan Tenggara Sulawesi, Jalan Trans/Lingkar Pulau Buton, Jalan Trans/Lingkar Pulau Muna, Jalan Lingkar P. Wangi-Wangi (Wakatobi), Jalan Akses Wisata Likupang, KA Makassar Parepare, Rekonstruksi Pelabuhan Wani, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Pengembangan Bandara Pahuwato, Bandara Boloang Mangondow, Pengembangan Bandara Banggal Laut, Bandara Bumbu Kunik, dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Metropolitan Makassar;
- 4) Pengembangan pusat perdagangan pelabuhan hub Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Makassar;
- 5) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- 6) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja:
  - a) Pengembangan 325 SMK di wilayah Sulawesi yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata,



seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan;

- b) Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 26 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Manufaktur di Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kimia dan Otomotif di Sulawesi Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian;
- c) Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 42 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki; dan
- d) Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Sulawesi.

3. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut

- 1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana di 3 kabupaten tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga kabupaten tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah berada pada koridor kewilayahan, antara lain: Sigi dan Donggala berada pada koridor pemerataan, sedangkan Tojo Una-Una berada pada koridor pertumbuhan;
- 2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Sulawesi berlokasi di 15 kabupaten berikut,



antara lain: Bolaang Mongondow Utara, Gorontalo Utara, dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo; Polewali Mandar, dan Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat; Jenepono di Provinsi Sulawesi Selatan; Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Morowali Utara, Parigi Moutong, dan Toli-toli di Provinsi Sulawesi Tengah; serta Bombana, Konawe, dan Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara;

- 3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 14 kecamatan lokpri di Provinsi Sulawesi Utara, 3 kecamatan lokpri di Provinsi Sulawesi Tengah, dan 1 kecamatan lokpri di Provinsi Gorontalo;
- 4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane;
- 5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Buol, KPPN Poso, KPPN Mamuju, KPPN Pinrang, KPPN Morowali, KPPN Mamuju Tengah, KPPN Konawe Selatan, KPPN Wakatobi, KPPN Muna, KPPN Barru, KPPN Luwu Timur, KPPN Bone, KPPN Minahasa





Utara, KPPN Gorontalo, KPPN Bolaang Mongondow Utara, KPPN Gorontalo;

- 7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Transmigrasi Wakorumba-Maligano/Mutiara di Kabupaten Muna, Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa di Kabupaten Konawe, Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah, Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Mamuju Utara/Pasang Kayu, Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampolore - Pamona Timur di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo UnaUna, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong, Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten Gorontalo, serta Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, 11 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, 4 Kabupaten di Provinsi Gorontalo, dan 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi pada tahun 2023. Khusus Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan mencapai eliminasi penyakit



Schistosomiasis pada tahun 2024 dengan lokasi fokus di 28 Desa di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi; dan

- 9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 5,65 persen di Provinsi Sulawesi Utara, 11,26 persen di Provinsi Sulawesi Tengah, 8,7 persen di Provinsi Sulawesi Tenggara, 13,26 persen di Provinsi Gorontalo, 8 persen di Provinsi Sulawesi Barat, dan 6,91 persen di Provinsi Sulawesi Selatan;
  - 10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
    - a. Peningkatan ketahanan wilayah utara Pulau Sulawesi;
    - b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
    - c. Peningkatan konservasi hutan;
    - d. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan; dan
    - e. Pemantapan pemulihan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya.
4. Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:
- 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
  - 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;
  - 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;



- 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- 9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
- 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
- 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Banggai Laut) dan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Minahasa Utara);
- 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi: Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Bolaang Mongondow), Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kepulauan Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana), Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju) dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Jeneponto);
- 13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:



- a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
  - b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
  - c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
  - d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
  - f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
  - g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
  - h. Pembentukan bank tanah;
  - i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
  - j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
- 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
- a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
  - b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
  - c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana.
- 15) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, meliputi:
- a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan;
  - b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
  - c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
  - d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;



- e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
- f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
- g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
- i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; dan
- j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air.

#### **4.2.2.6 Isu dan Tantangan Dalam RPJMN Tahun 2020-2024**

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara hirarki memiliki kewajiban mendukung pencapaian agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, isu dan tantangan berdasarkan agenda pembangunan nasional dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas,  
Isu strategis meliputi :
  - 1) Keberlanjutan Sumber Daya Alam;
  - 2) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi;
  - 3) Transformasi Struktural Berjalan Lambat;
  - 4) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,  
Isu strategis meliputi :
  - 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;



- 2) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk;
  - 3) Pemenuhan Layanan Dasar;
  - 4) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
  - 5) Pengentasan Kemiskinan;
  - 6) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.
- d. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa, Isu strategis Meliputi :
- 1) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa;
  - 2) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia;
  - 3) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Ajaran Agama;
  - 4) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan;
  - 5) Belum Optimalnya Peran Keluarga;
  - 6) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas;
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Isu strategis meliputi :
- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar
    - a) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
    - b) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
    - c) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
    - d) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
    - e) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur;
    - f) Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi.
  - 2) Infrastruktur Ekonomi
    - a) Konektivitas Jalan
    - b) Konektivitas kereta api
    - c) Konektivitas Laut
    - d) Konektivitas Udarat
    - e) Konektivitas Darat



- 3) Energi dan kelistrikan
  - a) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
  - b) Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan;
  - c) Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan
- f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Isu strategis meliputi :
  - 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
  - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.
  - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
- g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik  
Isu Strategis meliputi :
  - 1) Konsolidasi Demokrasi.
  - 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri.
  - 3) Penegakan Hukum Nasional.
  - 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola .
  - 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

#### **4.2.3 Isu Strategis Provinsi**

##### **4.2.3.1 Isu Strategis Provinsi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026**

Sebagai bagian dari wilayah provinsi Sulawesi utara, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki kewajiban untuk mendukung penanganan isu strategis Provinsi Sulawesi utara. Isu strategis daerah Provinsi Sulawesi Utara yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

- a) Perwujudan Sulut sebagai Super Hub di Indonesia Timur;
- b) Pengembangan kawasan perbatasan dan kepulauan;
- c) Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- d) Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- e) Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja;
- f) Peningkatan daya saing dan kemudahan berinvestasi;



- g) Perwujudan kedaulatan pangan, pembangunan Food Estate, dan penguatan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h) Optimalisasi sumberdaya perikanan dan kemaritiman serta pemanfaatan yang berkelanjutan;
- i) Optimalisasi pendapatan daerah;
- j) Pemerataan infrastruktur, sanitasi dan air minum layak;
- k) Peningkatan moda transportasi dari pusat-pusat produksi;
- l) Penguatan kepariwisataan terutama Manado – Likupang yang menjadi bagian dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan penetapan KEK Pariwisata Likupang;
- m) Peningkatan industri dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi;
- n) Perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- o) Optimalisasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- p) Transformasi energi terpadu dan berkelanjutan;
- q) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- r) Perencanaan pembangunan rendah karbon/Low Carbon Development Indonesia (LCDI);
- s) Transformasi Digital;
- t) Peningkatan pemajuan kebudayaan dan pelestarian nilai budaya.

#### **4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

##### **4.2.4.1 Telahaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten**

##### **Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025**

RPD tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari tahapan pelaksanaan RPJPD Bolaang Mongondow Utara tahun 2005-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2005-2025 sudah dirumuskan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan tahun 2025. Adapun visi pembangunan Bolaang Mongondow Utara adalah “ **Mewujudkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis,**





**Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkeadilan".** Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2005-2025 yakni :

1. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik;
3. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata;
4. Mewujudkan budaya yang berperadaban;
5. Mewujudkan Struktur perekonomian yang handal dan berdaya saing;
6. Meningkatkan fungsi sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten tersebut diatas, maka diperlukan nilai-nilai dasar (*basic value*) yang harus dimiliki oleh setiap pelaku pembangunan dan berpegang teguh pada nilai – nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh seluruh elemen masyarakat . Nilai – nilai kearifan lokal yang dimaksud adalah yaitu " **Mopopiana, Mototaviana, Agu Mononantobana**" yang artinya **Saling Berbaikan ,Saling Menyayangi dan Saling Mengingatkan.**



Tabel 4.1 Misi, Sasaran Pokok, Indikator Pencapaian dan Arah Kebijakan RPJPD  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
<b>Misi 1. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas</b>	Sasaran 1. Peningkatan mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendorong tercapainya pendidikan dasar, menengah dan tinggi</li><li>2. Pengembangan peran, kualitas serta pemerataan institusi aparatur institusi pendidikan (tenaga pengajar/pendidik)</li><li>3. Peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar/pendidik</li><li>4. Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang bermutu dan merata</li><li>5. Peningkatan sistem evaluasi yang komprehensif dan akuntabel untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas</li><li>6. Pemenuhan tuntunan anggaran dan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan berbagai elemen</li><li>7. Memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu dan berprestasi</li></ol>
	Sasaran 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat serta menerapkan pola hidup sehat;</li><li>2. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas;</li></ol>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Mengadakan dan meningkatkan distribusi tenaga medis dan obat-obatan bermutu, efektif dan aman dengan harga yang terjangkau;</li> <li>4. Pengembangan instalasi dan fasilitas kesehatan yang memadai;</li> <li>5. Menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta peningkatan usia harapan hidup;</li> <li>6. Mendorong pemenuhan kebutuhan asupan gizi masyarakat;</li> <li>7. Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.</li> </ul>
	Sasaran 3. Peningkatan peran pemuda dan perempuan di seluruh bidang pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong minat dan bakat berorganisasi dan berolahraga di kalangan kepemudaan;</li> <li>2. Memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan fisik maupun psikis.</li> </ul>
	Sasaran 4. Peningkatan kualitas ketenaga kerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong peningkatan kompetensi dan daya saing pencari kerja;</li> <li>2. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja di setiap sektor ekonomi;</li> <li>3. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja;</li> <li>4. Mendorong kerja sama dengan lembaga ketenaga kerjaan dengan dunia usaha.</li> </ul>



<b>Misi 2. Mewujudkan tata Kelolah pemerintahan yang baik</b>	Sasaran 1. Peningkatan profesionalisme dan manajemen pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan birokrasi pemerintahan;</li> <li>2. Peningkatan kinerja pelayanan publik;</li> <li>3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik;</li> <li>4. Mendorong peningkatan kualitas aparatur;</li> <li>5. Penerapan teknologi informasi dalam menunjang kerja-kerja pemerintahan.</li> </ol>
	Sasaran 2. Perencanaan pembangunan yang handal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan forum SKPD sebagai ruang untuk curah pendapat dan saran sekaligus koordinasi;</li> <li>2. Mengoptimalkan peran BAPPEDA sebagai lembaga perencana dan lembaga riset;</li> <li>3. Mengirim tenaga teknis PNS untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang S3;</li> <li>4. Memfasilitasi staf perencana di SKPD terkait untuk dilatih tata cara pembuatan renstra.</li> </ol>
<b>Misi 3. Mewujudkan Pembangunan yang berkualitas dan merata</b>	Sasaran 1. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur daerah.</li> </ol>
	Sasaran 2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;</li> </ol>



		2. Merencanakan pembangunan secara komprehensif dan sistematis.
	Sasaran 3. Peningkatan pemerataan pembangunan	1. Mendorong laju pertumbuhan infrastruktur daerah; 2. Mempercepat pembangunan di daerah-daerah tertinggal; 3. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan.
	Sasaran 4. Peningkatan sarana dan pra sarana pemukiman	1. Menciptakan lingkungan hunian yang asri; 2. Menciptakan ruang bersosialisasi bagi masyarakat seperti pembangunan taman kota; 3. Menciptakan sistem drainase perkotaan yang bisa menanggulangi banjir.
	Sasaran 5. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	1. Membangun terminal dengan fasilitas yang memadai; 2. Membangun fasilitas pelabuhan laut yang bertaraf internasional; 3. Mempermudah pengurusan izin trayek angkutan umum.
<b>Misi 4. Mewujudkan budaya yang berperadaban</b>	Sasaran 1. Menjadikan nilai-nilai budaya, agama dan kepercayaan sebagai pilar pembangunan	1. Melestarikan kebudayaan lokal dan menyaring masuknya budaya asing; 2. Membangun karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya; 3. Menciptakan dan mendorong kerukunan antar umat beragama; 4. Menciptakan stabilitas keamanan.



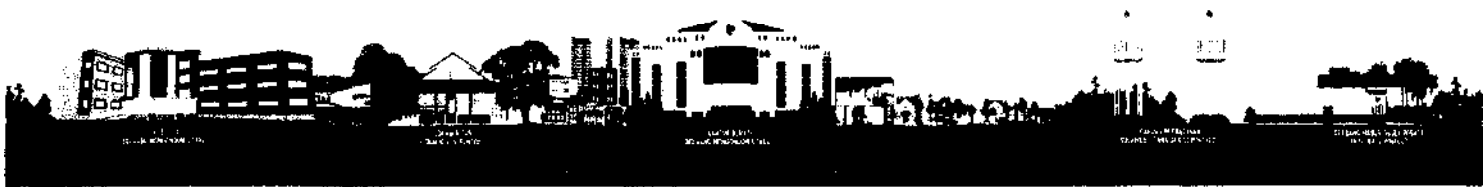
		5. Mendorong terciptanya pembangunan yang mengakomodir unsur kearifan lokal.
	Sasaran 2. Memelihara kelestarian kesenian tradisional dan situs-situs sejarah	1. Mendorong perkembangan kesenian tradisional; 2. Merawat dan melindungi situs-situs peninggalan bersejarah Mendorong perkembangan wisata pendidikan, sejarah dan budaya.
<b>Misi 5. Mewujudkan struktur perekonomian yang handal dan berdaya saing</b>	Sasaran 1. Peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah	1. Mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi kerakyatan; 2. Memperkuat kompetensi kewirausahaan; 3. Memberikan kemudahan dan jaminan terhadap akses penanaman modal; 4. Memberikan jaminan perlindungan usaha bagi pelaku ekonomi kecil; 5. Mendorong dan Meningkatkan kualitas produk.
	Sasaran 2. Berkembangnya dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah	1. Mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral; 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja berbasis sektor; 3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Mendorong dan mendukung penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dalam pengelolaan potensi SDA.



	Sasaran 2. Berkembangnya dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas ketenaga kerjaan berbasis sektor;</li> <li>3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Mendorong dan mendukung penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dalam pengolahan potensi SDA.</li> </ol>
	Sasaran 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong terwujudnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasam investasi;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal;</li> <li>3. Mempermudah proses pengurusan ijin usaha tanpa mengabaikan peraturan yang berlaku;</li> <li>4. Meningkatkan kerjasama investasi dan perdagangan.</li> </ol>
	Sasaran 4. Peningkatan peran lembaga ekonomi/keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong tumbuhnya lembaga-embaga keuangan mikro;</li> <li>2. Menjadikan para pelaku ekonomi sebagai mitra.</li> </ol>
Misi 6. Meningkatkan fungsi sumber daya	Sasaran 1. Peningkatan pemanfaatan SDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pengelolaan SDA dan penggunaan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.</li> </ol>
	Sasaran 2. Peningkatan kualitas lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan lingkungan hunian yang asri dan sehat;</li> </ol>



alam dan kualitas lingkungan		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan berbasis mitigasi;</li> <li>3. Mendorong penerapan regulasi yang kuat untuk perlindungan lingkungan;</li> <li>2. Menetapkan kawasan penting seperti kawasan lindung dan wilayah lahan abadi pertanian untuk menghindari alih fungsi lahan.</li> </ul>
	Sasaran 3. Peningkatan sistem penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat legalisasi RTRWK dan Rencana Detail tata ruang;</li> <li>2. Melakukan sosialisasi RTRWK yang telah di Perdakan kepada masyarakat, sosialisasi tersebut termasuk sosialisasi sanksi hukum.</li> </ul>





Tabel 4.2 Tahapan dan Prioritas RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025

MISI 1. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS					
Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Tahapan			
		2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
1	2	3	4	5	6
1. Peningkatan mutu pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk mendorong tercapainya pendidikan dasar dan penyediaan sarana pendidikan yang bermutu</li></ul>	√			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melanjutkan peningkatan mutu pendidikan dengan mendorong tercapainya pendidikan dasar, penyediaan sarana pendidikan yang bermutu dan peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar/pendidik</li></ul>		√		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan anggaran dan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan berbagai elemen</li></ul>			√	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan mutu pendidikan dengan mengarahkan pada peningkatn sistem evaluasi yang komprehensif dan akuntabel untuk menghasikan lulusan yang berkualitas</li></ul>				√



2. Peningkatan derajat kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan</li> </ul>	√			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melanjutkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta mendorong pemenuhan kebutuhan asupan gizi masyarakat</li> <li>• Peningkatan Sarana dan SDM Kesehatan (Kuantitas dan Kualitas)</li> </ul>		√		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan dengan meningkatkan distribusi tenaga medis dan obat-obatan bermutu, efektif dan aman dengan harga terjangkau</li> </ul>			√	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan menerapkan pola hidup sehat serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas dengan partisipasi aktif masyarakat</li> </ul>				√
3. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dengan mendorong peningkatan kompetensi dan daya saing pencari kerja serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja di tiap sektor ekonomi</li> </ul>	√			



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dengan mendorong peningkatan kompetensi dan daya saing pencari kerja serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja di tiap sektor ekonom</li> <li>• Penjaminan keselamatan tenaga kerja</li> </ul>		√		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dengan mendorong peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja</li> </ul>			√	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas ketenagakerjaan diarahkan pada mendorong kerjasama dengan lembaga ketenaga kerjaan dan dunia usaha</li> </ul>				√
4. Peningkatan peran pemuda dan perempuan diseluruh bidang pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dengan mendorong minat berorganisasi dan olah raga dikalangan pemuda dan perempuan serta memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan fisik maupun psikis</li> <li>• Pemberdayaan Perempuan dan pemuda</li> </ul>		√		



MISI 2. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK					
Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Tahapan			
		2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
1	2	3	4	5	6
1. Peningkatan profesionalisme dan manajemen pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan profesionalisme dan manajemen pemerintahan dengan mendorong penataan birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik yang lebih baik</li> </ul>	√			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan profesionalisme dan manajemen pemerintahan diarahkan melakukan penataan birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik, peningkatan akses pelayanan serta mendorong peningkatan kualitas aparatur</li> </ul>		√		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan profesionalisme dan manajemen pemerintahan dengan mendorong penerapan teknologi informasi dalam menunjang kerja-kerja pemerintahan</li> <li>Menciptakan aparatur yang bersih bebas dari KKN</li> </ul>			√	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas pelayanan publik (mudah, murah, tepat waktu) dengan prinsip enterpreneur</li> </ul>				√



Misi 3. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata					
Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Tahapan			
		2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dengan mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>	√			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dengan mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga infrastruktur daerah</li> <li>Peningkatan kualitas SDM masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan</li> </ul>		√		
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas infrastruktur dengan menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas</li> </ul>	√			
3. Peningkatan pemerataan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dengan menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merencanakan pembangunan secara komprehensif dan sistematis, Dengan memperhatikan potensi dan tata ruang wilayah</li> </ul>		√		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemerataan pembangunan dengan mendorong laju pertumbuhan infrastruktur daerah dan mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah desa tertinggal</li> </ul>			√	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur maupun ekonomi di arahkan pada peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan</li> </ul>				√

MISI 4. MEWUJUDKAN BUDAYA YANG BERPERADABAN					
Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Tahapan			
		2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
1	2	3	4	5	6
1. Menjadikan nilai-nilai budaya, agama dan kepercayaan sebagai pilar pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadikan nilai-nilai budaya, agama dan kepercayaan sebagai pilar pembangunan dengan meestarikan kebudayaan lokal, membangun karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, menciptakan stabilitas keamanan serta mendorong terciptanya pembangunan dan mengakomodir unsur kearifan local</li> </ul>		√		
2. Memelihara kelestarian kesenian radisonal dan situs-situs sejarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelestarian kesenian tradisional dan situ-situs sejarah dengan mendorong perkembangan kesenian tradisional, merawat dan meindungi</li> </ul>		√		



	situs-situs peninggalan sejarah untuk menumbuhkembangkan perkembangan wisata pendidikan, sejarah dan budaya				
	• Mendorong minat dan kreatifitas generasi muda dalam pelestarian nilai-nilai budaya			√	
3. Menjadikan budaya dan kesenian daerah sebagai daya tarik wisata	• Menggiatkan promosi budaya dan kesenian daerah				√

MISI 5. MEWUJUDKAN STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG HANDAL DAN BERDAYASAING					
Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Tahapan			
		2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
1	2	3	4	5	6
1. Berkembangnya dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah	• Berkembangnya dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan dengan mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, energi dan sumberdaya mineral.	√			
	• Berkembangnya dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan dengan mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang			√	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkembangnya dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah berorientasi penerapan teknologi dalam pengolahan potensi SDA</li> </ul>				√
2. Peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas pelaku mikro, kecil dan menengah dengan memperkuat kompetensi kewirausahaan</li> </ul>		√		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah dengan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi kerakyatan serta memberikan kemudahan dan jaminan terhadap akses pendanaan modal usaha</li> </ul>			√	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah di arahkan dapat memberikan jaminan perlindungan usaha bagi pelaku ekonomi mikro, keci dan menengah serta mendorong peningkatan kualitas produk</li> </ul>				√
3. Peningktaan kualitas dan kuantitas penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas dan kuantitas penanaman modal dengan mendorong terwujudnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi serta mempermudah proses perizinan usaha tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku</li> </ul>		√		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas dan kuantitas penanaman modal diarahkan pada meningkatkan kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal</li> </ul>				√





4. Peningkatan peran lembaga ekonomi/keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan peran lembaga ekonomi/keuangan dengan membangun pola kemitraan antar para pelaku ekonomi</li> </ul>			√	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan peran lembaga ekonomi/keuangan diarahkan dengan mendorong tumbuhkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro</li> </ul>				√

MISI 6. MENINGKATKAN FUNGSI SUMBERDAYA ALAM DAN KUALITAS LINGKUNGAN					
Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Tahapan			
		2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
1	2	3	4	5	6
1. Peningkatan pemanfaatan SDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pemanfaatan dengan mendorong pengeolaan SDA dan penggunaan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan</li> </ul>		√		
2. Peningkatan kualitas lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas lingkungan dengan mewujudkan ingkungan hunian yang asri dan sehat</li> </ul>		√		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas lingkungan dengan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan berbasis mitigasi</li> </ul>			√	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas lingkungan di arahkan pada penerapan regulasi yang kuat untuk perlindungan lingkungan</li> <li>• Perlindungan dan pemeliharaan fungsi-fungsi lingkungan hidup</li> </ul>				√
--	--	--	--	--	---



#### **4.2.4.2 Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024-2026 memperhatikan permasalahan pembangunan masing-masing urusan, isu global, isu Nasional dan juga isu regional Provinsi Sulawesi Utara. Rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut :

**1. Sumber Daya Manusia belum kompetitif.**

Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur keberhasilan pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tercatat selang 5 (lima) tahun Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Bolaang Mongondow utara berada pada angka 66,32 poin di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 naik pada posisi 66,91 poin dan di tahun 2020 pada angka 66,99 poin. Selanjutnya di tahun 2021 di angka 67,39 poin dan pada tahun 2022 berada pada angka 68,06 poin. Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun ke tahun cenderung meningkat akan tetapi capaian tersebut masih di bawah dari capaian nilai baik provinsi maupun nasional yang berada pada angka 73,81 poin dan 72,91 poin di tahun 2022.

Kesimpulan isu strategis sumber daya manusia belum kompetitif didasarkan pada beberapa permasalahan daerah yaitu:

- a) kualitas pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan, jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang, masih adanya masyarakat yang belum melek huruf, masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga, masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan serta belum adanya Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



- b) belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh isu tentang kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dan lansia; status gizi masyarakat; keberadaan penyakit tidak menular dan penyakit menular; akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; akses dan kualitas pelayanan KB dan KR; persebaran dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di fasilitas pelayanan kesehatan; promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; pengelolaan BLUD RS dan Puskesmas; advokasi dan KIE serta penguatan kelembagaan KKBPK; serta Pengembangan Rumah Sakit dengan pelayanan berstandar Nasional.
- c) belum optimalnya pelestarian dan pengembangan seni dan kekayaan budaya disebabkan oleh belum optimalnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan lemahnya perlindungan hukum atas kekayaan budaya.

## 2. Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah

Inti dari seluruh proses pemerintahan itu adalah pelayanan publik. Entah berupa jasa publik, barang publik hingga layanan administratif. Semua itu menjadi tanda dari hadirnya negara (*state in practice*) dalam kehidupan masyarakat. Hadirnya pemerintah ini sejatinya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat hingga yang berada di daerah terdalam dan tertinggal di kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Persiapan operasional dan strategi implementasi menjadi krusial dalam mengantisipasi eksistensi perubahan maupun mengeksekusi arah kebijakan. Selain tata perizinan dan segala aspek di hulu yang mewarnai diskursus kebijakan, soal tata kelola layanan usaha dan pengawasan atas pemenuhannya mesti menjadi bagian dari rencana besar guna dipersiapkan sejak sekarang.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 memperoleh nilai 48,70 dengan kategori “C”. Hal ini menjadi catatan bagi pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Utara



kedepan. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dapat ditempuh melalui 8 arah perubahan meliputi Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan Sumber Daya Manusia, Penataan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Untuk menghadapi tantangan global, pelayanan publik diarahkan pada pemanfaatan teknologi yang mutakhir. Pelayanan berbasis elektronik yang mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik menjadi isu strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sedangkan tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 memperoleh nilai 61,97 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil yang baik.

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- a) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, yang disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem informasi manajemen dan belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik.
- b) Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah yang disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah, belum optimalnya kualitas perencanaan, belum optimalnya kinerja pemerintah desa, belum terpenuhinya kebutuhan pegawai dan belum optimalnya implementasi peraturan daerah.
- c) Belum terpenuhinya kebutuhan regulasi untuk penyelenggaraan pemerintahan.



### 3. Tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi belum optimal

Pengembangan ekonomi masyarakat juga harus memperhatikan kondisi sumberdaya/potensi lokal yang ada di masyarakat. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat yaitu penguatan sektor-sektor unggulan penopang perekonomian daerah, penguatan daya tarik investasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan pembangunan dari sektor pedesaan, serta penyediaan sumberdaya tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, dan penguatan jejaring keamanan sosial.

Peningkatan perekonomian juga harus didorong tingkat kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja lokal harus diberdayakan dan ditingkatkan karena dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena kesulitan lapangan kerja dewasa ini maka perlu adanya peningkatan kualitas dibidang keahlian bagi Angkatan kerja melalui pelatihan teknis yang mampu memberikan modal keahlian.

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain:

- a. Rendahnya pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh belum optimalnya produksi pertanian dan perikanan, rendahnya nilai usaha perdagangan dan industri, kurangnya produktivitas KUMKM, penyebaran penyakit hewan menular, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tingginya angka penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan orang tidak mampu, dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Masih belum pulihnya kondisi daerah akibat Pandemi Covid-19.

Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 hingga saat ini telah berdampak pada kelesuan sektor perekonomian



dalam skala nasional. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis dan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Hal tersebut berdampak pada penurunan pendapatan seluruh lapisan masyarakat sehingga berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow utara.

#### 4. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah

Pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan isu strategis nasional yang sangat memperhatikan pembangunan keberlanjutan yang harus dilaksanakan baik di pusat maupun sampai tingkat daerah. Pembangunan berkelanjutan disini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia tanpa mengorbankan aspek lingkungan agar nantinya dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, sarana irigasi, dan sarana perhubungan dipercaya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pembangunan tersebut tentunya harus diiringi dengan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau aturan penataan ruang lainnya yang ada. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang harus berjalan dengan optimal didukung dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas. Selain itu, pembangunan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penataan prasarana dan sarana umum (PSU) untuk mendukung pencapaian target *universal acces*. Tantangan lain yang dihadapi adalah upaya perwujudan lingkungan yang bersih dan rendah polusi, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan pelaksanaan manajemen lingkungan hidup yang optimal, dan juga manajemen risiko bencana yang efektif.



Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

a. Belum optimalnya infrastruktur Kawasan.

Belum optimalnya infrastruktur kawasan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, antara lain :

- Sarana dan prasarana perumahan dan permukiman belum optimal (air minum, limbah, sampah, rumah hunian);
- Sarana dan prasarana gedung belum optimal;
- Sarana dan prasarana jalan belum optimal;
- Sarana dan prasarana sumber daya air belum optimal.

b. Pengelolaan pertanahan dan tata ruang belum optimal.

Pengelolaan pertanahan dan tata ruang belum optimal merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, antara lain :

- Belum ada RDTR yang ditetapkan, RTRW belum mengakomodir dinamika pembangunan, belum semua RTBL ditetapkan;
- Pengelolaan pertanahan belum optimal;
- Pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannya.

c. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah.

Belum optimalnya konektivitas antar kawasan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, antara lain :

- Topografi beragam (pesisir, dataran, perbukitan, pegunungan) ;
- Kondisi jalan yang kurang baik;
- Pelayanan transportasi belum optimal.

d. Risiko bencana tinggi.

Risiko Bencana Tinggi merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, antara lain :





- Kondisi Topografi kelerengan tinggi, struktur geologi tidak masif dan hidrologi dengan curah hujan tinggi dan permeabilitas rendah;
- Banyak warga masyarakat tinggal di daerah rawan bencana  
Kapasitas sumber daya menghadapi bencana belum optimal;



Tabel 4.3 Perumusan Isu Strategis RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026

PERUMUSAN ISU STRATEGIS					
Isu SDGs	Isu SPM	Isu Strategis dalam RPJMN 2020-2024	Isu Strategis dalam RPJMD Prov. Sulut 2021-2026	Isu Strategis RPJPD Kab. Bolmut 2005-2025	Rumusan Isu Strategis RPD Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026
✓ Daya saing daerah ✓ Kualitas SDM ✓ Pemenuhan hak yang sama atas pelayanan dasar	• Pemenuhan SPM urusan pendidikan • Pemenuhan SPM urusan sosial • Pemenuhan SPM urusan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan</li><li>• Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk</li><li>• Pemenuhan Layanan Dasar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penurunan kemiskinan dan pengangguran</li><li>• Peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan</li><li>• Peningkatan pemajuan kebudayaan dan pelestarian nilai budaya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rendahnya kualitas manusia dilihat dari indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli</li><li>• Berkurangnya fungsi nilai/norma sosial-budaya dan kearifan lokal dalam mengaktualisasikan identitas tatanan</li></ul>	Peningkatan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berbudaya



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan pemuda</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Akuntabilitas kelembagaan</li> <li>✓ Keadilan yang merata</li> <li>✓ Akses ketersediaan data</li> <li>✓ Administrasi kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat Stabilitas</li> <li>• Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.</li> <li>• Konsolidasi Demokrasi</li> <li>• Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri</li> <li>• Penegakan Hukum Nasional</li> <li>• Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola</li> <li>• Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.</li> <li>• Transformasi Digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan</li> <li>• Belum optimalnya perwujudan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</li> <li>• Pelayanan umum kepada masyarakat belum didukung dengan baik oleh operasionalisasi sistem, teknologi dan personil dengan kualifikasi yang memadai</li> </ul>	Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani



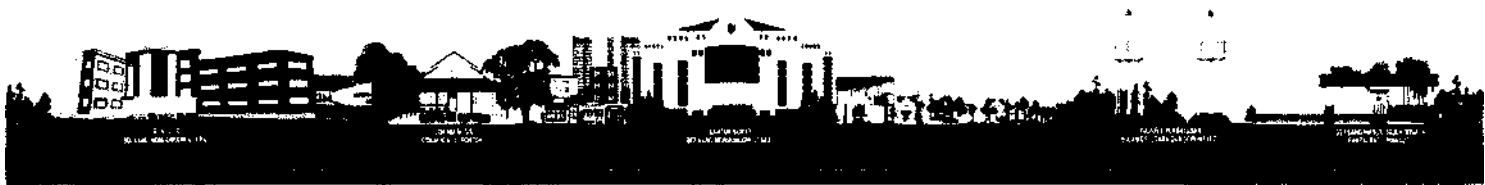
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ketahanan pangan</li> <li>✓ Kualitas dan pelayanan kesehatan</li> <li>✓ Kualitas dan pelayanan pendidikan</li> <li>✓ Kesetaraan gender</li> <li>✓ Kemiskinan</li> </ul>		<p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Isu strategis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keberlanjutan Sumber Daya Alam</li> <li>• Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi</li> <li>• Transformasi Struktural Berjalan Lambat</li> <li>• Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan kemiskinan dan pengangguran</li> <li>• Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja</li> <li>• Peningkatan daya saing dan kemudahan berinvestasi</li> <li>• Optimalisasi pendapatan daerah</li> <li>• Peningkatan industri dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi</li> <li>• Perwujudan kedaulatan pangan, pembangunan Food Estate, dan penguatan kebijakan Lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya PDRB per kapita dibandingkan rata-rata Provinsi dan Kabupaten sekitar</li> <li>• Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara</li> <li>• Adanya penurunan produksi komoditas pertanian</li> <li>• Masih tingginya tingkat kemiskinan</li> </ul>	<p>Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan potensi sumberdaya lokal</p>
--	--	---	---	---	---



			Pertanian Pangan Berkelanjutan		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Resiko dan mitigasi bencana</li> <li>✓ Kualitas dan ketersediaan air (siklus dan akses)</li> <li>✓ Sanitasi dan limbah</li> <li>✓ Persampahan</li> <li>✓ Pemenuhan sarana dan prasarana wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang</li> <li>• Pemenuhan SPM urusan perumahan dan Kawasan permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.</li> </ul> <p>Infrastruktur Pelayanan Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau</li> <li>• Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman</li> <li>• Pengelolaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan Sulut sebagai Super Hub di Indonesia Timur</li> <li>• Pengembangan kawasan perbatasan dan kepulauan</li> <li>• Optimalisasi sumberdaya perikanan dan kemaritiman serta pemanfaatan yang berkelanjutan</li> <li>• Pemerataan infrastruktur, sanitasi dan air minum layak</li> <li>• Peningkatan moda transportasi dari pusat-pusat produksi</li> <li>• Penguatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya potensi pemanfaatan sarana/prasarana sistem transportasi darat dalam mendorong kemajuan sosial-ekonomi daerah</li> <li>• Diperlukannya pengembangan moda transportasi dalam merespons pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah</li> <li>• Diperlukannya peningkatan kapasitas sarana-prasarana pengairan dan sumberdaya air dalam merespons peningkatan kebutuhan air irigasi dan air bersih</li> </ul>	Pemenuhan kualitas infrastruktur yang merata



		<p>Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Keselamatan dan Keamanan Transportasi</li><li>• Ketahanan Kebencanaan</li><li>• Infrastruktur</li><li>• Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi</li></ul> <p>Infrastruktur Ekonomi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Konektivitas Jalan</li><li>• Konektivitas laut</li><li>• Konektivitas Udara</li><li>• Konektivitas Darat</li></ul> <p>Infrastruktur Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Transportasi Perkotaan</li></ul>	<p>kepariwisataan terutama Manado – Likupang yang menjadi bagian dari 5 destinasi pariwisata super prioritas.</p>		
--	--	---	---	--	--



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Energi dan ketenagalistrikan perkotaan</li><li>• Penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman diperkotaan</li><li>• Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau diperkotaan</li></ul> <p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antar</p>			
--	--	---	--	--	--



		<div>wilayah Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</li><li>• Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim</li><li>• Pembangunan Rendah Karbon</li></ul></div>			
--	--	--	--	--	--





**BAB V**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**5.1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran pada RPD 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024-2026.

Dokumen RPD 2024-2026 berada pada periode tahapan Keempat dari RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap keempat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 ini.

Adapun detil dan tahapan sasaran pokok dan penekanannya sebagaimana disajikan pada table berikut ini:

Tabel 5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang  
Tahap Keempat (2020-2025)

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Ke-4
Peningkatan mutu pendidikan	Peningkatan mutu pendidikan dengan mengarahkan pada peningkatan sistem evaluasi yang komprehensif dan akuntabel untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas
Peningkatan derajat kesehatan Masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan menerapkan pola hidup



	sehat serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas dengan partisipasi aktif masyarakat
Peningkatan kualitas ketenagakerjaan	Peningkatan kualitas ketenagakerjaan diarahkan pada dorongan kerjasama dengan lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha
Peningkatan profesionalisme dan manajemen pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik (mudah, murah, tepat waktu) dengan prinsip enterpreneur
Peningkatan pemerataan pembangunan	Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur maupun ekonomi di arahkan pada peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan
Menjadikan budaya dan kesenian daerah sebagai daya tarik wisata	Menggiatkan promosi budaya dan kesenian daerah
Berkembangnya dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah	Berkembangnya dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah berorientasi penerapan teknologi dalam pengolaan potensi SDA
Peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah	Peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah di arahkan dapat memberikan jaminan perlindungan usaha bagi pelaku ekonomi mikro, keci dan menengah serta mendorong peningkatan kualitas produk
Peningktaan kualitas dan kuantitas penanaman modal	Peningkatan kualitas dan kuantitas penanaman modal diarahkan pada meningkatkan kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal
Peningkatan peran lembaga ekonomi/ keuangan	Peningkatan peran lembaga ekonomi/ keuangan diarahkan dengan mendorong tumbuh kembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro
Peningkatan kualitas lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas lingkungan di arahkan pada penerapan regulasi yang kuat untuk perlindungan lingkungan</li> <li>• Perlindungan dan pemeliharaan fungsi-fungsi lingkungan hidup</li> </ul>



Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah :

- 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya;
- 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
- 3. Terwujudnya Pemerataan dan Petumbuhan ekonomi yang inklusif;
- 4. Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran pembangunan daerah:

- 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
- 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
- 4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
- 5. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah;
- 6. Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 7. Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- 8. Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana.

**Tabel 5.2**

**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Daerah Pada RPD Tahun 2024-2026**

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
Terwujudnya Sumber Daya		Meningkatkan Kualitas	Harapan Lama Sekolah



Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	Rata-rata Lama Sekolah
			Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan
			Prestasi Pemuda dan Olah Raga
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
			Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)
Terwujudnya Petumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Pendapatan Per Kapita Penduduk (ADHB)
			Tingkat Pengangguran Terbuka
Terwujudnya Petumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	
	Angka Kemiskinan		
	Gini Rasio		
Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur
		Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

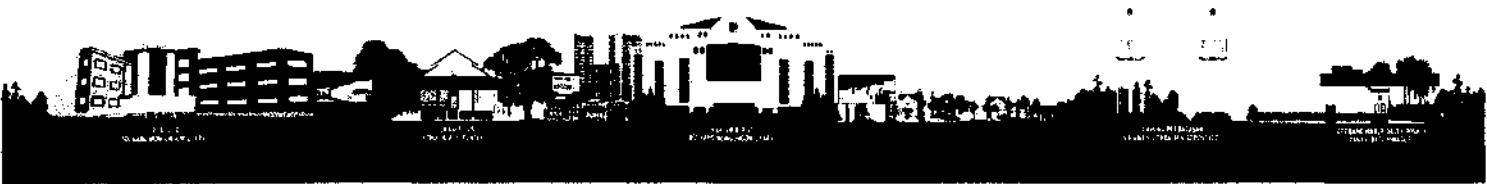


		Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Persentase Penanggulangan Bencana

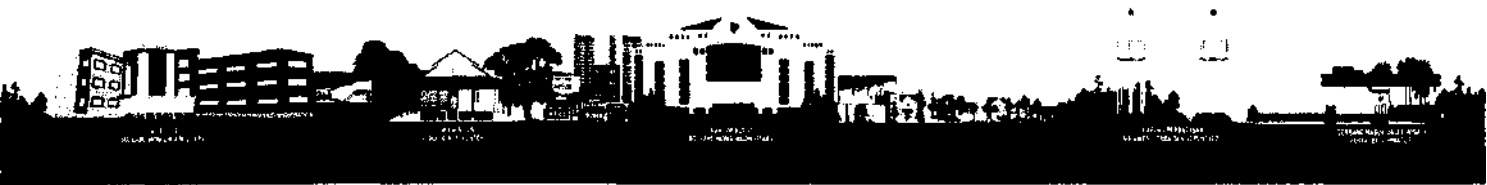


**Tabel 5.3**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
					Realisasi	Target	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	
					2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	68,06	68,79	69,33	69,87	70,40	70,40
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,34	12,41	12,51	12,60	12,70	12,70
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,57	8,74	8,88	9,03	9,17	9,17
			Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	69,7	69,7	71,48	73,2	73,2	73,2
			Prestasi Pemuda dan Olah Raga	Persen	1,10	1,10	1,13	1,15	1,16	1,34
		Meningkatnya Derajat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,05	67,97	68,10	68,23	68,36	68,36



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
					Realisasi	Target	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	
					2022	2023	2024	2025	2026	2026
		Kesehatan Masyarakat								
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	40,03*	44,83	49,86	55,23	60,03	60,03
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	B	B	B	BB	BB	BB
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	77,03	78,77	80,5	82,24	83,98	83,98



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
					Realisasi	Target	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	
					2022	2023	2024	2025	2026	2026
3	Terwujudnya Pemerataan dan Petumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,77	6,00	6,18	6,24	6,33	6,33
			Angka Kemiskinan	Persen	7,31	7,25	6,95	6,65	6,35	6,35
			Gini Rasio	Nilai	0,328	0,328	0,325	0,320	0,310	0,310
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Per Kapita Penduduk (PDRB per Kapita ADHE)	rupiah	33.427.171*	34.633.314	35.401,167	37.169.020	37.936.873	37.936.873
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,24	3,98	3,86	3,75	3,07	3,07
4	Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berkelanjutan		Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Nilai	67,45	66,29	68,89	69,62	70,44	70,44
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	41,50	42,60	43,79	44,93	46,18	46,18





No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
					Realisasi	Target	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	
					2022	2023	2024	2025	2026	2026
		Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	81,99	75,04	82,85	83,43	83,43	83,43
		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	80	80,35	80,89	81,27	81,92	81,92
		Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	66,31	67,16	68,01	68,86	70,23	70,23



**5.2. Keselarasan RPD dengan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, RPJPD Provinsi Sulawesi Utara dan RPJMD**

**5.2.1. Keselarasan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025**

Korelasi antara Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 dapat digambarkan sebagaimana tabel 5.4 berikut ini:

**Tabel 5.4** Penyelarasan Antara Misi RPJPD Kab. Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 dengan Tujuan RPD Kab. Bolaang Mongondow Utara 2024-2026

Tujuan RPD Kab. Bolaang Mongondow Utara 2023-2026	Misi RPJPD Kab. Bolaang Mongondow Utara 2005-2025
Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Misi 1: Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas
	Misi 4: Mewujudkan budaya yang berperadaban
Tujuan 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Tujuan 3: Terwujudnya Petumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Misi 5: Mewujudkan struktur perekonomian yang handal dan berdaya saing;
Tujuan 4: Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berkelanjutan	Misi 3: Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata
	Misi 6: Meningkatkan fungsi sumber daya alam dan kualitas lingkungan Hidup.



**5.2.2.Keselarasan RPD Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026  
dengan RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dan RPJMN  
2020-2024**

**5.2.2.1. Keselarasan Target Indikator Makro**

Tabel 5.5 Keselarasan RPD Bolaang Mongondow Utara  
dengan RPJMD Sulawesi Utara dan RPJMN

NO.	URAIAN	RPD Bolaang Mongondo Utara 2024-2026			RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026			RPJMN 2020-2024		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	69,33	69,87	70,4	75	76	77	75,54	N.A	N.A
2	ANGKA KEMISKINAN	6,95	6,65	6,35	5,65	5,37	5,09	5,65	N.A	N.A
3	ANGKA PENGANGGURAN	3,86	3,75	3,07	5,5 - 6,0	5,0 – 5,5	4,5 - 5,5	5,6	N.A	N.A
4	PERTUMBUHAN EKONOMI	6,18	6,24	6,33	5,7 - 6,0	6,0 – 6,5	6,5 - 7,0	7,6	N.A	N.A
5	PENDAPATAN PERKAPITA (Rp. Juta)	35,4	37, 1	37,9	65	70	76	5810-6000 (USD)	N.A	N.A
6	GINI RATIO	0,325	0,325	0,31	0,37	0,37	0,37	0,360-0,374	N.A	N.A

**5.2.2.2. Keselarasan Tujuan Pembangunan RPD Bolaang Mongondow  
Utara 2024-2026 dengan Tujuan Pembangunan RPJMD  
Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dan Agenda Pembangunan  
RPJMN 2020-2024**

Sasaran pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan



kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN Tahun 2020-2024 disusun dengan berlandaskan pada RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden yang kemudian diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya pada RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan tujuan pembangunan Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter;
2. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
3. Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai;
4. Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Keselarasan tujuan pembangunan dalam RPD Bolaang Mongondow Utara 2024-2026 dengan RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 serta agenda



pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6  
Keselarasan Tujuan Pembangunan RPD Bolaang Mongondow Utara 2024-2026 dengan Tujuan Pembangunan RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Tujuan Pembangunan RPD Bolaang Mongondow Utara 2024-2026	Tujuan Pembangunan RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026	Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter	Agenda 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
		Agenda 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
Tujuan 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani	Tujuan 5: Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Agenda 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Tujuan 3: Terwujudnya Petumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Tujuan 2: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Agenda 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
		Agenda 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan



Tujuan 4: Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berkelanjutan	Tujuan 3: Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai	Agenda 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
	Tujuan 4: Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Agenda 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

**5.2.2.3. Keselarasan Sasaran Pembangunan RPD Bolaang Mongondow Utara 2024-2026 dengan Tujuan Pembangunan RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024**

Keselaran Sasaran Pembangunan RPD Bolaang Mongondow Utara 2024-2026 dengan Sasaran Pembangunan RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dan Sasaran Pembangunan RPJMN 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 5.7**  
**Keselarasan Sasaran Pembangunan RPD Bolaang Mongondow Utara 2024-2026 dengan Sasaran Pembangunan RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dan Sasaran Pembangunan RPJMN 2020-2024**

Sasaran Pembangunan RPD Bolaang Mongondow Utara 2024-2026	Sasaran Pembangunan RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026	Sasaran Pembangunan RPJMN 2020-2024
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia	Sasaran Makro: 1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Tingkat Kemiskinan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Agenda Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik  Sasaran: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Sasaran Makro: 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 3. Rasio Gini
Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas  Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan	Sasaran Makro: Penurunan Emisi GRK
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup		
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang		



## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS**

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sebagai langkah optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

#### **6.1 Strategi**

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya tujuan dan sasaran daerah.

##### **6.1.1 Tujuan 1 : Terwujudnya sumber data manusia yang berkualitas dan berbudaya**

Strategi untuk mewujudkan tujuan terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya adalah:

1. Meningkatkan sistem pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan;
3. Peningkatan pelestarian/pengembangan seni dan budaya;
4. Peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitative kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan pelayanan, advokasi dan KIE Keluarga Berencana serta peningkatan pembangunan keluarga;





6. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda.

**6.1.2 Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani**

Strategi untuk mewujudkan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani adalah:

1. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
2. Meningkatkan sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

**6.1.3 Tujuan 3 : Terwujudnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif**

Strategi untuk mewujudkan tujuan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah:

1. Meningkatkan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal;
2. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata;
3. Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal;
4. Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja;
5. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
6. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
7. Meningkatkan perlindungan sosial.

**6.1.4 Tujuan 4 : Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan**

Strategi untuk mewujudkan tujuan terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan adalah :

1. Meningkatkan infrastruktur wilayah berbasis kawasan;



2. Peningkatan pengelolaan lingkungan;
3. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan legalitas pertanahan;
4. Peningkatan penanganan bencana alam.

Tabel 6.1  
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya sumber data manusia yang berkualitas dan berbudaya	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sistem pendidikan;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan;</li> <li>3. Peningkatan pelestarian/pengembangan seni dan budaya;</li> <li>4. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda</li> </ol>
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitative kesehatan masyarakat;</li> <li>2. Peningkatan pelayanan, advokasi dan KIE Keluarga Berencana serta peningkatan pembangunan keluarga;</li> </ol>
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;</li> <li>2. Meningkatkan sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi</li> </ol>
Terwujudnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal;</li> <li>2. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata;</li> </ol>



		3. Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal; 4. Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja; 5. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; 6. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 7. Meningkatkan perlindungan sosial.
<b>Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan</b>	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Meningkatkan infrastruktur wilayah berbasis kawasan;
	Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan lingkungan;
	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan legalitas pertanahan;
	Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Peningkatan penanganan bencana alam

6.2 Arah Kebijakan Umum

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan.



Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tiga tahun kedepan adalah :

Tabel 6.2 Tema Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

TEMA/FOKUS PEMBANGUNAN		
Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Pemantapan ekonomi masyarakat melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta sukses pemilu serentak	Transformasi Ekonomi Lokal Melalui Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata	Bolaang Mongondow Utara sebagai penyangga kedaulatan pangan Kawasan IKN

6.2.1 Arah kebijakan Tahun 2024

Arah kebijakan pada tahun 2024 yakni “ **Pemantapan ekonomi masyarakat melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta sukses pemilu serentak**” . Dalam memantapkan ekonomi masyarakat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya dengan baik. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahun 2024 meliputi :

1. Peningkatan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
3. Peningkatan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran;
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
5. Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
6. Peningkatan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan;



7. Stabilitas daerah yang terjamin dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum serentak.

#### **6.2.2 Arah kebijakan Tahun 2025**

Arah kebijakan pada tahun 2025 yakni “ **Transformasi Ekonomi Lokal Melalui Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata** “:

Transformasi ekonomi lokal dapat dicapai melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan meningkatkan kemandirian pangan dan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Adapun kebijakan prioritas pembangunan pada tahun 2025 meliputi :

1. Pemerataan Pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan;
2. Penguatan kapasitas SDM yang berdaya saing;
3. Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah;
4. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Pembangunan sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata;
6. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
7. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah.

#### **6.2.3 Arah kebijakan Tahun 2026**

Arah kebijakan pada tahun 2026 yakni “ **Bolaang Mongondow Utara sebagai penyangga kedaulatan pangan Kawasan IKN** “. Kebijakan pembangunan daerah yang diambil dapat membawa dampak yang positif bagi peningkatan kedaulatan pangan di Kawasan IKN. Adapun Kebijakan prioritas pembangunan pada tahun 2026 meliputi :

1. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
2. Pemerataan Pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan;
3. Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pertanian;



4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
5. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
6. Penguatan kapasitas SDM.

### **6.3 Program Pembangunan Daerah**

Untuk mengimplementasikan masing-masing kebijakan pembangunan dan arah pencapaian kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran daerah, maka disusun program-program pembangunan daerah sebagai instrumen untuk memadukan program perangkat daerah. Program Pemerintah Daerah yang ada pada RPD Tahun 2024-2026 ini merupakan program pendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah dirumuskan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Program Peningkatan Prestasi Generasi Muda dan Olahraga;
3. Program Peningkatan Derajat Kesehatan;
4. Program Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Penguatan Daya Saing Lokal Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ;
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur;
7. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
9. Program Peningkatan Ketangguhan Masyarakat terhadap Bencana.

Dari 9 (sembilan) Program Pemerintah Daerah tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam (112) seratus dua belas program pembangun daerah selengkapnya sebagai berikut:



Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif  
RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI I	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	KONDISI AKHIR TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERSUDAYA									
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA									
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan	67,49 Persen	73,03 Persen	Rp 6,291,712,332.00	78,41 Persen	Rp 7,205,183,462.00	83,69 Persen	Rp 7,233,003,462.00	83,69 Persen	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Persentase PNF Terakreditasi Dan PAUD Terakreditasi	100 Persen	100 Persen	Rp 203,479,798.00	100 Persen	Rp 303,479,798.00	100 Persen	Rp 303,479,798.00	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Persentase SD/ MI Terakreditasi A	13,98 Persen	12,90 Persen	Rp 431,150,000.00	20,43 Persen	Rp 708,650,000.00	13,98 Persen	Rp 716,150,000.00	13,98 Persen	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	100 Persen	100 Persen	Rp 2,042,003,623.00	100 Persen	Rp 2,227,003,623.00	100 Persen	Rp 2,184,183,623.00	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Persentase SMP/ MTs terakreditasi A	5 Persen	30 Persen	Rp 374,500,000.00	45 Persen	Rp 527,000,000.00	10 Persen	Rp 534,500,000.00	10 Persen	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM									
Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal/Prakarya pada Setiap Jenjang Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	Rp 300,000,000.00	100 Persen	Rp 300,000,000.00	100 Persen	Rp 300,000,000.00	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	100 Persen	84 Persen	Rp 500,000.00	80,77 Persen	Rp 500,000.00	81,48 Persen	Rp 500,000.00	81,48 Persen	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Persentase pemuda berprestasi	100 Persen	100 Persen	Rp 60,500,000.00	100 Persen	Rp 154,442,081.00	100 Persen	Rp 184,000,000.00	100 Persen	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN									
Persentase Atlet Berprestasi	20 Persen	25 Persen	Rp 40,009,155.00	30,77 Persen	Rp 85,000,000.00	32,35 Persen	Rp 135,552,564.00	67,65 Persen	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Presentase organisasi olahraga yang aktif	100 Persen	92,86 Persen	Rp 23,500,000.00	92,86 Persen	Rp 85,500,000.00	92,86 Persen	Rp 79,000,000.00	92,86 Persen	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI I	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	KONDISI AKHIR TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									
Persentase Anggota Pramuka Berprestasi	0 Persen	100 Persen	Rp 8,000,000.00	100 Persen	Rp 43,500,000.00	100 Persen	Rp 42,500,000.00	100 Persen	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									
Persentase Jenis Kebudayaan yang Dikelola	63,38 Persen	65,14 Persen	Rp 525,368,786.00	66,9 Persen	Rp 525,368,786.00	68,66 Persen	Rp 525,368,786.00	68,66 Persen	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH									
Persentase Data Sejarah yang Ditata	33,33 Persen	50 Persen	Rp 290,804,715.00	58,33 Persen	Rp 390,804,715.00	66,67 Persen	Rp 390,804,715.00	66,67 Persen	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola	19,81 Persen	29,25 Persen	Rp 173,172,020.00	38,68 Persen	Rp 273,172,020.00	48,11 Persen	Rp 273,172,020.00	48,11 Persen	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN									
Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	18,7 Persen	18,9 Persen	Rp 30,000,000.00	18,9 Persen	Rp 55,000,000.00	18,9 Persen	Rp 30,000,000.00	56,7 Persen	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan rujukan dan pelayanan dasar	B Indeks Konversi	B Indeks Konversi	Rp 19,627,406,620.00	B Indeks Konversi	Rp 23,681,363,390.00	B Indeks Konversi	Rp 22,726,406,620.00	B Indeks Konversi	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
Persentase Fasyankes Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	96,5 Persen	97 Persen	Rp 8,313,307,967.00	97,5 Persen	Rp 9,529,337,653.00	98 Persen	Rp 9,710,536,553.00	98 Persen	DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									
Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yg memiliki Izin Operasional dan Sesuai Standar	55 Persen	57 Persen	Rp 40,000,000.00	58 Persen	Rp 43,000,000.00	59 Persen	Rp 50,000,000.00	59 Persen	DINAS KESEHATAN





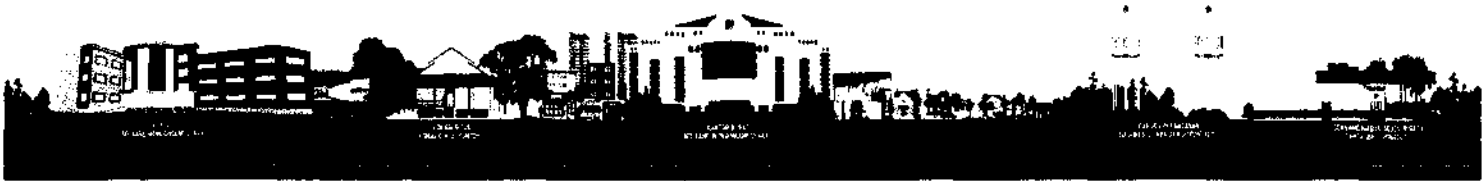
TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	TARGET	2024 Rp	TARGET	2025 Rp	TARGET	2026 Rp	KONDISI AKHIR TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan UKEM	97 Persen	98 Persen	Rp 140,000,000.00	99 Persen	Rp 155,000,000.00	100 Persen	Rp 140,000,000.00	100 Persen	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan Gender	40 Persen	50 Persen	Rp 35,000,000.00	60 Persen	Rp 50,000,000.00	70 Persen	Rp 50,000,000.00	80 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									
Cakupan kualitas Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	30 Persen	40 Persen	Rp 35,000,000.00	50 Persen	Rp 55,000,000.00	60 Persen	Rp 55,000,000.00	70 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									
Persentase Pemenuhan Hak Anak	50 Persen	60 Persen	Rp 146,000,000.00	65 Persen	Rp 181,000,000.00	70 Persen	Rp 181,000,000.00	75 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 thn	2,5 Orang	2,5 Orang	Rp 70,000,000.00	2,5 Orang	Rp 105,000,000.00	2,5 Orang	Rp 105,000,000.00	2,5 Orang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2 Orang	2 Orang	Rp 70,000,000.00	2 Orang	Rp 105,000,000.00	2 Orang	Rp 105,000,000.00	2 Orang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk	0 Persen	1,17 Persen	Rp 70,000,000.00	1,17 Persen	Rp 105,000,000.00	1,17 Persen	Rp 105,000,000.00	1,17 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>									
Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	70 Persen	30 Persen	Rp 300,000,000.00	40 Persen	Rp 325,000,000.00	50 Persen	Rp 325,000,000.00	60 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>									



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	70 Persen	50 Persen	Rp 30,000,000.00	60 Persen	Rp 40,000,000.00	70 Persen	Rp 65,000,000.00	80 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI</b>									
<b>MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF DAN AKUNTABEL</b>									
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>									
Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Transibum	100 Persen	100 Persen	Rp 1,454,576,000.00	100 Persen	Rp 1,453,776,000.00	100 Persen	Rp 1,453,576,000.00	100 Persen	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>									
Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Persen	75 Persen	Rp 25,000,000.00	80 Persen	Rp 40,500,000.00	85 Persen	Rp 30,500,000.00	85 Persen	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>									
Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	0 Persen	75 Persen	Rp 24,000,000.00	80 Persen	Rp 38,000,000.00	85 Persen	Rp 30,500,000.00	85 Persen	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>									
Persentase Pengelolaan Adminduk dan Capil	0 Persen	80 Persen	Rp 28,000,000.00	85 Persen	Rp 43,000,000.00	95 Persen	Rp 38,000,000.00	95 Persen	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>									



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Persentase desa yang menetapkan APBDES sesuai regulasi yang berlaku	100 Persen	100 Persen	Rp 238,500,000.00	100 Persen	Rp 242,910,000.00	100 Persen	Rp 273,760,000.00	100 Persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>									
Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	0 Persen	95 Persen	Rp 131,220,000.00	95 Persen	Rp 131,220,000.00	95 Persen	Rp 183,940,000.00	95 Persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>									
Persentase pengembangan komunikasi media massa dan informasi	75 Persen	85 Persen	Rp 500,000.00	85 Persen	Rp 490,000.00	100 Persen	Rp 525,000.00	100 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>									
Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik	100 Persen	100 Persen	Rp 1,015,683,616.00	100 Persen	Rp 1,072,942,597.00	100 Persen	Rp 103,381,384.00	100 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>									
Persentase data sektoral yang dipublikasi	100 Persen	30 Persen	Rp 15,841,340.00	60 Persen	Rp 15,841,340.00	100 Persen	Rp 15,841,340.00	100 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>									
Persentase ketersediaan infrastruktur persandian	39 Persen	30 Persen	Rp 50,000,000.00	60 Persen	Rp 50,000,000.00	100 Persen	Rp 50,000,000.00	100 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>									
Persentase Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	64,29 Persen	71,43 Persen	Rp 30,000,000.00	78,57 Persen	Rp 30,000,000.00	85,71 Persen	Rp 55,000,000.00	78,57 Persen	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>									



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	100 Persen	Rp 1,540,506,835.00	100 Persen	Rp 1,776,596,470.00	100 Persen	Rp 1,776,596,470.00	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp 855,892,000.00	100 Persen	Rp 1,150,000,000.00	100 Persen	Rp 1,150,000,000.00	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
Persentase Penetapan dan Pengesahan Peraturan dan Penyelesaian Perkara	100 Persen	100 Persen	Rp 237,658,600.00	100 Persen	Rp 214,582,800.00	100 Persen	Rp 214,582,800.00	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>									
Persentase fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan koordinasi peningkatan perekonomian rakyat	100 Persen	100 Persen	Rp 69,800,000.00	100 Persen	Rp 100,000,000.00	100 Persen	Rp 100,000,000.00	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa	100 Persen	100 Persen	Rp 120,457,500.00	100 Persen	Rp 290,000,000.00	100 Persen	Rp 290,000,000.00	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
Persentase Program Pembangunan yang Berkualitas dan Sesuai Dengan Perencanaan	100 Persen	100 Persen	Rp 155,459,600.00	100 Persen	Rp 90,000,000.00	100 Persen	Rp 90,000,000.00	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>									
Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	57,62 Persen	57,62 Persen	Rp 4,320,988,400.00	58,48 Persen	Rp 4,766,368,400.00	58,5 Persen	Rp 4,766,368,400.00	58,5 Persen	SEKRETARIAT DPRD
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>									
Capaian Target Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	74 Persen	Rp 638,421,160.00	89 Persen	Rp 511,474,540.00	100 Persen	Rp 524,084,850.00	100 Persen	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Persentase Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	100 Persen	100 Persen	Rp 103,091,590.00	100 Persen	Rp 320,182,220.00	100 Persen	Rp 272,632,190.00	100 Persen	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>									
Persentase Kinerja OPD Dengan Predikat Sangat Tinggi (91% - 100%)	93,63 Persen	94,58 Persen	Rp 65,773,410.00	95,34 Persen	Rp 844,676,170.00	96,5 Persen	Rp 809,579,560.00	97,46 Persen	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>									



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Cakupan Pengelolaan Anggaran	85,71 Persen	85,71 Persen	Rp 428,215,383.00	87,14 Persen	Rp 458,215,383.00	90 Persen	Rp 469,215,383.00	90 Persen	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>									
Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	80 Persen	80 Persen	Rp 658,191,882.00	83,57 Persen	Rp 673,207,756.00	90 Persen	Rp 673,207,756.00	90 Persen	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>									
Persentase Penerimaan PAD Daerah	82 persen	82 persen	Rp 608,008,815.00	83 persen	Rp 608,008,815.00	84 persen	Rp 608,008,815.00	84 persen	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>									
Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	100 Persen	100 Persen	Rp 478,466,488.00	100 Persen	Rp 113,440,639.00	100 Persen	Rp 355,000,000.00	100 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Persentase Pemenuhan Penataan ASN	57 Persen	60 Persen	Rp 1,000,000,000.00	65 Persen	Rp 1,000,000,000.00	70 Persen	Rp 1,000,000,000.00	70 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>									
Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Persen	100 Persen	Rp 330,000,000.00	100 Persen	Rp 344,000,000.00	100 Persen	Rp 410,429,294.00	100 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>									
Persentase Kematangan Inovasi	81,82 Persen	83,33 Persen	Rp 285,588,200.00	84,62 Persen	Rp 366,338,200.00	92,31 Persen	Rp 390,838,200.00	92,31 Persen	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Persentase Rekomendasi/ Penelitian yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	0,26 Persen	0,63 Persen	Rp 294,883,690.00	0,86 Persen	Rp 392,528,130.00	1 Persen	Rp 357,928,670.00	1 Persen	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>									

RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2024-2026

Hal. VI.15



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan	93 Persen	93 Persen	Rp 716,850,388.00	94 Persen	Rp 816,400,388.00	95 Persen	Rp 973,350,388.00	95 Persen	INSPEKTORAT DAERAH
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>									
Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	93 Persen	93 Persen	Rp 283,963,187.00	94 Persen	Rp 285,673,493.00	95 Persen	Rp 285,673,540.00	95 Persen	INSPEKTORAT DAERAH
<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>									
Persentase Kesadaran Pemuda di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0,76 Persen	1,15 Persen	Rp 700,000,000.00	1,51 Persen	Rp 700,000,000.00	1,87 Persen	Rp 700,000,000.00	1,87 Persen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>									
Persentase peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	100 Persen	100 Persen	Rp 30,627,222,528.00	100 Persen	Rp 627,222,528.00	100 Persen	Rp 627,222,528.00	100 Persen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>									
Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	100 Persen	Rp 26,000,000.00	100 Persen	Rp 30,000,000.00	100 Persen	Rp 30,000,000.00	100 Persen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 2,357,237,092.00	100 Persen	Rp 2,447,030,466.00	100 Persen	Rp 2,435,708,032.00	100 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,53 Persen	99,53 Persen	Rp 2,764,323,639.00	99,53 Persen	Rp 2,854,643,666.00	99,53 Persen	Rp 2,837,917,272.00	99,53 Persen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 2,184,744,937.00	100 Persen	Rp 2,380,120,518.00	100 Persen	Rp 2,389,733,785.00	100 Persen	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 2,310,775,532.00	100 Persen	Rp 2,548,847,725.00	100 Persen	Rp 2,570,576,376.00	100 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
									TERPADU SATU PINTU
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,83 Persen	90,41 Persen	Rp 4,793,186,650.00	91,99 Persen	Rp 4,970,049,325.00	93,51 Persen	Rp 7,573,715,939.00	93,51 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 1,978,036,974.00	100 Persen	Rp 2,053,944,857.00	100 Persen	Rp 2,048,898,644.00	100 Persen	DINAS KETAHANAN PANGAN
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 1,901,574,729.00	100 Persen	Rp 1,994,036,666.00	100 Persen	Rp 1,997,312,230.00	100 Persen	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 68,856,079,645.00	100 Persen	Rp 69,741,228,973.00	100 Persen	Rp 69,940,855,352.00	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 2,244,812,001.00	100 Persen	Rp 2,297,149,725.00	100 Persen	Rp 2,301,653,217.00	100 Persen	KECAMATAN PINO GALUMAN
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 2,832,414,981.00	100 Persen	Rp 3,027,508,227.00	100 Persen	Rp 3,042,508,227.00	100 Persen	DINAS SOSIAL
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 3,980,633,895.00	100 Persen	Rp 4,383,990,507.00	100 Persen	Rp 4,225,990,507.00	100 Persen	INSPEKTORAT DAERAH
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	100 Persen	Rp 2,595,251,605.00	100 Persen	Rp 2,738,739,128.00	100 Persen	Rp 2,763,156,185.00	100 Persen	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 2,380,863,978.00	100 Persen	Rp 2,668,532,152.00	100 Persen	Rp 2,583,869,097.00	100 Persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 9,807,660,993.00	100 Persen	Rp 10,043,147,056.00	100 Persen	Rp 10,161,438,775.00	100 Persen	DINAS PERTANIAN
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 2,184,299,457.00	100 Persen	Rp 2,376,488,897.00	100 Persen	Rp 2,298,859,993.00	100 Persen	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 Persen	98 Persen	Rp 1,876,414,939.00	98 Persen	Rp 1,938,141,785.00	98 Persen	Rp 1,951,432,875.00	98 Persen	KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR





TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 2,057,820,785.00	100 Persen	Rp 2,105,411,147.00	100 Persen	Rp 2,107,842,629.00	100 Persen	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 3,101,862,331.00	100 Persen	Rp 3,180,274,424.00	100 Persen	Rp 3,194,525,427.00	100 Persen	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 2,033,218,622.00	100 Persen	Rp 2,398,378,137.00	100 Persen	Rp 2,429,291,641.00	100 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	Rp 15,261,416,523.00	100 persen	Rp 17,585,974,497.00	100 persen	Rp 17,537,935,505.00	100 persen	SEKRETARIAT DPRD
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 2,077,233,816.00	100 Persen	Rp 2,097,388,589.00	100 Persen	Rp 2,116,706,688.00	100 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 2,057,473,764.00	100 Persen	Rp 2,119,670,518.00	100 Persen	Rp 2,136,370,546.00	100 Persen	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 2,133,204,267.00	100 Persen	Rp 2,174,207,727.00	100 Persen	Rp 2,240,861,273.00	100 Persen	DINAS PERHUBUNGAN
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 51,031,332,952.00	100 Persen	Rp 51,187,210,913.00	100 Persen	Rp 51,990,302,003.00	100 Persen	DINAS KESEHATAN
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 0.00	100 Persen	Rp 0.00	100 Persen	Rp 0.00	100 Persen	DINAS KETAHANAN PANGAN
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 1,060,210,234.00	100 Persen	Rp 1,111,488,442.00	100 Persen	Rp 1,112,685,163.00	100 Persen	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 3,597,549,754.00	100 Persen	Rp 3,742,597,902.00	100 Persen	Rp 3,697,912,764.00	100 Persen	DINAS PENGOEDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 2,255,409,456.00	100 Persen	Rp 2,316,767,540.00	100 Persen	Rp 2,321,053,812.00	100 Persen	KECAMATAN SANGKUB
Persentase Pelayanan Administrasi Kehumasan dan Keprotokolan	100 Persen	100 Persen	Rp 11,358,301,236.00	100 Persen	Rp 12,835,533,968.00	100 Persen	Rp 12,835,533,968.00	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
Persentase Penataan Peningkatan Kelembagaan PD, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur	100 Persen	100 Persen	Rp 2,437,047,998.00	100 Persen	Rp 3,167,533,230.00	100 Persen	Rp 3,167,533,230.00	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
Persentase Peningkatan Pelayanan Umum Kedinasan	100 Persen	100 Persen	Rp 10,463,093,824.00	100 Persen	Rp 10,808,512,069.00	100 Persen	Rp 10,808,512,069.00	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
<b>TERWUJUDNYA PEMERATAAN DAN PETUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF</b>									
<b>MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT</b>									
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>									
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	100 Persen	100 Persen	Rp 63,500,000.00	100 Persen	Rp 63,500,000.00	100 Persen	Rp 80,208,931.00	100 Persen	DINAS SOSIAL
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>									
Persentase Pelayanan dan Urusan Wajib Bidang Sosial	100 Persen	100 Persen	Rp 89,360,000.00	100 Persen	Rp 89,360,000.00	100 Persen	Rp 89,360,000.00	100 Persen	DINAS SOSIAL
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>									
Persentase Perlindungan Sosial	100 Persen	100 Persen	Rp 194,500,000.00	100 Persen	Rp 194,500,000.00	100 Persen	Rp 194,500,000.00	100 Persen	DINAS SOSIAL
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>									
Persentase Penanganan Bencana	100 Persen	100 Persen	Rp 72,000,000.00	100 Persen	Rp 77,000,000.00	100 Persen	Rp 72,000,000.00	100 Persen	DINAS SOSIAL
<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>									
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	54,55 Persen	58,33 Persen	Rp 7,500,000.00	61,54 Persen	Rp 10,500,000.00	64,29 Persen	Rp 10,200,000.00	64,29 Persen	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>									
Persentase Peserta Pelatihan Bersertifikasi	0 Persen	100 Persen	Rp 22,609,000.00	100 Persen	Rp 55,000,000.00	100 Persen	Rp 45,000,000.00	100 Persen	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI I	TARGET	2024 Rp	TARGET	2025 Rp	TARGET	2026 Rp	KONDISI AKHIR TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									
Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	0 Persen	100 Persen	Rp 11,000,000.00	100 Persen	Rp 10,500,000.00	100 Persen	Rp 7,000,000.00	100 Persen	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									
Skor Angka Kecukupan Energi	91,88 Poin	91,93 Poin	Rp 126,296,440.00	91,98 Poin	Rp 186,296,440.00	92,48 Poin	Rp 186,296,440.00	92,48 Poin	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN									
Persentase penanganan daerah rawan pangan	41,67 Persen	50,00 Persen	Rp 23,000,000.00	62,50 Persen	Rp 23,000,000.00	83,33 Persen	Rp 23,000,000.00	83,33 Persen	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN									
Persentase keamanan dan mutu pangan	100 Persen	100 Persen	Rp 35,991,120.00	100 Persen	Rp 35,991,120.00	100 Persen	Rp 35,991,120.00	100 Persen	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI									
Persentase Koperasi Sehat	0 Persen	20 Persen	Rp 7,500,000.00	60 Persen	Rp 12,000,000.00	80 Persen	Rp 12,000,000.00	68 Persen	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									
Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi	0 Persen	100 Persen	Rp 10,000,000.00	100 Persen	Rp 22,000,000.00	100 Persen	Rp 22,000,000.00	100 Persen	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									
Persentase Pengembangan UMKM	0 Persen	40 Persen	Rp 10,000,000.00	70 Persen	Rp 17,312,800.00	60 Persen	Rp 22,412,800.00	60 Persen	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Persentase peningkatan investasi diKabupaten/Kota	10 Persen	10 Persen	Rp 20,000,000.00	10 Persen	Rp 50,000,000.00	10 Persen	Rp 30,000,000.00	10 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>									
Persentase peningkatan promosi penanaman modal	100 Persen	100 Persen	Rp 20,000,000.00	100 Persen	Rp 20,000,000.00	100 Persen	Rp 20,000,000.00	100 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>									
Persentase peningkatan kualitas pelayanan perizinan	5 Persen	5 Persen	Rp 30,000,000.00	5 Persen	Rp 70,000,000.00	5 Persen	Rp 70,000,000.00	5 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>									
Persentase jumlah proyek penanaman modal yang merealisasikan investasinya	100 Persen	100 Persen	Rp 30,000,000.00	100 Persen	Rp 30,000,000.00	100 Persen	Rp 30,000,000.00	100 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>									
Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola secara elektronik	100 Persen	100 Persen	Rp 150,000,000.00	100 Persen	Rp 20,000,000.00	100 Persen	Rp 20,000,000.00	100 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>									
Produksi perikanan tangkap	20 TON	85 TON	Rp 199,200,000.00	85 TON	Rp 229,000,000.00	85 TON	Rp 224,000,000.00	85 TON	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI I	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
Produksi perikanan budaya	200 Ton	203 Ton	Rp 200,000,000.00	205 Ton	Rp 230,000,000.00	208 Ton	Rp 225,000,000.00	208 Ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100 Persen	100 Persen	Rp 8,000,000.00	100 Persen	Rp 1,000,000.00	100 Persen	Rp 1,000,000.00	100 Persen	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
Capaian peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	4,17 Persen	4,17 Persen	Rp 39,286,973.00	8,33 Persen	Rp 46,006,360.00	8,33 Persen	Rp 46,892,400.00	1 Persen	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									
Capaian Peningkatan Pemasaran Pariwisata	100 Persen	100 Persen	Rp 410,738,924.00	100 Persen	Rp 553,993,640.00	100 Persen	Rp 503,107,600.00	100 Persen	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									
Persentase Fasilitasi Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif	100 Persen	100 Persen	Rp 88,072,151.00	100 Persen	Rp 103,253,218.00	100 Persen	Rp 87,395,725.00	100 Persen	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Aktif	100 Persen	100 Persen	Rp 181,696,948.00	100 Persen	Rp 196,696,948.00	100 Persen	Rp 196,696,948.00	100 Persen	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
Persentase Alat Mesin Pertanian yang berfungsi dengan baik	76 Persen	76 Persen	Rp 25,000,000.00	78 Persen	Rp 33,000,000.00	79 Persen	Rp 25,000,000.00	79 Persen	DINAS PERTANIAN
Produktivitas Perkebunan	1.200 Ku/Ha	1.207,36 Ku/Ha	Rp 33,000,000.00	1.207,59 Ku/Ha	Rp 70,000,000.00	1.207,75 Ku/Ha	Rp 55,000,000.00	1.207,75 Ku/Ha	DINAS PERTANIAN
Produktivitas Tanaman Hortikultura (Cabe Rawit)	5,50 Ku/Ha	5,61 Ku/Ha	Rp 30,000,000.00	5,61 Ku/Ha	Rp 40,000,000.00	5,70 Ku/Ha	Rp 30,000,000.00	5,70 Ku/Ha	DINAS PERTANIAN
Produktivitas Tanaman Hortikultura (Tomat)	3,50 Ku/Ha	3,67 Ku/Ha	Rp 25,000,000.00	3,85 Ku/Ha	Rp 30,000,000.00	3,96 Ku/Ha	Rp 25,000,000.00	3,96 Ku/Ha	DINAS PERTANIAN
Produktivitas Tanaman Pangan (Jagung)	55,00 Ku/Ha	55,00 Ku/Ha	Rp 45,000,000.00	55,01 Ku/Ha	Rp 50,000,000.00	55,15 Ku/Ha	Rp 45,000,000.00	55,20 Ku/Ha	DINAS PERTANIAN
Produktivitas Tanaman Pangan (Padi)	60 Ku/Ha	55 Ku/Ha	Rp 50,000,000.00	55,15 Ku/Ha	Rp 60,000,000.00	55,20 Ku/Ha	Rp 50,000,000.00	55,20 Ku/Ha	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	70 Persen	72 Persen	Rp 15,000,000.00	73 Persen	Rp 15,000,000.00	75 Persen	Rp 15,000,000.00	75 Persen	DINAS PERTANIAN



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	TARGET	2024 Rp	TARGET	2025 Rp	TARGET	2026 Rp	KONDISI AKHIR TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									
Persentase Kesehatan Hewan dan Kesmavet	10 Persen	9 Persen	Rp 240,000,000.00	8 Persen	Rp 255,000,000.00	7 Persen	Rp 240,000,000.00	7 Persen	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									
Penurunan Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	35 Persen	30 Persen	Rp 25,000,000.00	28 Persen	Rp 30,000,000.00	26 Persen	Rp 25,000,000.00	26 Persen	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									
Persentase Peningkatan Penyuluhan Pertanian	82 Persen	83 Persen	Rp 413,000,000.00	84 Persen	Rp 435,000,000.00	85 Persen	Rp 413,000,000.00	85 Persen	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									
Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	10 Persen	30 Persen	Rp 43,000,000.00	30 Persen	Rp 80,489,103.00	30 Persen	Rp 71,666,060.00	90 Persen	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									
Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	0,15 Persen	0,17 Persen	Rp 56,000,000.00	0,18 Persen	Rp 58,000,000.00	0,20 Persen	Rp 63,000,000.00	0,20 Persen	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	21 Persen	28 Persen	Rp 24,080,670.00	33 Persen	Rp 32,000,000.00	50 Persen	Rp 48,000,000.00	50 Persen	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									
Persentase Sentra Industri Aktif	0 Persen	25 Persen	Rp 27,000,000.00	25 Persen	Rp 61,021,794.00	25 Persen	Rp 24,000,000.00	75 Persen	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	REALISASI	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
									USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI									
Persentase IKM yang memiliki Izin Usaha	0 Persen	20 Persen	Rp 12,000,000.00	33 Persen	Rp 15,000,000.00	47 Persen	Rp 17,000,000.00	100 Persen	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									
Persentase IKM yang Terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	0 Persen	33 Persen	Rp 10,000,000.00	33 Persen	Rp 12,000,000.00	34 Persen	Rp 12,000,000.00	100 Persen	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI									
Persentase Penyelesaian Temuan Lapangan	0 Persen	60 Persen	Rp 15,000,000.00	80 Persen	Rp 15,000,000.00	80 Persen	Rp 15,000,000.00	80 Persen	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI									
Persentase KK Transmigrasi yang Berhasil Mendapatkan Sertifikat	60,22 Persen	90,32 Persen	Rp 17,000,000.00	100 Persen	Rp 17,000,000.00	100 Persen	Rp 17,000,000.00	100 Persen	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KAWASAN BERKELANJUTAN									
MENINGKATKAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PERFORMA WILAYAH									
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)									
Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	54,76 Persen	55,72 Persen	Rp 2,025,000,000.00	55,98 Persen	Rp 3,125,000,000.00	56,80 Persen	Rp 2,625,000,000.00	56,80 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM									



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak	62,62 Persen	63,66 Persen	Rp 975,000,000.00	64,96 Persen	Rp 1,400,000,000.00	66,52 Persen	Rp 1,150,000,000.00	66,52 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>									
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sarana Prasarana Persampahan Dalam Kawasan Pengelolaan Persampahan	30 Persen	30 Persen	Rp 50,000,000.00	35,29 Persen	Rp 225,000,000.00	38,24 Persen	Rp 400,000,000.00	36,47 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>									
Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Limbah Aman	11,05 Persen	11,17 Persen	Rp 565,000,000.00	21,21 Persen	Rp 2,415,000,000.00	21,33 Persen	Rp 565,000,000.00	21,33 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>									
Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Drainase	63,87 Persen	63,99 Persen	Rp 665,000,000.00	64,39 Persen	Rp 715,000,000.00	71,65 Persen	Rp 615,000,000.00	71,65 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>									
Persentase Pembangunan Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Presentase Pembangunan Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah	60 Persen	60 Persen	Rp 0.00	80 Persen	Rp 200,000,000.00	100 Persen	Rp 200,000,000.00	100 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>									
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Dan Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik Dan Tertib Administrasi	45,18 Persen	45,35 Persen	Rp 255,000,000.00	45,52 Persen	Rp 255,000,000.00	46,66 Persen	Rp 455,000,000.00	46,66 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>									
Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	57 Persen	71 Persen	Rp 300,000,000.00	71 Persen	Rp 50,000,000.00	86 Persen	Rp 250,000,000.00	86 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>									
Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	80 Persen	81 Persen	Rp 8,050,000,000.00	81,2 Persen	Rp 8,750,000,000.00	81,3 Persen	Rp 8,250,000,000.00	81,3 Persen	DINAS PEKERJAAN





TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	TARGET	
									UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI									
Persentase Penyedia Jasa Konstruksi dengan Konduite Baik	53,85 Persen	70 Persen	Rp 175,000,000.00	75 Persen	Rp 185,000,000.00	80 Persen	Rp 175,000,000.00	80 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN									
Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	25 Persen	50 Persen	Rp 35,000,000.00	75 Persen	Rp 50,000,000.00	100 Persen	Rp 50,000,000.00	100 Persen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN									
Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	4,36 Persen	2,88 Persen	Rp 35,000,000.00	4,68 Persen	Rp 50,000,000.00	5,94 Persen	Rp 50,000,000.00	21,13 Persen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)									
Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	3 Persen	10 Persen	Rp 70,000,000.00	20 Persen	Rp 100,000,000.00	30 Persen	Rp 100,000,000.00	30 Persen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									
Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 Persen	100 Persen	Rp 283,180,200.00	100 Persen	Rp 282,780,200.00	100 Persen	Rp 282,330,200.00	100 Persen	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
Persentase Tertib Lalulintas Jalan	45 Persen	47 Persen	Rp 295,440,667.00	48,75 Persen	Rp 376,832,577.00	50 Persen	Rp 329,005,861.00	50 Persen	DINAS PERHUBUNGAN
Pesentase pelayanan sarana prasarana perhubungan	40 Persen	40,20 Persen	Rp 184,539,146.00	40,50 Persen	Rp 273,500,000.00	41 Persen	Rp 254,539,146.00	41 Persen	DINAS PERHUBUNGAN
MENINGKATKAN PENGELOLAAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP									
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP									



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Persentase Pemenuhan Kajian Lingkungan Hidup	100 persen	100 persen	Rp 145,000,000.00	100 persen	Rp 160,000,000.00	100 persen	Rp 155,000,000.00	100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									
Persentase Peningkatan Pelayanan Perijinan Lingkungan Hidup	40 persen	50 persen	Rp 112,824,910.00	55 persen	Rp 152,000,000.00	60 persen	Rp 164,500,000.00	60 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)									
Persentase Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup	0 persen	50 persen	Rp 74,500,000.00	55 persen	Rp 80,000,000.00	60 persen	Rp 78,500,000.00	60 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)									
Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Penghasil B3 dan LB3	25 persen	30 persen	Rp 20,069,557.00	35 persen	Rp 27,569,557.00	37 persen	Rp 25,069,557.00	37 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									
Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Menindaklanjuti Arahan dan atau Teguran Hasil Pengawasan	20 persen	23 persen	Rp 12,000,000.00	25 persen	Rp 15,000,000.00	28 persen	Rp 17,000,000.00	28 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
Persentase Penghargaan yang Diraih di tkt. Prov atau Nasional	0 persen	100 persen	Rp 42,500,000.00	100 persen	Rp 45,000,000.00	100 persen	Rp 50,000,000.00	100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									
Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat yang terkait Dugaan Kasus Lingkungan	10 persen	13 persen	Rp 12,000,000.00	15 persen	Rp 17,500,000.00	17 persen	Rp 17,500,000.00	xx persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	KONDISI AWAL REALISASI	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Persentase Peningkatan Pengelolaan Persampahan	51,47 persen	53 persen	Rp 2,247,640,216.00	55 persen	Rp 2,269,640,216.00	57 persen	Rp 2,271,640,216.00	57 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
MENINGKATKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten	60 Persen	70 Persen	Rp 150,000,000.00	80 Persen	Rp 275,000,000.00	85 Persen	Rp 225,000,000.00	85 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH									
Persentase Luasan Bidang Tanah yang bersertifikat	15 Persen	20 Persen	Rp 70,000,000.00	20 Persen	Rp 100,000,000.00	20 Persen	Rp 100,000,000.00	60 Persen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
MENINGKATKAN KETANGGUHAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA									
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
Persentase Pemenuhan SPM Bidang Kebencanaan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Rp 460,000,000.00	100 Persen	Rp 515,000,000.00	100 Persen	Rp 500,000,000.00	100 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah tahun 2024-2026. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat. Selanjutnya kapasitas kemampuan riil keuangan daerah tersebut digunakan untuk membiayai program per urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Indikasi rencana program pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berisi program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah.

Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Oleh karena itu maka pada bab ini disajikan pula target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan, serta alokasi pagu indikatif program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan. Jumlah dana yang dialokasikan tersebut merupakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis, sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Setiap satuan kerja perangkat daerah mempunyai 1 (satu) program yang sama yang melekat pada salah satu urusan yang diampu, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



Ada beberapa kendala yang menyebabkan penyusunan pagu indikatif tidak bisa secara ideal dilakukan, sehingga konsep *“money follow program”* belum mampu diaplikasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Banyaknya kewajiban dari Pemerintah Pusat yang harus dipenuhi oleh daerah dalam bentuk belanja wajib dan diarahkan, seperti: pemenuhan kewajiban alokasi dana untuk bidang pendidikan minimal 20 persen, bidang kesehatan 10 persen, Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10 persen dari Total dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana transfer umum wajib digunakan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik minimum 40 persen, belanja pengawasan sebesar 0,6 persen dan dana bagi hasil yang peruntukannya sebagian besar sudah ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan sangat terbatasnya potensi dana yang bisa diarahkan secara ideal untuk mendanai program-program prioritas daerah.
2. Potensi dana yang bisa cukup leluasa diarahkan untuk pendanaan program prioritas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun jumlahnya tidak terlalu signifikan untuk mendesain pagu indikatif secara ideal. PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2024-2026 hanya berkontribusi rata-rata sebesar 3,56 persen dari total pendapatan daerah.

Dengan berbagai pertimbangan yang ada, pagu indikatif tersebut tetap diupayakan mengacu ketentuan yang ada, namun karena berbagai keterbatasan tersebut ada beberapa kebijakan daerah yang harus dilakukan untuk mengatasinya sehingga diperoleh solusi yang lebih realistis dan rasional. Secara umum beberapa pertimbangan yang dipergunakan sebagai penghitung pagu indikatif antara lain: pemenuhan kewajiban belanja wajib mengikat, prioritas-prioritas daerah terkait pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2024-2026, belanja untuk membiayai



urusan wajib bersifat pelayanan dasar, dan belanja-belanja prioritas yang sifatnya mendukung pencapaian kinerja daerah. Pencapaian target kinerja program di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saja, tetapi juga bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Utara, Dana Desa, pihak swasta dan masyarakat serta sumber-sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat. Namun demikian, pencantuman pendanaan yang disajikan hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1, adapun indikasi rencana program disertai dengan kebutuhan pendanaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026

URAIAN		TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
5	BELANJA DAERAH	487.323.270.148,00	487.352.320.599,00	487.382.720.599,00
5.1	BELANJA OPERASI	303.965.209.886,16	284.192.465.583,19	285.909.138.047,35
5.1.1	Belanja Pegawai	212.319.086.583	216.335.988.113	220.453.312.181
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.228.621.889,80	45.399.485.409,08	45.763.675.199,70
5.1.5	Belanja Hibah	31.306.910.536,59	745.422.956,16	425.167.115,89
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	19.110.590.877,07	21.711.569.105,35	19.266.983.551,01
5.2	BELANJA MODAL	72.449.570.573,59	93.600.188.490,25	93.234.997.502,44
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	108.908.489.688,25	107.559.666.525,56	106.238.585.049,21

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2023



Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun Periode 2024 sd 2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan	67,49 Persen	73,03 Persen	6.291.712.332,00	78,41 Persen	7.205.183.462,00	83,69 Persen	7.233.003.462,00	83,69 Persen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase PNF Terakreditasi Dan PAUD Terakreditasi	100 Persen	100 Persen	203.479.798,00	100 Persen	303.479.798,00	100 Persen	303.479.798,00	100 Persen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SD/ MI Terakreditasi A	13,98 Persen	12,90 Persen	431.150.000,00	20,43 Persen	708.650.000,00	13,98 Persen	716.150.000,00	13,98 Persen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	100 Persen	100 Persen	2.042.003.623,00	100 Persen	2.227.003.623,00	100 Persen	2.184.183.623,00	100 Persen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SMP/ MTs terakreditasi A	5 Persen	30 Persen	374.500.000,00	45 Persen	527.000.000,00	10 Persen	534.500.000,00	10 Persen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal/Prakarya pada Setiap Jenjang Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	100 Persen	300.000.000,00	100 Persen	300.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan rujukan dan pelayanan dasar	B Indeks Konversi	B Indeks Konversi	18.627.406.620,00	B Indeks Konversi	23.681.363.390,00	B Indeks Konversi	22.726.406.620,00	B Indeks Konversi	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	98,5 Persen	97 Persen	8.313.307.967,00	97,5 Persen	9.529.337.653,00	98 Persen	9.710.536.553,00	98 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Akas, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yg memiliki Izin Operasional dan Sesuai Standar	55 Persen	57 Persen	40.000.000,00	58 Persen	43.000.000,00	59 Persen	50.000.000,00	59 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Fasilitas Yang Melaksanakan UKBM	97 Persen	98 Persen	140.000.000,00	99 Persen	155.000.000,00	100 Persen	140.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	54,76 Persen	55,72 Persen	2.025.000.000,00	55,98 Persen	3.125.000.000,00	56,80 Persen	2.625.000.000,00	56,80 Persen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak	62,62 Persen	63,66 Persen	975.000.000,00	64,96 Persen	1.400.000.000,00	66,52 Persen	1.150.000.000,00	66,52 Persen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sarana Prasarana Persampahan Dalam Kawasan Pengelolaan Persampahan	30 Persen	30 Persen	50.000.000,00	35,28 Persen	225.000.000,00	38,24 Persen	400.000.000,00	36,47 Persen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PersentaseJumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Limbah Aman	11,05 Persen	11,17 Persen	565.000.000,00	21,21 Persen	2.415.000.000,00	21,33 Persen	565.000.000,00	21,33 Persen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Drainase	63,87 Persen	63,99 Persen	665.000.000,00	64,39 Persen	715.000.000,00	71,65 Persen	615.000.000,00	71,65 Persen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG





Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pembangunan Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah	60 Persen	60 Persen	0,00	80 Persen	200.000.000,00	100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Dan Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik Dan Tertib Administrasi	45,18 Persen	45,35 Persen	255.000.000,00	45,52 Persen	255.000.000,00	46,66 Persen	455.000.000,00	46,66 Persen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	57 Persen	71 Persen	300.000.000,00	71 Persen	50.000.000,00	86 Persen	250.000.000,00	86 Persen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	80 Persen	81 Persen	8.050.000.000,00	81,2 Persen	8.750.000.000,00	81,3 Persen	8.250.000.000,00	81,3 Persen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi dengan Kondute Baik	53,85 Persen	70 Persen	175.000.000,00	75 Persen	185.000.000,00	80 Persen	175.000.000,00	80 Persen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten	60 Persen	70 Persen	150.000.000,00	80 Persen	275.000.000,00	85 Persen	225.000.000,00	85 Persen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAH PERMUKIMAN											
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	25 Persen	50 Persen	35.000.000,00	75 Persen	50.000.000,00	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAH PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	4,36 Persen	2,86 Persen	35.000.000,00	4,68 Persen	50.000.000,00	5,94 Persen	50.000.000,00	21,13 Persen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	3 Persen	10 Persen	70.000.000,00	20 Persen	100.000.000,00	30 Persen	100.000.000,00	30 Persen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Trantibum	100 Persen	100 Persen	1.454.576.000,00	100 Persen	1.453.776.000,00	100 Persen	1.453.576.000,00	100 Persen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 Persen	100 Persen	283.180.200,00	100 Persen	282.780.200,00	100 Persen	282.330.200,00	100 Persen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemenuhan SPM Bidang Kebencanaan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	480.000.000,00	100 Persen	515.000.000,00	100 Persen	500.000.000,00	100 Persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	100 Persen	100 Persen	63.500.000,00	100 Persen	63.500.000,00	100 Persen	80.206.931,00	100 Persen	0,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan dan Urusan Wajib Bidang Sosial	100 Persen	100 Persen	89.360.000,00	100 Persen	89.360.000,00	100 Persen	89.360.000,00	100 Persen	0,00	DINAS SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan Sosial	100 Persen	100 Persen	194.500.000,00	100 Persen	194.500.000,00	100 Persen	194.500.000,00	100 Persen	0,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	100 Persen	100 Persen	72.000.000,00	100 Persen	77.000.000,00	100 Persen	72.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS SOSIAL



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	54,55 Persen	58,33 Persen	7.500.000,00	61,54 Persen	10.500.000,00	64,29 Persen	10.200.000,00	64,29 Persen	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta Pelatihan Bersertifikasi	0 Persen	100 Persen	22.608.000,00	100 Persen	55.000.000,00	100 Persen	45.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	0 Persen	100 Persen	11.000.000,00	100 Persen	10.500.000,00	100 Persen	7.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan Gender	40 Persen	50 Persen	35.000.000,00	60 Persen	50.000.000,00	70 Persen	50.000.000,00	80 Persen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan kualitas Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	30 Persen	40 Persen	35.000.000,00	50 Persen	55.000.000,00	60 Persen	55.000.000,00	70 Persen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	50 Persen	60 Persen	148.000.000,00	65 Persen	181.000.000,00	70 Persen	181.000.000,00	75 Persen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				0,00		0,00		0,00		0,00	-	
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Angka Kecukupan Energi	91,88 Poin	91,93 Poin	126.296.440,00	91,98 Poin	186.296.440,00	92,48 Poin	186.296.440,00	92,48 Poin	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	41,67 Persen	50,00 Persen	23.000.000,00	62,50 Persen	23.000.000,00	83,33 Persen	23.000.000,00	83,33 Persen	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan dan mutu pangan	100 Persen	100 Persen	35.991.120,00	100 Persen	35.991.120,00	100 Persen	35.991.120,00	100 Persen	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luasan Bidang Tanah yang bersertifikat	15 Persen	20 Persen	70.000.000,00	20 Persen	100.000.000,00	20 Persen	100.000.000,00	60 Persen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Kajian Lingkungan Hidup	100 persen	100 persen	145.000.000,00	100 persen	160.000.000,00	100 persen	155.000.000,00	100 persen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Pelayanan Perijinan Lingkungan Hidup	40 persen	50 persen	112.824.910,00	55 persen	152.000.000,00	60 persen	184.500.000,00	60 persen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup	0 persen	50 persen	74.500.000,00	55 persen	80.000.000,00	60 persen	78.500.000,00	60 persen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Penghasil B3 dan LB3	25 persen	30 persen	20.069.557,00	35 persen	27.569.557,00	37 persen	25.069.557,00	37 persen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mendukung/ikuti Aman dan atau Teguran Hasil Pengawasan	20 persen	23 persen	12.000.000,00	25 persen	15.000.000,00	28 persen	17.000.000,00	28 persen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan yang Diraih di tkt. Prov atau Nasional	0 persen	100 persen	42.500.000,00	100 persen	45.000.000,00	100 persen	50.000.000,00	100 persen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 thn	2,5 Orang	2,5 Orang	70.000.000,00	2,5 Orang	105.000.000,00	2,5 Orang	105.000.000,00	2,5 Orang	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2 Orang	2 Orang	70.000.000,00	2 Orang	105.000.000,00	2 Orang	105.000.000,00	2 Orang	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk	0 Persen	1,17 Persen	70.000.000,00	1,17 Persen	105.000.000,00	1,17 Persen	105.000.000,00	1,17 Persen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	70 Persen	30 Persen	300.000.000,00	40 Persen	325.000.000,00	50 Persen	325.000.000,00	60 Persen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	70 Persen	50 Persen	30.000.000,00	60 Persen	40.000.000,00	70 Persen	65.000.000,00	80 Persen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Tertib Lalulintas Jalan	45 Persen	47 Persen	295.440.667,00	48,75 Persen	376.832.577,00	50 Persen	328.005.861,00	60 Persen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan	40 Persen	40,20 Persen	184.639.146,00	40,50 Persen	273.500.000,00	41 Persen	254.539.146,00	41 Persen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pengembangan komunikasi media massa dan informasi	75 Persen	85 Persen	500.000,00	85 Persen	490.000,00	100 Persen	525.000,00	100 Persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik	100 Persen	100 Persen	1.015.663.616,00	100 Persen	1.072.942.597,00	100 Persen	103.381.384,00	100 Persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	0 Persen	20 Persen	7.500.000,00	60 Persen	12.000.000,00	80 Persen	12.000.000,00	88 Persen	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi	0 Persen	100 Persen	10.000.000,00	100 Persen	22.000.000,00	100 Persen	22.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	0 Persen	40 Persen	10.000.000,00	70 Persen	17.312.800,00	60 Persen	22.412.800,00	60 Persen	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi diKabupaten/Kota	10 Persen	10 Persen	20.000.000,00	10 Persen	50.000.000,00	10 Persen	30.000.000,00	10 Persen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan kualitas pelayanan perizinan	5 Persen	5 Persen	30.000.000,00	5 Persen	70.000.000,00	5 Persen	70.000.000,00	5 Persen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah proyek penanaman modal yang merealisasikan investasinya	100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	18	05	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola secara elektronik	100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	100 Persen	84 Persen	500.000,00	80,77 Persen	500.000,00	81,48 Persen	500.000,00	81,48 Persen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda berprestasi	100 Persen	100 Persen	60.500.000,00	100 Persen	154.442.081,00	100 Persen	184.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet Berprestasi	20 Persen	25 Persen	40.009.155,00	30,77 Persen	85.000.000,00	32,35 Persen	135.552.564,00	67,65 Persen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase organisasi olahraga yang aktif	100 Persen	92,86 Persen	23.500.000,00	92,86 Persen	85.500.000,00	92,86 Persen	79.000.000,00	92,86 Persen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Anggota Pramuka Berprestasi	0 Persen	100 Persen	8.000.000,00	100 Persen	43.500.000,00	100 Persen	42.500.000,00	100 Persen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang dipublikasi	100 Persen	30 Persen	15.841.340,00	60 Persen	15.841.340,00	100 Persen	15.841.340,00	100 Persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase ketersediaan infrastruktur persandian	39 Persen	30 Persen	50.000.000,00	60 Persen	50.000.000,00	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jenis Kebudayaan yang Dikelola	63,38 Persen	65,14 Persen	525.368.786,00	66,9 Persen	525.368.786,00	68,66 Persen	525.368.786,00	68,66 Persen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Data Sejarah yang Ditata	33,33 Persen	50 Persen	290.804.715,00	58,33 Persen	390.804.715,00	66,67 Persen	390.804.715,00	66,67 Persen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola	19,81 Persen	29,25 Persen	173.172.020,00	38,68 Persen	273.172.020,00	48,11 Persen	273.172.020,00	48,11 Persen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	18,7 Persen	18,9 Persen	30.000.000,00	18,9 Persen	55.000.000,00	18,9 Persen	30.000.000,00	56,7 Persen	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	64,29 Persen	71,43 Persen	30.000.000,00	78,57 Persen	30.000.000,00	85,71 Persen	55.000.000,00	78,57 Persen	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
3			URUSAN PEMERINTAHAN FILIHAN											
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	20 TON	85 TON	199.200.000,00	85 TON	229.000.000,00	85 TON	224.000.000,00	85 TON	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budaya	200 Ton	203 Ton	200.000.000,00	205 Ton	230.000.000,00	208 Ton	225.000.000,00	208 Ton	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100 Persen	100 Persen	8.000.000,00	100 Persen	1.000.000,00	100 Persen	1.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				0,00		0,00		0,00		0,00	-
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				0,00		0,00		0,00		0,00	-
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				0,00		0,00		0,00		0,00	-
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				0,00		0,00		0,00		0,00	-
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perngkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Alat Mesin Pertanian yang berfungsi dengan baik	76 Persen	76 Persen	25.000.000,00	78 Persen	35.000.000,00	79 Persen	25.000.000,00	79 Persen	0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Perkebunan	1.200 Ku/Ha	1.207,36 Ku/Ha	55.000.000,00	1.207,59 Ku/Ha	70.000.000,00	1.207,75 Ku/Ha	55.000.000,00	1.207,75 Ku/Ha	0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Cabe Rawit)	5,50 Ku/Ha	5,61 Ku/Ha	30.000.000,00	5,61 Ku/Ha	40.000.000,00	5,70 Ku/Ha	30.000.000,00	5,70 Ku/Ha	0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Tomat)	3,50 Ku/Ha	3,67 Ku/Ha	25.000.000,00	3,85 Ku/Ha	30.000.000,00	3,96 Ku/Ha	25.000.000,00	3,96 Ku/Ha	0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan (Jagung)	55,00 Ku/Ha	55,00 Ku/Ha	45.000.000,00	55,01 Ku/Ha	50.000.000,00	55,15 Ku/Ha	45.000.000,00	55,20 Ku/Ha	0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan (Padi)	60 Ku/Ha	55 Ku/Ha	50.000.000,00	55,15 Ku/Ha	60.000.000,00	55,20 Ku/Ha	50.000.000,00	55,20 Ku/Ha	0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	70 Persen	72 Persen	15.000.000,00	73 Persen	15.000.000,00	75 Persen	15.000.000,00	75 Persen	0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesmavet	10 Persen	9 Persen	240.000.000,00	8 Persen	255.000.000,00	7 Persen	240.000.000,00	7 Persen	0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Penurunan Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	35 Persen	30 Persen	25.000.000,00	28 Persen	30.000.000,00	26 Persen	25.000.000,00	26 Persen	0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyuluhan Pertanian	82 Persen	83 Persen	413.000.000,00	84 Persen	435.000.000,00	85 Persen	413.000.000,00	85 Persen	0,00	DINAS PERTANIAN
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	10 Persen	30 Persen	43.000.000,00	30 Persen	80.489.103,00	30 Persen	71.666.060,00	90 Persen	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	0,15 Persen	0,17 Persen	56.000.000,00	0,18 Persen	58.000.000,00	0,20 Persen	63.000.000,00	0,20 Persen	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	21 Persen	28 Persen	24.080.670,00	33 Persen	32.000.000,00	50 Persen	48.000.000,00	50 Persen	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Sentra Industri Aktif	0 Persen	25 Persen	27.000.000,00	25 Persen	61.021.794,00	25 Persen	24.000.000,00	75 Persen	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki Izin Usaha	0 Persen	20 Persen	12.000.000,00	33 Persen	15.000.000,00	47 Persen	17.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang Terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	0 Persen	33 Persen	10.000.000,00	33 Persen	12.000.000,00	34 Persen	12.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penyelesaian Temuan Lapangan	0 Persen	60 Persen	15.000.000,00	80 Persen	15.000.000,00	80 Persen	15.000.000,00	80 Persen	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase KK Transmigrasi yang Berhasil Mendapatkan Sertifikat	60,22 Persen	90,32 Persen	17.000.000,00	100 Persen	17.000.000,00	100 Persen	17.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01		SEKRETARIAT DAERAH											



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	100 Persen	1.000,00	100 Persen	1.000,00	100 Persen	1.000,00	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	1.000,00	100 Persen	1.000,00	100 Persen	1.000,00	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penetapan dan Pengesahan Peraturan dan Penyelesaian Perkara	100 Persen	100 Persen	1.000,00	100 Persen	1.000,00	100 Persen	1.000,00	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Program Pembangunan yang Berkualitas dan Sesuai Dengan Perencanaan	100 Persen	100 Persen	1.000,00	100 Persen	1.000,00	100 Persen	1.000,00	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	02		SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	57,62 Persen	57,62 Persen	4.320.968.400,00	58,48 Persen	4.766.368.400,00	58,5 Persen	4.766.368.400,00	58,5 Persen	0,00	SEKRETARIAT DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	01		PERENCANAAN											
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Target Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	74 Persen	638.421.180,00	89 Persen	511.474.540,00	100 Persen	524.084.850,00	100 Persen	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	100 Persen	100 Persen	103.091.590,00	100 Persen	320.182.220,00	100 Persen	272.632.190,00	100 Persen	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kinerja OPD Dengan Predikat Sangat Tinggi (91% - 100%)	93,63 Person	94,58 Person	65.773.410,00	95,54 Person	844.676.170,00	96,5 Person	809.579.560,00	97,46 Person	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	02		KEUANGAN											
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan Anggaran	85,71 Person	85,71 Person	428.215.383,00	87,14 Person	458.215.383,00	90 Person	469.215.383,00	90 Person	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	80 Person	80 Person	658.191.882,00	83,57 Person	673.207.756,00	90 Person	673.207.756,00	90 Person	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pemenuhan PAD Daerah	82 person	82 person	608.008.815,00	83 person	608.008.815,00	84 person	608.008.815,00	84 person	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	03		KEPEGAWAIAN											
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				0,00		0,00		0,00		0,00	-
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				0,00		0,00		0,00		0,00	-
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kematangan Inovasi	81,82 Person	83,33 Person	285.588.200,00	84,62 Person	366.338.200,00	92,31 Person	390.838.200,00	92,31 Person	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi/ Penelitian yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	0,28 Person	0,63 Person	294.883.890,00	0,86 Person	392.528.130,00	1 Person	357.828.670,00	1 Person	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	01		INSPEKTORAT DAERAH											
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan	93 Person	93 Person	716.850.388,00	94 Person	816.400.388,00	95 Person	973.350.388,00	95 Person	0,00	INSPEKTORAT DAERAH



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	93 Persen	93 Persen	283.963.187,00	94 Persen	285.673.493,00	95 Persen	285.673.540,00	95 Persen	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kesadaran Pemuda di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0,78 Persen	1,15 Persen	700.000.000,00	1,51 Persen	700.000.000,00	1,87 Persen	700.000.000,00	1,87 Persen	0,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	100 Persen	100 Persen	30.627.222.528,00	100 Persen	627.222.528,00	100 Persen	627.222.528,00	100 Persen	0,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	100 Persen	26.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	0,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X														
X	XX													
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.310.775.532,00	100 Persen	2.548.847.725,00	100 Persen	2.570.576.376,00	100 Persen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.357.237.092,00	100 Persen	2.447.030.486,00	100 Persen	2.435.708.032,00	100 Persen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.978.036.974,00	100 Persen	2.053.944.857,00	100 Persen	2.048.898.644,00	100 Persen	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,53 Persen	99,53 Persen	2.764.323.639,00	99,53 Persen	2.854.643.666,00	99,53 Persen	2.837.917.272,00	99,53 Persen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.184.744.937,00	100 Persen	2.380.120.518,00	100 Persen	2.389.733.785,00	100 Persen	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,83 Persen	90,41 Persen	4.793.186.650,00	91,99 Persen	4.970.049.525,00	93,51 Persen	7.575.715.939,00	93,51 Persen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	68.856.079.645,00	100 Persen	69.741.228.973,00	100 Persen	69.940.855.352,00	100 Persen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.901.574.729,00	100 Persen	1.994.036.666,00	100 Persen	1.997.312.230,00	100 Persen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.255.409.456,00	100 Persen	2.316.787.540,00	100 Persen	2.321.053.812,00	100 Persen	0,00	KECAMATAN BANGKUB
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3.597.549.754,00	100 Persen	3.742.597.902,00	100 Persen	3.697.912.764,00	100 Persen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.057.473.764,00	100 Persen	2.119.670.518,00	100 Persen	2.136.370.546,00	100 Persen	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.033.218.622,00	100 Persen	2.398.378.137,00	100 Persen	2.429.291.641,00	100 Persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.077.233.816,00	100 Persen	2.097.388.589,00	100 Persen	2.116.706.666,00	100 Persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.057.620.765,00	100 Persen	2.105.411.147,00	100 Persen	2.107.842.629,00	100 Persen	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH





Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.244.812.001,00	100 Persen	2.297.149.725,00	100 Persen	2.301.655.217,00	100 Persen	0,00	KECAMATAN PINO GALUMAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	9.807.680.993,00	100 Persen	10.043.147.056,00	100 Persen	10.161.438.775,00	100 Persen	0,00	DINAS PERTANIAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.832.414.981,00	100 Persen	3.027.508.227,00	100 Persen	3.042.508.227,00	100 Persen	0,00	DINAS SOSIAL
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3.980.833.895,00	100 Persen	4.363.990.507,00	100 Persen	4.225.990.507,00	100 Persen	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	15.261.416.523,00	100 persen	17.585.974.497,00	100 persen	17.537.935.505,00	100 persen	0,00	SEKRETARIAT DPRD
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.133.204.267,00	100 Persen	2.174.207.727,00	100 Persen	2.240.661.279,00	100 Persen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	100 Persen	2.595.251.805,00	100 Persen	2.738.739.128,00	100 Persen	2.763.156.185,00	100 Persen	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.380.863.978,00	100 Persen	2.668.532.152,00	100 Persen	2.583.869.097,00	100 Persen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.184.299.457,00	100 Persen	2.376.488.897,00	100 Persen	2.298.859.993,00	100 Persen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 Persen	98 Persen	1.876.414.939,00	98 Persen	1.938.141.785,00	98 Persen	1.951.432.875,00	98 Persen	0,00	KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3.101.862.331,00	100 Persen	3.180.274.424,00	100 Persen	3.194.525.427,00	100 Persen	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.060.210.234,00	100 Persen	1.111.488.442,00	100 Persen	1.112.685.163,00	100 Persen	0,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	51.031.332.952,00	100 Persen	51.187.210.913,00	100 Persen	51.990.302.003,00	100 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Kehumasan dan Keprotokolan	100 Persen	100 Persen	1.000,00	100 Persen	1.000,00	100 Persen	1.000,00	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Penataan Peningkatan Kelembagaan PD, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur	100 Persen	100 Persen	1.000,00	100 Persen	1.000,00	100 Persen	1.000,00	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum Kedinasan	100 Persen	100 Persen	1.000,00	100 Persen	1.000,00	100 Persen	1.000,00	100 Persen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH



## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan SKPD. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan SKPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan SKPD.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-Q).

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan



kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara komulatif hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program SKPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan SKPD.



**Tabel 8.1**  
**Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target tahun ke-			Kondisi Akhir
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
				2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	68,79 Poin	69,33 Poin	69,87 Poin	70,4 Poin	70,4 Poin
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	44,83 Poin	49,86 Poin	55,23 Poin	60,03 Poin	60,03 Poin
3	Terwujudnya Pemerataan dan Petumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Angka Kemiskinan	7,25 Persen	6,95 Persen	6,65 Persen	6,35 Persen	6,35 Persen
		Gini Rasio	0,328 Poin	0,325 Poin	0,320 Poin	0,310 Poin	0,310 Poin
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,00 Persen	6,18 Persen	6,24 Persen	6,33 Persen	6,33 Persen
4	Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	66,29 Poin	68,89 Poin	69,62 Poin	70,44 Poin	70,44 Poin

Sumber : Bapelitbang Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

**Tabel 8.2**

Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal Perencanaan	Target tahun ke-			Kondisi Akhir
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
				2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	10 Persen	10 Persen	10 Persen	10 Persen	20 Persen
		Prestasi Pemuda dan Olah Raga	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai
		Harapan Lama Sekolah	12,41 Tahun	12,51 Tahun	12,60 Tahun	12,70 Tahun	12,70 Tahun
		Rata-rata Lama Sekolah	8,74 Tahun	8,88 Tahun	9,03 Tahun	9,17 Tahun	9,17 Tahun
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	67,97 Tahun	68,10 Tahun	68,23 Tahun	68, 36 Tahun	68, 36 Tahun
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN	43,13 Poin	48,13 Poin	54,13 Poin	60,13 Poin	60,13 Poin
		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat

		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP Predikat	WTP Predikat	WTP Predikat	WTP Predikat	WTP Predikat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	78,77 Poin	80,5 Poin	82,24 Poin	83,98 Poin	83,98 Poin
4	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,98 Persen	3,86 Persen	3,75 Persen	3,07 Persen	3,07 Persen
		PDRB per Kapita (ADHB)	34.633.314 Rupiah	35.401.167 Rupiah	37.169.020 Rupiah	37.936.873 Rupiah	37.936.873 Rupiah
5	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Yang Mendukung Performa Wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	42,60 Poin	43,79 Poin	44,93 Poin	46,18 Poin	46,18 Poin
6	Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,04 Poin	82,85 Poin	83,43 Poin	83,43 Poin	83,43 Poin
7	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,35 Persen	80,89 Persen	81,27 Persen	81,92 Persen	81,92 Persen
8	Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	67,16 Persen	68,01 Persen	68,86 Persen	70,23 Persen	70,23 Persen

Sumber : Bapelitbang Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023



**Tabel 8.3**

**Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026**

No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD	Nama SKPD
					tahun ke-1	tahun ke-2	tahun ke-3		
					2024	2025	2026		
1	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan	Capaian sasaran daerah lingkup pemerintahan dan kesra	Persen	100	100	100	100	100	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
	Program Peningkatan Prestasi Generasi Muda dan Olahraga		Persen	100	100	100	100	100	
	Program Peningkatan Derajat Kesehatan		Persen	100	100	100	100	100	
2	Program Penguatan Daya Saing Lokal Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Capaian sasaran daerah lingkup perekonomian	Persen	100	100	100	100	100	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Capaian sasaran daerah lingkup infrastruktur pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	

	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		Persen	100	100	100	100	100	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persen	100	100	100	100	100	
	Program Peningkatan Ketangguhan Masyarakat terhadap Bencana		Persen	100	100	100	100	100	
4	Program Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian sasaran daerah lingkup penunjang pemerintahan dan keamanan ketertiban	Persen	100	100	100	100	100	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Sumber data : Bapelitbang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023.

Tabel 8.4

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
[ OPD ] DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga					
[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat dan Objek Pemajuan Kebudayaan					
Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	93,1 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama	73,5 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal	68,86 Nilai	69,29 Nilai	75,29 Nilai	81,29 Nilai	81,29 Nilai
Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional	1,45 Nilai	1,49 Nilai	1,53 Nilai	1,57 Nilai	1,57 Nilai
Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Dasar)	1,57 Nilai	1,61 Nilai	1,65 Nilai	1,69 Nilai	1,69 Nilai
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan	67,49 Persen	73,03 Persen	78,41 Persen	83,69 Persen	83,69 Persen
Persentase PNF Terakreditasi Dan PAUD Terakreditasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Persentase SD/ MI terakreditasi A	13,98 Persen	12,90 Persen	20,43 Persen	13,98 Persen	13,98 Persen
Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Persentase SMP/ MTs terakreditasi A	5 Persen	30 Persen	45 Persen	10 Persen	10 Persen
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					



OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal/Prakarya pada Setiap Jenjang Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat dan Objek Pemajuan Kebudayaan</b>					
Cakupan Pelindungan, Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan	58,30 Persen	66,57 Persen	74,84 Persen	77,40 Persen	77,40 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>					
Persentase Jenis Kebudayaan yang Dikelola	63,38 Persen	65,14 Persen	66,9 Persen	68,66 Persen	68,66 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>					
Persentase Data Sejarah yang Ditata	33,33 Persen	50 Persen	58,33 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>					
Persentase Cagar Budaya yang Dikelola	19,81 Persen	29,25 Persen	38,68 Persen	48,11 Persen	48,11 Persen
<b>[ URUSAN ] NON URUSAN</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah</b>					
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD (Opini BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP)	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
[ OPD ] DINAS KESEHATAN					
[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
[ TUJUAN ] Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat					
[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat					
Angka Kematian Bayi	16,39 Per 1000 KLH	7,7 Per 1000 KLH	7,6 Per 1000 KLH	7,5 Per 1000 KLH	7,5 Per 1000 KLH
Angka Kematian Ibu	152 Per 100.000 KLH	155 Per 100.000 KLH	153,8 Per 100.000 KLH	151,5 Per 100.000 KLH	151,5 Per 100.000 KLH
Persentase Angka Penemuan Penyakit Menular Tuberkulosis	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	84 Persen
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kesehatan	95 Persen	95,5 Persen	96 Persen	96,5 Persen	96,5 Persen
Prevalensi Penyakit Tidak Menular Hipertensi	29 Persen	28,3 Persen	27,6 Persen	26,9 Persen	26,9 Persen
Prevalensi Stunting	6,0 Persen	3,0 Persen	2,50 Persen	2,10 Persen	2,10 Persen
Rasio Tenaga Kesehatan	0,95 Rasio	1 Rasio	1,2 Rasio	1,25 Rasio	1,25 Rasio
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Dasar	B Indeks Konversi	B Indeks Konversi	B Indeks Konversi	SB Indeks Konversi	SB Indeks Konversi
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
Persentase Fasyankes Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	96,5 Persen	97 Persen	97,5 Persen	98 Persen	98 Persen
[ PROGRAM ] PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yg memiliki Izin Operasional dan Sesuai Standar	55 Persen	57 Persen	58 Persen	59 Persen	59 Persen
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					



OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan UKBM	97 Persen	98 Persen	99 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ URUSAN ] NON URUSAN</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah</b>					
Akuntabilitas Kinerja SKPD (LKIP)	B Predikat	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD (Opini BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ OPD ] DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatkan Pelayanannya Infrastruktur Yang Mendukung Performa Wilayah</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum</b>					
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	58,08 Nilai	58,84 Nilai	60,55 Nilai	61,23 Nilai	61,23 Nilai
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>					
Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	54,76 Persen	55,72 Persen	55,98 Persen	56,80 Persen	56,80 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>					
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak	62,62 Persen	63,40 Persen	64,96 Persen	66,52 Persen	66,52 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>					
Persentase rumah tangga yang memiliki akses sarana prasarana persampahan dalam kawasan pengelolaan persampahan	30 Persen	30 Persen	35,29 Persen	38,24 Persen	38,24 Persen

OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>					
Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Limbah Aman	11,05 Persen	11,17 Persen	21,21 Persen	21,33 Persen	21,33 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>					
Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Drainase	63,87 Persen	63,99 Persen	64,39 Persen	71,65 Persen	71,65 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>					
Persentase Pembangunan Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Presentase Pembangunan Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah	60 Persen	60 Persen	80 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>					
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Dan Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik Dan Tertib Administrasi	45,18 Persen	45,35 Persen	45,52 Persen	46,66 Persen	46,66 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>					
Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	57 Persen	71 Persen	71 Persen	85,71 Persen	85,71 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>					
Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	80 Persen	81 Persen	81,2 Persen	81,3 Persen	81,3 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>					
Persentase Penyedia Jasa Konstruksi dengan Konduite Baik	53,85 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang</b>					
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,35 Persen	80,89 Persen	81,27 Persen	81,92 Persen	81,92 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>					
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten	60 Persen	70 Persen	80 Persen	85 Persen	85 Persen
<b>[ URUSAN ] NON URUSAN</b>					

OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah</b>					
Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKjIP)	Tinggi Predikat	Tinggi Predikat	Tinggi Predikat	Tinggi Predikat	Tinggi Predikat
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	88,83 Persen	90,41 Persen	91,99 Persen	93,51 Persen	93,51 Persen
<b>[ OPD ] DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>					
<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Yang Mendukung Performa Wilayah</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Infrastruktur Perumahan dan kawasan Permukiman</b>					
Indeks Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	20,43 persen	33,33 persen	55,00 persen	80,83 persen	80,83 persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>					
Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	25 Persen	50 Persen	75 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya kinerja layanan pertanahan</b>					
Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kabupaten dan tanah Kecamatan yang sudah didaftarkan di BPN	81,255 persen	85,85 persen	89,075 persen	92,3 persen	92,3 persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>					
Persentase Luasan Bidang Tanah yang bersertifikat	15 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen	60 Persen



OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
<b>[ URUSAN ] NON URUSAN</b>					
<b>[ TUJUAN ]</b> Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel					
<b>[ SASARAN ]</b> Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah					
Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKjIP)	b predikat	b predikat	bb predikat	bb predikat	bb predikat
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
Efektifitas pelaksanaan program penunjang	99,53 persen	99,53 persen	99,53 persen	99,53 persen	99,53 persen
<b>[ OPD ] SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>					
<b>[ URUSAN ]</b> URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
<b>[ TUJUAN ]</b> Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
<b>[ SASARAN ]</b> Meningkatkan penegakan peraturan daerah dan penanganan gangguan trantibum					
Persentase Peningkatan penegakan peraturan daerah dan Penanganan gangguan trantibum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ PROGRAM ]</b> PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Trantibum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ TUJUAN ]</b> Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Yang Mendukung Performa Wilayah					
<b>[ SASARAN ]</b> Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi bencana					
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ PROGRAM ]</b> PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					

OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ URUSAN ] NON URUSAN					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah					
Jumlah temuan hasil Pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD (LKjIP)	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat
[ OPD ] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana					
[ SASARAN ] Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam mitigasi Bencana					
Persentase Kapasitas masyarakat dalam mitigasi Bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ URUSAN ] NON URUSAN					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah					
Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKjIP)	CC Predikat	B Predikat	B Predikat	B Predikat	B Predikat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ OPD ] DINAS SOSIAL					

OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Pendapatan Masyarakat					
[ SASARAN ] Meningkatkan Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat					
Indeks perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	70.94 Nilai	69.09 Nilai	69.09 Nilai	69.09 Nilai	71.03 Nilai
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ PROGRAM ] PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
Persentase Pelayanan dan Urusan Wajib Bidang Sosial	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ PROGRAM ] PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
Persentase Graduasi Mandiri KPM PKH	0.54 Persen	0.54 Persen	0.54 Persen	0.54 Persen	1.63 Persen
[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
Persentase Penanganan bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ URUSAN ] NON URUSAN					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah					
Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD (LKjIP)	B Predikat	B Predikat	B Predikat	B Predikat	B Predikat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ OPD ] DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Pendapatan Masyarakat					
[ SASARAN ] Pengurangan Pengangguran					



OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
[ OPD ] DINAS KETAHANAN PANGAN					
[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Pendapatan Masyarakat					
[ SASARAN ] Meningkatkan pola pangan harapan					
Skor Pola Pangan Harapan	85,7 Poin	86,2 Poin	86,7 Poin	87,2 Poin	87,2 Poin
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
Skor Angka Kecukupan Energi	91,88 Poin	91,93 Poin	91,98 Poin	92,48 Poin	92,48 Poin
[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
Persentase penanganan daerah rawan pangan	41,67 Persen	50 Persen	62,50 Persen	83,33 Persen	83,33 Persen
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
Persentase keamanan dan mutu pangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ URUSAN ] NON URUSAN					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah					
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD (LKIP)	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ OPD ] DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					
[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup					



OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
<b>[ BASARAN ] Meningkatkan konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan</b>					
Indeks Kualitas Air	57 Poin	63.5 Poin	63.7 Poin	63.9 Poin	63.9 Poin
Indeks Kualitas Udara	92 Poin	97.7 Poin	97.8 Poin	97.9 Poin	97.9 Poin
Indeks Kualitas Air Laut	N.A.	40 Poin	45 Poin	52 Poin	52 Poin
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					
Persentase Pemenuhan kajian lingkungan hidup	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					
Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup	40 persen	50 persen	55 persen	60 persen	60 persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>					
Persentase Peningkatan konservasi lingkungan hidup	0 persen	50 persen	55 persen	60 persen	60 persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>					
Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan penghasil B3 dan LB3	25 persen	30 persen	35 persen	37 persen	37 persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>					
Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan	20 persen	23 persen	25 persen	28 persen	28 persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>					
Persentase penghargaan yang diraih di tkt. prov atau nasional	0 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					
Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat yang terkait dugaan kasus lingkungan	10 persen	13 persen	15 persen	17 persen	xx persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>					

OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Persentase peningkatan pengelolaan persampahan	51,47 persen	53 persen	55 persen	57 persen	57 persen
[ URUSAN ] NON URUSAN					
[ TUJUAN ] Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah					
Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKjIP)	CC Predikat	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ OPD ] DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil					
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang adminduk dan capil	90 Nilai	92 Nilai	94 Nilai	94 Nilai	94 Nilai
[ PROGRAM ] PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 persen	75 persen	80 persen	85 persen	85 persen
[ PROGRAM ] PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	0 persen	75 persen	80 persen	85 persen	85 persen
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
Persentase Pengelolaan Adminduk dan Capil	0 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen
[ URUSAN ] NON URUSAN					

OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah					
Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	0 temuan	0 temuan	0 temuan	0 temuan	0 temuan
Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKjIP)	BB predikat	BB predikat	BB predikat	BB predikat	BB predikat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Efektifitas Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	95 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
[ OPD ] DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa					
Cakupan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	0 Nilai	1.05 Nilai	1.10 Nilai	1.15 Nilai	1.20 Nilai
[ PROGRAM ] PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
Persentase Desa yang Menetapkan APBDES sesuai Regulasi yang Berlaku	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
Persentase Penguatan Kelembagaan Desa	0 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen
[ URUSAN ] NON URUSAN					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah					



OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKjIP)	B Predikat	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ OPD ] DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak</b>					
Cakupan Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	30 Persen	40 Persen	50 Persen	60 Persen	70 Persen
<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga</b>					
Cakupan Ketahanan Keluarga	30 Persen	30 Persen	40 Persen	50 Persen	50 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>					
Angka Kelahiran remaja umur 15-19 thn	2.5 Orang	2.5 Orang	2.5 Orang	2.5 Orang	2.5 Orang
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk	0 Poin	0 Poin	0 Poin	0 Poin	0 Poin
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>					
Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	70 Persen	30 Persen	40 Persen	50 Persen	60 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>					
Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	70 Persen	50 Persen	60 Persen	70 Persen	80 Persen



OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKjIP)	B predikat	B predikat	BB predikat	BB predikat	BB predikat
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ OPD ] DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b>					
<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan kualitas pengembangan layanan Sistem Pemerintahan Secara Elektronik</b>					
Indeks SPBE	2,1 Nilai	2,3 Nilai	2,5 Nilai	2,6 Nilai	2,6 Nilai
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>					
Persentase pengembangan komunikasi media massa dan informasi	75 Persen	85 Persen	85 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>					
Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah</b>					
Persentase SKPD yang Memanfaatkan Layanan data Sektoral	100 persen	30 persen	60 persen	100 persen	100 persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>					
Persentase data sektoral yang dipublikasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah</b>					
Persentase SKPD yang Memanfaatkan Layanan data Sektoral	100 persen	30 persen	60 persen	100 persen	100 persen



OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Presentase peningkatan kualitas pelayanan perizinan	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>					
Presentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang dikelola secara elektronik	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ URUSAN ] NON URUSAN</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah</b>					
Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKjIP)	Cc Predikat	B Predikat	B Predikat	B Predikat	B Predikat
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ OPD ] DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA</b>					
<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Pembinaan Pemuda dan Olahraga</b>					
Presentase Pemuda Berprestasi dan Atlit berprestasi	1.10 Persen	1.13 Persen	1.15 Persen	1.16 Persen	1.34 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>					
Peresentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	100 Persen	84 Persen	80.77 Persen	81.48 Persen	81.48 Persen
Peresentase Pemuda Berprestasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAAHRAGAAN</b>					





OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ URUSAN ] NON URUSAN</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah</b>					
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD (LKJIP)	BB Predikat	A Predikat	A Predikat	A Predikat	A Predikat
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
<b>[ OPD ] DINAS PARIWISATA</b>					
<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya Pendapatan Masyarakat</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan</b>					
Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	25.040 Orang	60.000 Orang	70.000 Orang	80.000 Orang	210.000 Orang
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>					
Capaian Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4,17 Persen	4,17 Persen	8,33 Persen	8,33 Persen	20,83 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>					
Capaian Peningkatan Pemasaran Event Pariwisata Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata</b>					
Persentase Pendapatan Sektor Pariwisata	4,34 Persen	4,34 Persen	4,35 Persen	4,36 Persen	4,36 Persen



OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
Persentase Fasilitasi Pemasaran Produk Ekonomi kreatif	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Aktif	0 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
[ URUSAN ] NON URUSAN					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah					
Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKjIP)	C predikat	CC predikat	B predikat	B predikat	B predikat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ OPD ] DINAS PERTANIAN					
[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Pendapatan Masyarakat					
[ SASARAN ] Meningkatkan Produksi pertanian					
Produksi Tanaman Hortikultura (Cabai Rawit)	13,5 Ton	31,97 Ton	36,76 Ton	38,59 Ton	38,59 Ton
Produksi Tanaman Hortikultura (Tomat)	4,25 Ton	8,85 Ton	9,73 Ton	10,21 Ton	10,21 Ton
Produksi Tanaman Pangan (Jagung)	47.500 Ton	47.650 Ton	47.800 Ton	47.950 Ton	47.950 Ton
Produksi Tanaman Pangan (Padi)	59.500 Ton	59.600 Ton	59.700 Ton	59.800 Ton	59.800 Ton
Produksi Tanaman Perkebunan (Kelapa)	15.570 Ton	15.575 Ton	15.578 Ton	15.580 Ton	15.580 Ton
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					



OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Persentase Alat Mesin Pertanian yang Berfungsi dengan baik	76 Persen	76 Persen	78 Persen	79 Persen	79 Persen
Produktivitas Perkebunan (Kelapa)	1.200 Ku/Ha	1.207,36 Ku/Ha	1.207,59 Ku/Ha	1.207,75 Ku/Ha	1.207,75 Ku/Ha
Produktivitas tanaman Hortikultura (Cabe Rawit)	5,5 Ku/Ha	5,61 Ku/Ha	5,61 Ku/Ha	5,7 Ku/Ha	5,7 Ku/Ha
Produktivitas tanaman Hortikultura (Tomat)	3,5 Ku/Ha	3,67 Ku/Ha	3,85 Ku/Ha	3,96 Ku/Ha	3,96 Ku/Ha
Produktivitas tanaman Pangan (Jagung)	55 Ku/Ha	55 Ku/Ha	55,01 Ku/Ha	55,15 Ku/Ha	55,15 Ku/Ha
Produktivitas Tanaman Pangan (Padi)	60 Ku/Ha	55 Ku/Ha	55,15 Ku/Ha	55,2 Ku/Ha	55,2 Ku/Ha
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>					
Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	70 Persen	72 Persen	73 Persen	75 Persen	75 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>					
Penurunan Serangan OPT Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	35 Persen	30 Persen	28 Persen	26 Persen	26 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>					
Persentase peningkatan penyuluhan pertanian	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Produksi Peternakan</b>					
Populasi ternak Kambing	9.096 Ekor	5.073 Ekor	5.224 Ekor	5.539 Ekor	5.539 Ekor
Populasi ternak Sapi	17.571 Ekor	17.700 Ekor	17.850 Ekor	18.000 Ekor	18.000 Ekor
Produksi Daging Kambing	2.800 Kg	3.000 Kg	3.200 Kg	3.500 Kg	3.500 Kg
Produksi Daging Sapi	41.000 Kg	41.500 Kg	42.000 Kg	42.500 Kg	42.500 Kg
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>					
Persentase Kesehatan Hewan Dan Kesmavet	10 Persen	9 Persen	8 Persen	7 Persen	7 Persen
<b>[ URUSAN ] NON URUSAN</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel</b>					

OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah</b>					
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD (LKjIP)	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ OPD ] DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>					
<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatkan Pendapatan Masyarakat</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UKM</b>					
Jumlah UMKM yang difasilitasi OPD meningkat Omzetnya	2.61 Persen	3 Persen	3.74 Persen	4.50 Persen	4.50 Persen
Nilai rata-rata volume usaha koperasi	16 Persen	17 Persen	22 Persen	27 Persen	27 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>					
Persentase Koperasi Sehat	0 Persen	20 Persen	60 Persen	80 Persen	68 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>					
Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ URUSAN ] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatkan Pendapatan Masyarakat</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Produktivitas Usaha Perdagangan dan Perindustrian</b>					
Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Perindustrian	11.91 Persen	12.16 Persen	12.41 Persen	12.66 Persen	12.66 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>					



OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ OPD ] SEKRETARIAT DAERAH</b>					
<b>[ URUSAN ] SEKRETARIAT DAERAH</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesra</b>					
Persentase Kebijakan Startegis di Bidang Pemerintahan dan Kesra	92 persen	95 persen	95 persen	95 persen	95 persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>					
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Persentase Penetapan dan Pengesahan Peraturan dan Penyelesaian Perkara	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan</b>					
Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	93 persen	95 persen	95 persen	95 persen	95 persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>					
Persentase Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Koordinasi Peningkatan Perekonomian Rakyat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Persentase Program Pembangunan yang Berkualitas dan Sesuai Dengan Perencanaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ URUSAN ] NON URUSAN</b>					

OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum					
Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum	97 Persen	97 Persen	97 Persen	97 Persen	97 Persen
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase Pelayanan Administrasi Kehumasan dan Keprotokolan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Persentase Penataan Peningkatan Kelembagaan PD, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Persentase Peningkatan Pelayanan Umum Kedinasan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ OPD ] SEKRETARIAT DPRD					
[ URUSAN ] SEKRETARIAT DPRD					
[ TUJUAN ] Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD					
Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	50.5 persen	57.62 persen	58.48 persen	58.48 persen	58.48 persen
[ PROGRAM ] PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	57,62 Persen	57,62 Persen	58,48 Persen	58,5 Persen	58,5 Persen
[ URUSAN ] NON URUSAN					
[ TUJUAN ] Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD					
Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	50.5 persen	57.62 persen	58.48 persen	58.48 persen	58.48 persen







OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Capaian penerapan Akuntansi dan Pelaporan	68,42 Persen	68,42 Persen	78,94 Persen	89,47 Persen	89,47 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>					
Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	80 Persen	80 Persen	83,57 Persen	90 Persen	90 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>					
Persentase Penerimaan PAD Daerah	82 persen	82 persen	83 persen	84 persen	84 persen
<b>[ URUSAN ] NON URUSAN</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan administrasi Perangkat Daerah</b>					
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD (Oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKjIP)	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	85,71 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ OPD ] BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					
<b>[ URUSAN ] KEPEGAWAIAN</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatnya Kualitas Aparatur</b>					
Indeks Kualitas Aparatur	0 Nilai	75 Nilai	78 Nilai	80 Nilai	80 Nilai
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>					
Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Persentase pemenuhan penataan ASN	57 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	70 Persen
<b>[ URUSAN ] PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					

OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatnya Kualitas Aparatur					
Indeks Kualitas Aparatur	0 Nilai	75 Nilai	78 Nilai	80 Nilai	80 Nilai
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ URUSAN ] NON URUSAN					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah					
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD (LKjIP)	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ OPD ] INSPEKTORAT DAERAH					
[ URUSAN ] INSPEKTORAT DAERAH					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja					
Persentase Peningkatan Hasil Pengawasan	85 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan	78 Persen	93 Persen	94 Persen	95 Persen	95 Persen
[ PROGRAM ] PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					

OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	93 Persen	93 Persen	94 Persen	95 Persen	95 Persen
[ URUSAN ] NON URUSAN					
[ TUJUAN ] Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah					
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Predikat	0 Predikat	0 Predikat	0 Predikat	0 Predikat
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD (LKjIP)	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ OPD ] KECAMATAN SANGKUB					
[ URUSAN ] NON URUSAN					
[ TUJUAN ] Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah					
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD (LKjIP)	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ OPD ] KECAMATAN BINTAUNA					
[ URUSAN ] NON URUSAN					



OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah					
Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKjIP)	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelurahan Sesuai Kewenangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
[ OPD ] KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR					
[ URUSAN ] NON URUSAN					
[ TUJUAN ] Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah					
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD (Oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD (LKjIP)	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 Persen	98 Persen	98 Persen	98 Persen	98 Persen
[ OPD ] KECAMATAN BOLANGITANG BARAT					
[ URUSAN ] NON URUSAN					

OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah					
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD (Oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD (LKjIP)	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.36 Persen	99.75 Persen	99.75 Persen	99.80 Persen	98.80 Persen
[ OPD ] KECAMATAN KAIDIPANG					
[ URUSAN ] NON URUSAN					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah					
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD (Oelh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD (LKJiP)	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	A Predikat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
[ OPD ] KECAMATAN PINOGALUMAN					
[ URUSAN ] NON URUSAN					
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan Kualitas Pengelolaan administrasi Perangkat Daerah					

OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD (Oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
<b>[ OPD ] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					
<b>[ URUSAN ] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					
<b>[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel</b>					
<b>[ SASARAN ] Meningkatkan penyelesaian konflik sosial dimasyarakat</b>					
Persentase peningkatan penyelesaian konflik sosial	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>					
Persentase Kesadaran Pemuda di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0.76 Persen	1.15 Persen	1.51 Persen	1.87 Persen	1.87 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>					
Persentase peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>					
Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
<b>[ URUSAN ] NON URUSAN</b>					

OPD/URUSAN/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA AKHIR
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
[ TUJUAN ] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel					
[ SASARAN ] Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah					
Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan
Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKjIP)	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Sumber : Bapelitbang Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

## **BAB IX PENUTUP**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah setelah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023, mengikuti berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2023. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 ini disusun dengan berpedoman pada tahapan terakhir dari RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

### **9.1 Pedoman Transisi**

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan RPJMD setelah periode RPJMD 2018-2023 ini berakhir dan sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif pada periode berikutnya pada saat pemilukada serentak Tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan berpedoman pada RPJP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025 dan RPD Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026.

### **9.2 Kaidah Pelaksanaan**

RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:





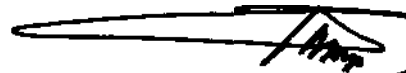
1. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya pada tahun 2024-2026;
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat: tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026;
3. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara wajib menjamin konsistensi antara RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
4. Bagi program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun prioritas nasional, dimana terdapat kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak mampu mengalokasikan anggaran terhadap program tersebut, maka dalam hal pembiayaannya dapat dilakukan melalui berbagai macam skema, antara lain melalui kerjasama dengan Badan Usaha (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responsibility* (CSR), maupun Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah, baik dalam negeri maupun lembaga-lembaga internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



5. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran RPD Tahun 2024-2026 ke dalam Rencana Strategis SKPD, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026.

Boroko, 31 Maret 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA



DEPRI PONTOH